

# Cita Inklusi

Rupa-rupa cerita perubahan  
Jaringan Indonesia Inklusi



**Pimpinan Redaksi**

Nabila Auliani Ruray

**Penulis**

Adamar Ghofari Ananda

Anton Jawamara

Dian Septi Trisnanti

Lilik HS

Mama Atha

Meidella Syahni,

Namira Fathya

Nurul Aeni

Roni Seran

Tati Sulastri

Tim LBH Apik

Tim LRC-KJHAM

**Penyunting**

Imam Shofwan

Lilik HS

Nabila Auliani Ruray

**Penata Letak**

Taufiqurrahman Kifu

**Illustrator**

Mohammad Furqon

**Diterbitkan oleh:**

Perkumpulan Pamflet Generasi

Komplek Buncit Indah

Jalan Mimosa IV Blok E No 17,

Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510, Indonesia

[www.pamflet.or.id](http://www.pamflet.or.id)

E-mail: [pamfletindonesia@gmail.com](mailto:pamfletindonesia@gmail.com)

# Cita Inklusi

*Rupa-rupa cerita perubahan Jaringan  
Indonesia Inklusi*

Perkumpulan Pamflet Generasi  
Linking and Learning Indonesia



Jakarta  
Perkumpulan Pamflet Indonesia

# Daftar Isi

Kata Pengantar

<a href="#"><u>Photovoice, Ajang Teman Tuli Dapat Berbicara</u></a>	1
<a href="#"><u>Menjahit Harapan Perempuan Difabel di Blora</u></a>	17
<a href="#"><u>Suara Grina, Pembawa Warta Adat Namblong</u></a>	33
<a href="#"><u>Menjaga Asa Perempuan Pembela HAM</u></a>	67
<a href="#"><u>Tempat Aman dan Dukungan yang Layak bagi Lansia</u></a>	87
<a href="#"><u>Pendidikan Marapu, Upaya Lestarikan Agama Leluhur</u></a>	115
<a href="#"><u>Memperjuangkan Keadilan Sebaik-baiknya</u></a>	143
<a href="#"><u>Oase Kampung Duri</u></a>	167
<a href="#"><u>Melihat Kembali Lansia: Kisah Pemuda dan Lansia di Karawang</u></a>	185
<a href="#"><u>Jalan Terjal Penerimaan Ibu, Pendukung Utama dalam Perjuanganku</u></a>	209
<a href="#"><u>Kampung Katong: Geliat Orang Muda Ciptakan Ruang Kreatif</u></a>	241
<a href="#"><u>Memeluk Diri Perempuan Pembela HAM</u></a>	273

# Kata Pengantar

Setiap perjalanan hidup mempunyai banyak lika liku makna, pahit dan manis dilalui bersama. Voice Indonesia, bersama dengan Indonesia Inklusi perlu untuk hadir dalam ruang kemanusiaan yang semakin menyempit karena menguatnya intoleransi dan diskriminasi terhadap mereka yang dianggap berbeda. Mulai dari perempuan penyandang disabilitas yang masih dianggap aib oleh keluarga, sampai dengan sulitnya bagi perempuan pembela Hak Asasi Manusia untuk dapat hidup dengan layak, tanpa kecemasan dengan beban kerja yang berat serta risiko yang dihadapi dalam mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tak dapat dipungkiri, kita masih banyak melihat ketidakadilan dan ketidaksetaraan di sekitar kita, namun untuk kawan-kawan pemangku hak, hal ini bukanlah menjadi hambatan, tetapi merupakan bagian perjuangan, yang kadang lelah tetapi terus menerus disuarakan.

Ada banyak cerita tentang kekuatan bagi mereka yang dianggap kelompok marjinal oleh masyarakat. Membangun kepercayaan diri, dari yang dulunya tidak mampu bersuara, menjadi mempunyai daya lenting yang kuat dan keinginan untuk mengubah nasib kehidupan menjadi seseorang yang berdaya secara ekonomi adalah harapan yang nyata, yang dapat kita semua baca dalam kumpulan cerita ini. Melalui berbagai cerita perubahan yang dituliskan oleh penyintas, dan pelaku perubahan di komunitas seperti Difabel Blora Mustika, Gerkatin dan Kota Kita, konsorsium iProtect Now, Jaringan Transgender Indonesia, sampai dengan pemangku hak dari kelompok masyarakat adat seperti Suara Grina di Papua, ataupun Sumba Integrated Development yang bekerja untuk melestarikan budaya Marapu agar diakui oleh negara, semua cerita tersebut membawa kita dalam suatu keterhubungan yang humanis dan penuh dengan solidaritas.

Cerita perubahan ini hadir karena kita semua menginvestasikan harapan pada lingkungan masyarakat, sistem, budaya maupun kebijakan negara yang harus melindungi kelompok marjinal, karena kebutuhan untuk menciptakan masyarakat sipil yang menghargai perbedaan dan inklusif adalah cita-cita besar kita semua. Publikasi ini hadir di tengah kita semua sebagai suatu refleksi bahwa di antara tekanan kuat dan ketidakadilan yang dihadapi oleh kawan-kawan pemangku hak, namun tetap ada kemenangan-kemenangan kecil yang patut kita rayakan. Ada kekuatan-kekuatan baru yang tumbuh dan membuat kita belajar lagi untuk lebih berempati dan bersolidaritas,

seperti yang disampaikan oleh Gilang, seorang aktivis Tuli dari Gerkatin, “Saya ingin lebih banyak akses untuk pengembangan bahasa isyarat agar teman Tuli dapat berkomunikasi lebih baik dan dapat lebih banyak akses. Kami ini sama dengan teman-teman lain hanya saja cara komunikasinya berbeda.

Kami ingin dianggap setara,”

*Let's celebrate the courage, the resilient and the thing that matters and to fought what is right.*

Atas nama Voice Indonesia, kami bangga dengan pencapaian kawan-kawan dan juga pembelajaran dari cerita yang luar biasa ini.

Salam Inklusi,

Siska Dewi Noya

*Voice Indonesia*

Tak terasa, sudah hampir empat tahun Pamflet menjadi fasilitator bagi keluarga Indonesia Inklusi melalui program Voice Link and Learn. Pengalaman ini mengantarkan kami ke dalam proses pembelajaran yang begitu mendalam. Melalui pertemuan dengan teman-teman mitra dan para pemangku hak, Pamflet sebagai fasilitator mendapatkan keuntungan besar untuk bisa mendengarkan cerita-cerita dari para pejuang hak perempuan, teman-teman disabilitas, ragam gender dan seksualitas, lansia dan orang muda, serta masyarakat adat dan etnis minoritas.

Sebagai fasilitator dari kegiatan yang menekankan untuk saling berbagi cerita dan belajar, kami mencoba menghimpun mitra-mitra Voice di Indonesia untuk menuliskan sedikit dari cerita kesuksesan mereka dalam melakukan advokasi masing-masing. Harapannya, tulisan-tulisan ini dapat menunjukkan kepada khalayak luas bahwa di tingkat tapak, dari Labuan Batu hingga Jayapura, ada teman-teman mitra Voice yang telah berkontribusi untuk mendorong masyarakat dan sistem pemerintahan negara kita yang lebih inklusif. Cerita-cerita ini dapat digunakan sebagai sumber inspirasi serta bahan pembelajaran bagi berbagai aktor, tidak hanya pegiat HAM dan NGO, tapi juga institusi pemerintah, akademisi, penyedia layanan, pelaku usaha, serta aktor-aktor pembangunan lainnya.

Mewakili seluruh tim Pamflet Generasi, saya ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh mitra-mitra Voice yang telah bersedia untuk terlibat dalam proses pembuatan tulisan ini dan juga seluruh rangkaian kegiatan Voice Link and Learn. Kami

merasa terhormat telah menjadi fasilitator bagi sebuah komunitas yang begitu dinamis, penuh dengan inovasi dan semangat belajar yang tinggi, serta kreativitas dan rasa kedekatan yang sehat dan saling mendukung. Sebagai sebuah organisasi yang dipimpin orang muda, kami selalu merasa bisa bekerja sama dengan seluruh organisasi maupun individu dalam Indonesia Inklusi secara setara. Kami pun belajar banyak mengenai bagaimana menjadi fasilitator yang adil dan inklusif.

Terima kasih juga kepada Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial dan tim koordinasi Voice Global yang terus mendukung dan mendampingi kami dalam seluruh kegiatan Voice Link and Learn. Kemitraan yang terbentuk dalam pelaksanaan Voice Link and Learn adalah salah satu bentuk kerja yang kami rasa begitu membangun dan membuka pembelajaran yang luas bagi Pamflet sebagai organisasi.

Sebagai penutup, saya mengutip kalimat dari Emma Goldman yang sering diujarkan dalam Indonesia Inklusi: *“If I can’t dance, it’s not my revolution.”* Semoga semangat inklusi dan interseksionalitas yang kita perjuangkan bisa semakin banyak digaungkan oleh perjuangan-perjuangan hak asasi manusia lainnya.

Salam Inklusi,

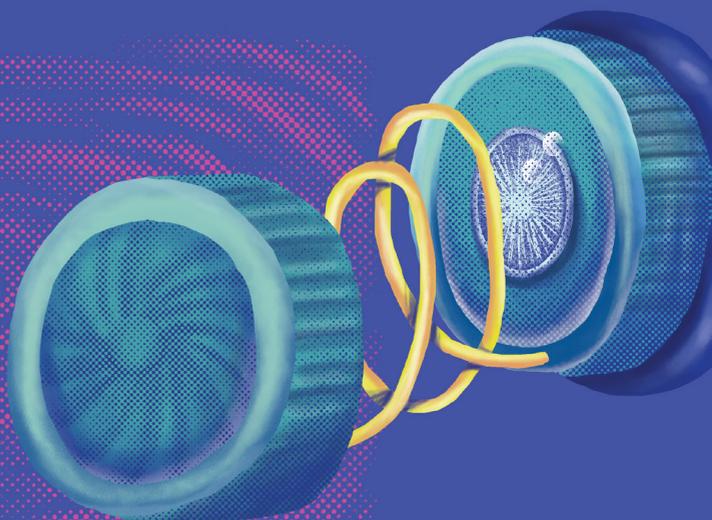
Coory Yohana

*Pamflet Generasi*





Photovoice,  
Ajang Teman Tuli Dapat  
“Berbicara”



# Photovoice, Ajang Teman Tuli Dapat “Berbicara”

Oleh: Namira Fathya

## **Hening Dunia Galih**

Galih Saputro lahir 28 tahun lalu dengan kondisi bisa mendengar. Namun, saat berusia empat bulan, Galih mengalami demam tinggi yang menyebabkan Galih mengalami penurunan kualitas pendengaran. Dokter berkata bahwa kualitas pendengaran Galih hanya 60-70 persen. Artinya, ia hanya bisa mendengar suara yang sangat keras seperti suara sepeda motor yang melaju kencang dalam jarak sangat dekat atau suara benda yang jatuh dengan dentuman keras.

Galih kecil belum paham betul kondisi ini. Yang ia ingat adalah ia masih bermain seperti biasa dengan teman-temannya meski tak mengeluarkan sepatah katapun. Dunianya lebih banyak hening. Saat bermain ia hanya mengikuti apapun yang dilakukan temannya.

Pun saat menginjak sekolah dasar, orangtua Galih memasukkannya ke sekolah umum. Galih mencoba beradaptasi dengan mengikuti apapun yang dilakukan teman sekelasnya. Jika mereka mencatat, ia ikut mencatat. Galih berusaha memahami penjelasan lewat gestur tubuh gurunya.

Jika temannya bermain, ia mencoba berbaur. Namun, karena ia tak mendengar apapun, sering terjadi salah paham dengan teman atau gurunya.

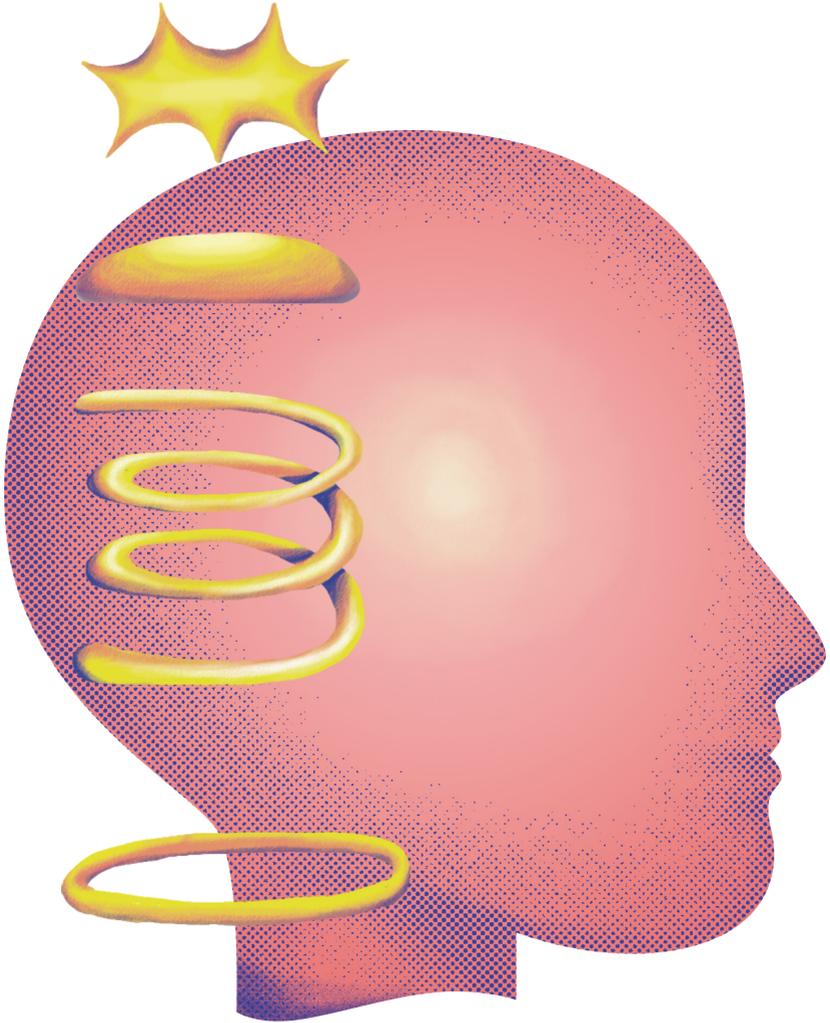
“Sering *miskom* jadinya ya udahlah *ga* usah *ngobrol*,” katanya.

Galih ingat orangtuanya pernah membawanya ke banyak dukun untuk disembuhkan. Ada yang memberi ayam atau air untuk diminum. Namun tak ada perubahan. Hingga akhirnya mereka membawa Galih ke dokter.

Benar saja, dokter mendiagnosa Galih tuli. Dokter menyarankan menggunakan Alat Bantu Dengar (ABD). Sang ayah yang saat itu bekerja sebagai buruh di pabrik pengelasan, beserta sang ibu yang kemudian juga bekerja di sebuah pabrik susu domba bagian pengemasan lantas ingin Galih mendapat akses tumbuh kembang sama seperti anak-anak lainnya. Mereka akhirnya memfasilitasi Galih dengan ABD.

Namun, karena tak pernah mendengar suara apapun sebelumnya, alat bantu tersebut malah mengganggu kenyamanan Galih.

“Terlalu bising. Suaranya terdengar kacau,”



katanya sebelum akhirnya melepas penggunaan ABD.

Ingin Galih tetap mendapat hak pendidikan, orangtuanya kemudian memindahkan Galih ke Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Di sinilah Galih mulai paham bahwa dia tak sendiri. Di SDLB, Galih menemukan teman-teman lain yang punya kondisi serupa dengannya. Di sini pula Galih tau bahwa ada Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) sebagai jembatan komunikasi antara orang Tuli dan orang Dengar.

Di SDLB, Galih bisa belajar lebih baik. Saat kelas dua SD ia mulai memahami konsep hari, tanggal, tahun. Galih senang karena mulai memahami kondisi dirinya dan bisa beradaptasi.

Di rumah, Galih yang juga tinggal bersama neneknya, mulai menggunakan bahasa isyarat atau gestur tubuh. Kadang ia menulis di *handphone* agar lebih jelas. Meski kadang ada juga orang yang menertawakannya karena menganggap itu lucu, Galih tak pernah membalas mereka. Belakangan ia mengerti bahwa mereka juga tak paham budaya orang Tuli. Ia lebih memilih menjelaskan dengan baik pada mereka tentang bahasa isyarat dan budaya orang Tuli. Saat itu pikirannya lebih terbuka. Ia tak lagi merasa kosong seperti awal sekolah SD.

## **Kenal Organisasi Disabilitas**

Pada 2010, lulus SDLB Galih melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB). Saat ini juga Galih mulai bergabung dengan Gerkatin, sebuah organisasi yang fokus pada pemberdayaan orang tuna rungu. Di Gerkatin Galih punya teman berbagi pengalaman, belajar bikin acara, ikut berbagai pendidikan dan bisa memberdayakan ilmunya.

Galih sangat menikmati kegiatannya di Gerkatin dan di sekolah. Meski dapat sekolah dengan baik, Galih penasaran ingin mencoba kembali sekolah umum. Dia mulai mencari tahu sekolah mana yang bisa menerima kondisinya. Galih kemudian memilih SMK N 9 Solo, dengan jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV).

Meski harus bekerja keras mengejar banyak ketertinggalan, karena perbedaan kurikulum sekolah umum dan sekolah luar biasa, Galih akhirnya berhasil lulus dari SMK ini.

Lulus SMK Galih mencoba tes untuk masuk kuliah, tapi gagal. Mengisi waktu, Galih bekerja menerima desain gambar.

Tiga tahun bekerja, Galih mencoba lagi ikut tes kuliah.

Pilihannya lagi-lagi jatuh pada jurusan DKV. Kali ini dengan iuran patungan dengan orangtuanya,



akhirnya pada 2018, Galih berhasil diterima di Akademi Seni Desain Indonesia (ASDI) Solo.

Saat kuliah Galih bekerja keras agar bisa mengikuti materi seperti temannya yang lain. Galih meminta dosen menggunakan *projector*. Jika tak paham materi kuliah, ia tak segan bertanya pada teman atau dosennya. Diantara mereka ada juga yang bisa bahasa isyarat.

Kesulitan muncul saat pandemi 2019 karena perkuliahan harus dilakukan secara *online*. Namun, bukan Galih namanya jika tak punya akal mengatasi situasi ini.

Setiap kuliah Galih meminta bantu temannya mencatat apa yang disampaikan dosennya. Ada masanya Galih memanggil juru bahasa isyarat, terutama menjelang pengumpulan tugas kuliah, dan meminta kampusnya membiayai transportasi sang juru isyarat.

Sementara itu kegiatannya di GerkatIn terus berlanjut. Galih semakin rutin ikut berbagai kegiatan dan rapat, termasuk dengan pemerintah daerah agar memberikan akses yang sama untuk teman Tuli. Galih senang karena dulu teman-teman yang merundungnya karena tidak paham, kini malah bangga dengan kegiatannya.

Pembawaannya yang supel dan ceria ditambah dengan keahliannya dalam desain dan gambar

meningkatkan kepercayaan diri Galih saat bertemu dengan teman-teman lamanya.

“Kamu *kok* sombong? Sibuk sekali ikut rapat-rapat, apa *nggak* capek?” kata mereka.

“Dulu orang pikir aku bodoh karena Tuli, sekarang mereka *care*,”

kata Galih sambil tersenyum.

Dari GerkatIn pula Galih mengenal Konsorsium KREASI yang terdiri GerkatIn, Kota Kita, dan Ruang Atas. Masing-masing organisasi bergerak di bidang berbeda. Kota Kita ahli menyusun metode partisipatif dalam pembangunan kota, GerkatIn berpengalaman sebagai ruang kontribusi dan advokasi teman tuli, serta Ruang Atas memfasilitasi kegiatan kesenian.

Solo sendiri bisa dibilang termasuk kota yang cukup inklusif, meski penggunaan BISINDO di ruang publik masih minim.

Dengan dukungan Voice Global, konsorsium ini kemudian menyusun program Kreativitas dalam Partisipasi untuk Solo Kota Inklusi (KREASI) yang dimulai dengan lokakarya fotografi sebagai ajang



bersuara atau *photovoice* pada Februari hingga Maret 2023, dan dilanjutkan dengan pameran foto.

Melalui foto, kata Galih, teman-teman Tuli dapat mengungkapkan pengalaman mereka secara visual.

“Dengan berlatih bercerita melalui foto, teman-teman jadi belajar untuk menjelaskan pengalaman dan aspirasi mereka dengan lebih percaya diri,”

kata Galih.

Dalam program ini, Galih dan sejumlah teman-teman Tuli lainnya diminta mengabadikan momen berkesan dalam hidup mereka untuk menjawab beberapa pertanyaan: apa yang kamu sukai dan tidak sukai dari ruang publik? Apa harapan dan cita-citamu?

Salah satu peserta, Salsa, bercerita melalui fotonya soal kesulitan membeli makanan atau minuman di tempat umum. Peserta lain, Samuel cerita soal belum ramahnya Batik Solo Trans (BST) untuk pelanggan difabel.

Menarik melihat perspektif teman Tuli terhadap ruang publik. Selain Galih, ada Afrizal yang

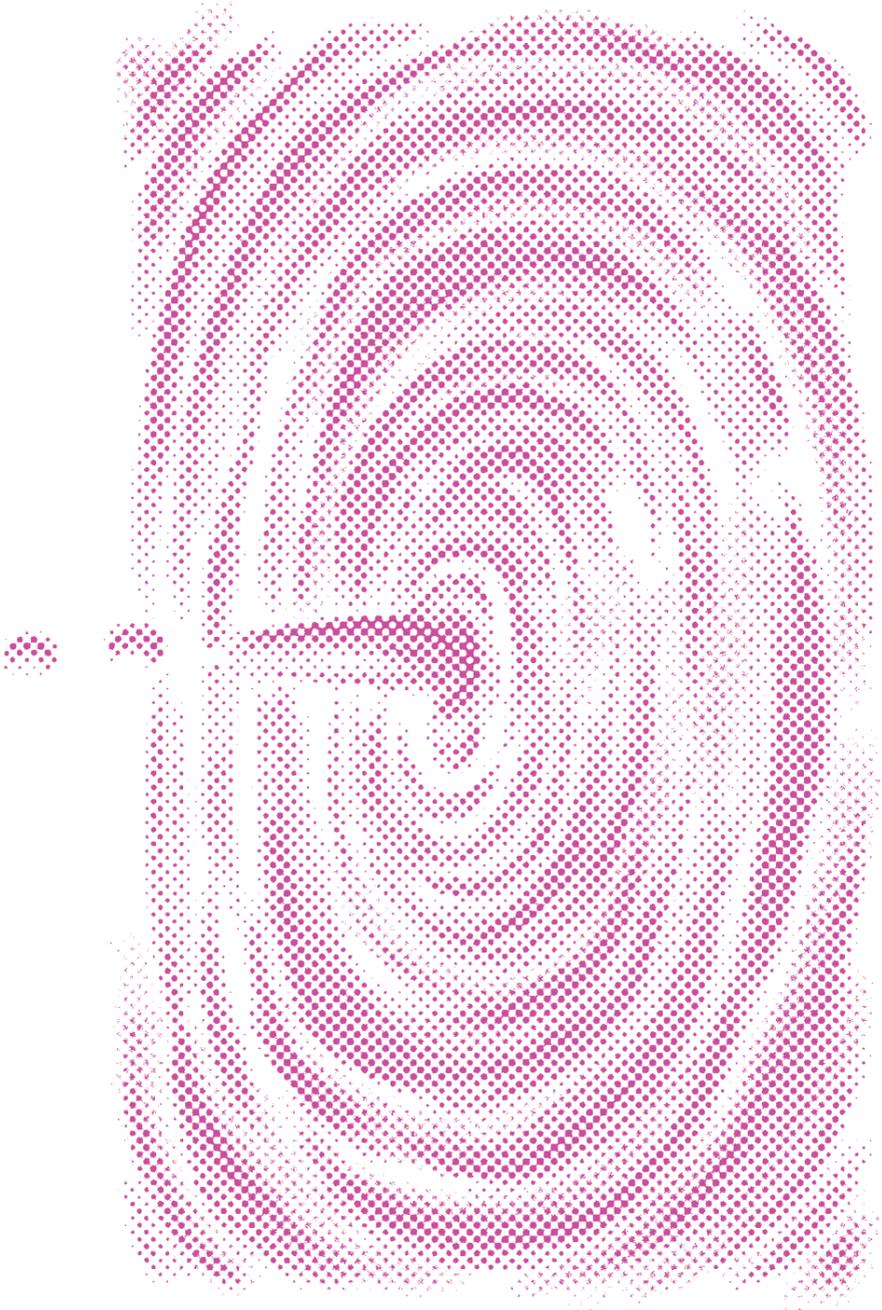
mengambil gambar juru bahasa isyarat yang sedang membantunya di ruang kuliah. Adanya JBI sangat membantu teman Tuli memahami materi kuliah dengan baik.

Ada Esa dan Najwa yang menggambarkan kesulitan mereka berkomunikasi di sekolah karena guru yang berbicara terlalu cepat dan teman-teman yang masih enggan belajar bahasa isyarat sehingga agak menyulitkan mereka dalam berkomunikasi. Mereka berharap guru lebih banyak menggunakan papan tulis agar mereka terbantu memahami informasi melalui teks.

Ada juga Dela yang menggunakan teknologi seperti *web captioener* untuk membantunya merekam perkuliahan.

Foto-foto ini diambil dengan kamera *handphone* dan kemudian dipajang pada pameran di Nalla Coffee Surakarta selama seminggu. Di sini terjadi interaksi antara teman Tuli dengan pengunjung yang ingin bertanya soal karya mereka dan membuka kesempatan untuk kolaborasi antar berbagai komunitas.

Saat pembukaan, beberapa teman tiga organisasi ini datang mendukung. Namun saat penutupan, Galih terkejut senang saat melihat begitu banyak pengunjung datang dan memberikan apresiasi. Respon positif datang dari semua pengunjung termasuk orangtua teman Tuli yang semula



membatasi kegiatan dan mimpi anaknya, kini mulai terbuka dengan potensi dan mimpi-mimpi anak mereka.

“Itu yang kami inginkan,  
apresiasi bukan kasihan,”  
katanya.

Dari pameran ini juga terlihat harapan dan cita-cita teman Tuli. Ada Salsa yang ingin jadi pengusaha batik. Ada Afrizal yang ingin punya bisnis. Sementara itu Najwa ingin menjadi perancang busana dan Esa, yang sudah pernah ikut lomba National Paralympic Committee (NPC) dan Umum ingin menjadi pelatih renang.

Mereka semua berharap bisa hidup mandiri dengan menjalankan minat masing-masing.

Mereka juga berharap Solo menjadi kota yang lebih inklusif dan mereka dapat terus memanfaatkan seni sebagai alat untuk menyampaikan pesan inklusi di ruang publik.

Jayeng misalnya, berharap ada tempat untuk belajar Bahasa Isyarat Arab agar dia lebih mudah mengajar ngaji anak-anak Tuli. Atau Ismail berharap lebih banyak *running text* di ruang umum.

Bagaimana dengan Galih?

“Saya ingin lebih banyak akses untuk pengembangan bahasa isyarat agar teman Tuli dapat berkomunikasi lebih baik dan dapat lebih banyak akses. Kami ini sama dengan teman-teman lain hanya saja cara komunikasinya berbeda. Kami ingin dianggap setara,” katanya.

Galih berharap *photovoice* ini dapat menjadi ajang menangkap kebutuhan dan tantangan teman-teman Tuli. Hasil *photovoice* ini kemudian diolah menjadi mural yang dipajang di tiga titik ruang publik Kota Solo: Jl. Slamet Riyadi, Jl. Gatot Subroto, dan Taman Monumen 45 Banjarsari.

# Menjahit Harapan Perempuan Difabel di Blora



# Menjahit Harapan Perempuan Difabel di Blora

Oleh: Siti Barokhatin Ni'mah

Suatu pagi, saat masih berusia 22 tahun, Wiji sedang *matuni* (menyiangi) tanaman kacang tanah di ladangnya di Tunjungan, Blora, Jawa Tengah. Ia mencabut rumput dan mengambil hewan-hewan yang berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman. Wiji memang senang bercocok tanam. Tiba-tiba saat pulang ke rumah, ia merasakan nyeri yang luar biasa pada tengkuk kirinya.

Menjelang siang, karena nyeri yang tak kunjung reda, seorang tetangga datang dan membantunya kerokan. Bukannya merasa lebih baik, kurang dari satu jam setelah kerokan, tiba-tiba kaki kirinya tak bisa bergerak. Tak lama menyusul kaki kanan.

**“Kok bisa ya, pagi masih ke ladang tahu-tahu pulangnye gak bisa jalan dan lumpuh?”**

kata tetangganya heran.

Keluarganya kemudian membawa Wiji ke rumah sakit. Ia masih ingat betul, Dokter Setyoko bilang, telah terjadi kerusakan pada sumsum tulang ekor dan tidak bisa sembuh total. Menurut dokter ini disebabkan benturan keras.

Bak disambar petir. Wiji kaget setengah mati. Ia

mencoba mengingat-ingat. Rasanya ia sebelumnya tidak pernah terjatuh atau terbentur benda keras. Namun setelah mengingat lagi, benar juga, dulu ia memang pernah terjatuh dan tulang ekornya tertimpa satu sak rumput. Ia bahkan hampir melupakan itu.

Wiji dan keluarganya merenung, masih bertanya-tanya dan tidak percaya. Mereka membawa Wiji ke ‘orang pintar’. Mereka bilang ini kesalahan leluhur yang kini ditanggung oleh Wiji. Ada juga yang bilang Wiji diganggu makhluk halus karena melewati tempat yang ada “penunggu”-nya tanpa permisi.

Tak mau ambil pusing, Wiji bersemangat untuk pulih. Tiga bulan setelah pulang dari rumah sakit Wiji melatih diri agar bisa duduk tanpa penopang. Tak lama kemudian ia bisa berdiri dan berjalan menggunakan tongkat. Wiji mulai bangkit. Sayangnya pada saat bersamaan suaminya justru meninggalkannya.

“Perasaan *down* itu ada, tapi saya sadar bahwa ada anak yang harus diperjuangkan, jadi saya harus bisa mandiri dan memiliki penghasilan sendiri,” kata Wiji.

Tak mau berlarut dalam kesedihan, setelah ditinggal suami, Wiji yang kini tunadaksa mencoba berjualan makanan ringan di rumah. Mulai dari kerupuk sambel sampai dengan permen gulali. Gulali dijual dengan sistem barter dengan jagung. Jagung hasil barter dikumpulkan lalu dijual.

Namun ini tak cukup. Untung dulu saat gadis ia pernah kursus menjahit. Maka sejak 2004 dengan modal Rp300 ribu pemberian pemerintah setempat, Wiji membeli mesin jahit bekas. Mula-mula ia menerima jasa permak pakaian. Belakangan ia mulai menerima pesanan jahitan baju.

“Maka dari itu, saya ingin sekali orang-orang yang memiliki kekurangan seperti saya, tidak *stuck* di tempat. Apalagi yang punya anak. Kalau diri sendiri tidak semangat bagaimana anak-anak? Mereka butuh dukungan kita,” kata Wiji.

## **Dukungan Difabel Blora Mustika**

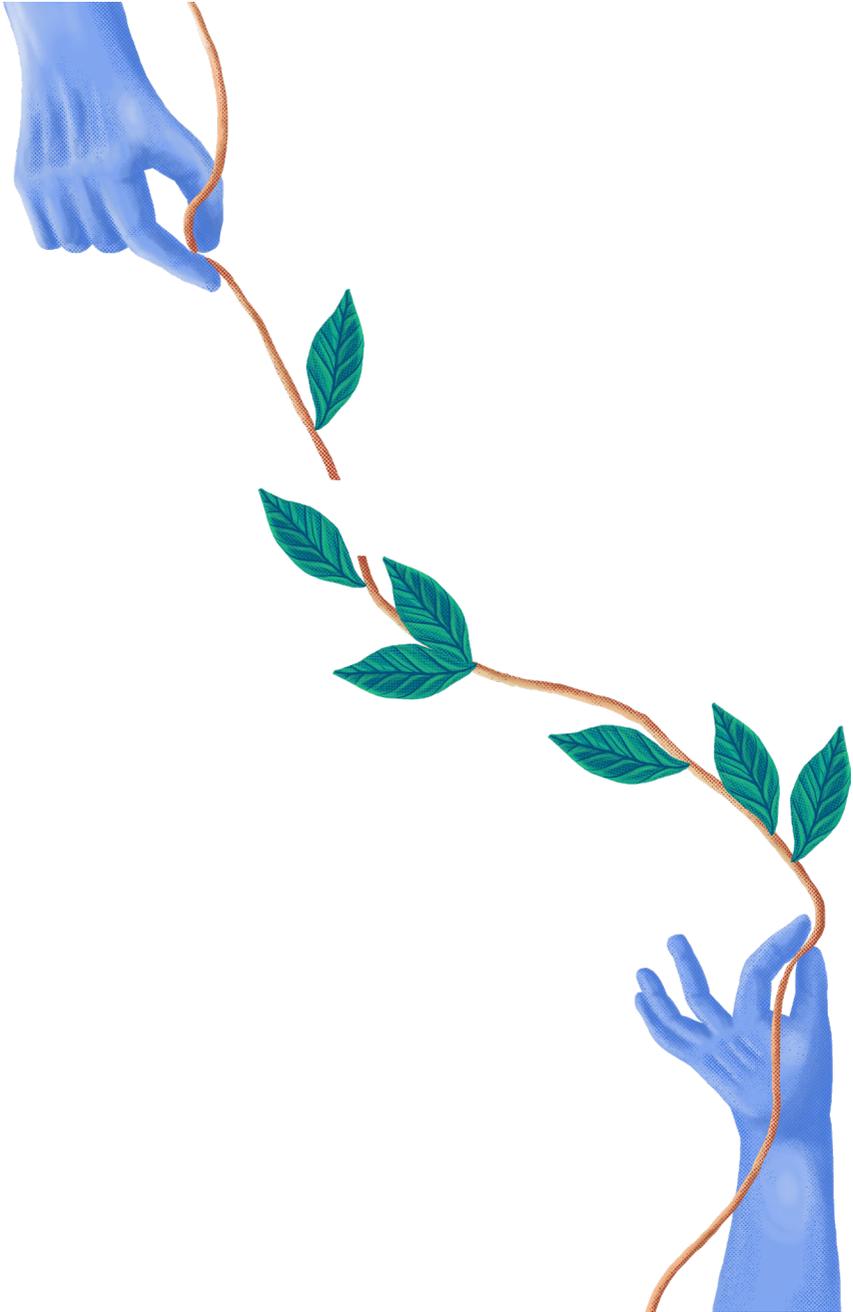
Bak gayung bersambut, Wiji kemudian bertemu dengan Difabel Blora Mustika (DBM), sebuah organisasi yang berjuang untuk pemberdayaan perempuan disabilitas dan Orang yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Saat itu, DBM melalui program yang didukung oleh Voice Global hendak membentuk Perkumpulan Perempuan Difabel (PERDIFA) di enam kecamatan; Jepon, Kunduran, Banjarejo, Ngawen, Tunjungan, dan Bogorejo.

Sejak pendataan Wiji terlihat sangat bersemangat dan menonjol. Ia membantu mengenalkan tim pendata dengan perempuan difabel lain yang ada di sekitar rumahnya.

“Saya terketuk, melihat beliau-beliau ini sehari-hari hanya diam di rumah tanpa mengerjakan sesuatu. Selain itu saya juga melihat diri saya sebelum memiliki pekerjaan,” ucap Wiji.

Mula-mula DBM mendata kepada 70 perempuan disabilitas di masing-masing kecamatan dan



memilah mana saja yang bisa diajak berkegiatan. Dari 70 orang, 13 diantaranya bisa diajak berkegiatan dan bersedia untuk mengikuti program pemberdayaan termasuk Wiji. Sebagian yang lain masih mengalami stigma dan tidak mendapat izin keluarga.

Perempuan difabel masih sering dianggap aib keluarga. Bahkan ada yang tidak dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga karena malu.

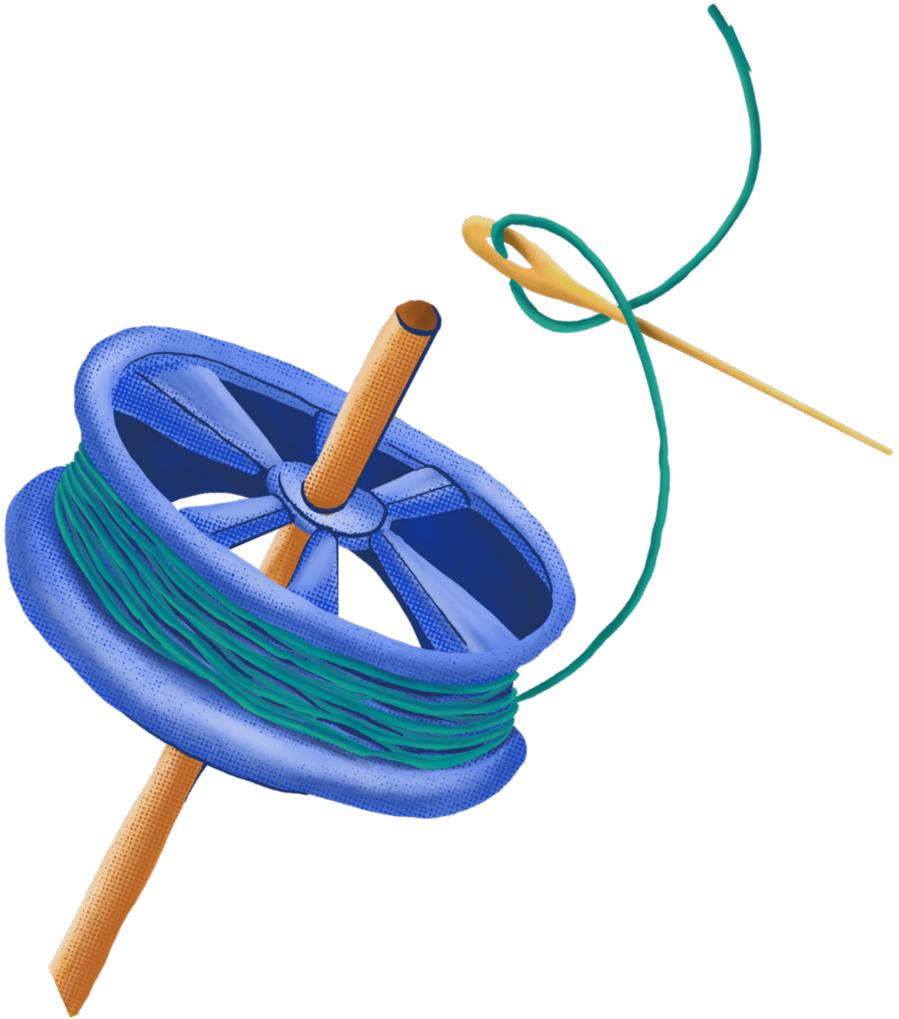
Wiji berusaha menularkan semangatnya ke perempuan difabel lainnya. Ia menawarkan sisa kain jahitannya untuk diolah menjadi produk lain. Wiji membagi-bagi tugas sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap anggota. Mereka dengan disabilitas daksa, membantu memotong bahan dan menjahit bagian yang sederhana. Difabel tuna netra mengukur dan mengelompokkan kain yang berukuran sama. Sedangkan mereka dengan disabilitas mental membantu sesuai dengan kemampuan masing-masing.

“Saya ingin melatih teman-teman yang lainnya agar bisa mengerjakan sesuatu yang bisa menghasilkan uang agar setidaknya bisa menghidupi dirinya sendiri,” harap Wiji.

Kegiatan PERDIFA Tunjungan salah satunya adalah pertemuan rutin setiap hari Sabtu. Pertemuan rutin yang diikuti enam sampai sepuluh anggota ini diisi dengan kegiatan arisan atau berlatih membuat produk, tergantung kemauan bersama. Sebagian besar anggota sebelum mengikuti kegiatan hanya diam di rumah, cenderung minder, dan belum memiliki keterampilan. Setelah bergabung dengan PERDIFA, mereka mulai belajar. Saat punya satu keahlian stigma pun berkurang. Mereka mulai berani tampil dan berbicara di depan publik. Di sisi lain mereka memiliki kemampuan membuat produk dan bisa dijual.

“Jika ada yang non-disabilitas mau belajar silahkan. Di sini kita bikin tas laptop, tas selempang, ikat rambut, keset, dan bros. Sekarang yang bisa jahit lurus-lurus sudah bisa jahit sprei, sarung bantal dan guling. Sudah ada dua pedagang yang mau mengambil barang kita,”

ujarnya senang.



Ke depan, Wiji ingin perempuan penyandang disabilitas lain yang sedang belajar mampu mengerjakan produk di rumah sendiri dan bisa menjual sendiri produknya. Jadi, mereka bisa produktif meskipun dari rumah.

Wiji juga berharap lebih banyak perempuan bisa terlibat dalam PERDIFA. Ia berharap ada program pemberdayaan lain seperti bordir, merajut atau menyulam agar mereka bisa menghasilkan produk yang lebih beragam.

Cerita serupa juga terjadi di lima kecamatan lainnya. Mereka sepakat mendorong kemandirian ekonomi bagi perempuan disabilitas dan OYPMK, menyesuaikan dengan kemampuan dan potensi alam sekitar. Di Jepon, misalnya, PERDIFA fokus menginisiasi usaha kerajinan anyaman bambu. Di Kunduran mereka mendirikan usaha jamur tiram. Di Banjarejo ada olahan makanan ringan. Di Ngawen mereka membuka usaha sirup jahe emprit, dan di Bogorejo mendirikan usaha minuman instan.

### **Kerajinan Bambu Dari Jepon**

Ngatmi, seorang perempuan penyandang disabilitas daksa, memulai usaha bersama anggota PERDIFA Jepon yang lain. Beliau adalah sosok yang menggawangi dan menyatukan perempuan-perempuan disabilitas dalam hal menjalankan

usaha. Saat ini, memproduksi bersama kerajinan anyaman bambu menjadi kesibukan sehari-hari mereka.

Terdapat sekitar sepuluh perempuan disabilitas yang aktif dalam menjalankan usaha membuat anyaman bambu seperti bakul, anting, *dunak*, wadah buah, dan lainnya. Juga saat ini, PERDIFA Jepon sedang berusaha merambah usaha di bidang serbuk mengkudu dan teh mengkudu. Ide usaha ini tentu tidak lepas dari potensi bakat dan sumber daya alam yang ada di sekitar. Namun, yang masih menjadi momok bagi usaha ini yaitu mengenai pemasaran.

Menanggapi hal tersebut, tim pendamping mengenalkan efisiensi pemasaran via *online* melalui pelatihan. Sebagai hasilnya, pemasaran yang sebelumnya hanya dijual melalui tengkulak, saat ini produk PERDIFA Jepon sudah dipasarkan secara *online* dengan memanfaatkan berbagai *platform* media sosial maupun *marketplace* yang ada.

Salah satu yang tim pendamping lakukan dalam pendampingan ini yaitu dengan mengadakan kegiatan pelatihan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan apa yang sedang dikerjakan dengan pemahaman dan ilmu yang dimiliki. Dengan cara menghadirkan narasumber yang ahli di bidang masing-masing, dalam rangka menunjang organisasi dan usaha yang dijalankan.

Diawali dengan pelatihan manajemen organisasi, kemudian dengan pelatihan *entrepreneurship*, pelatihan *marketing*, dan pelatihan pembukaan toko *online*.

Pertama, pelatihan manajemen organisasi yang dilaksanakan Desember 2021 lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali kelompok dampingan dengan kemampuan teknis agar mampu menjalankan organisasi dan mampu melakukan advokasi berbasis hak secara mandiri kepada Pemerintahan Desa maupun Pemerintah Daerah.

Januari 2022, diadakan pelatihan *entrepreneurship* alias kewirausahaan, yang bertujuan agar kelompok dampingan mempunyai jiwa wirausaha dan mampu melakukan usaha secara mandiri. Selanjutnya pelatihan *marketing* pada bulan April, yaitu bagaimana agar perempuan disabilitas mengetahui cara membuat produk, mengemas produk, dan menjual produk baik secara *online* maupun *offline*. Terakhir dengan pelatihan pembukaan toko *online* pada bulan Mei, yakni kelompok dampingan diajari untuk foto produk, *upload* barang, dan menyusun *caption* yang menarik di berbagai *platform* media sosial dan *marketplace* yang ada.

Ngatmi sendiri sebagai salah satu anggota yang berhasil menjual via *online* mengatakan bahwa produknya sudah sampai keluar kota, yakni Semarang, Cilacap, dan Rembang. Hal ini tentu

sangat mendukung usaha PERDIFA Jepon dari yang sebelumnya produknya hanya dijual melalui tengkulak, hingga kini mereka sudah mampu memperluas pasar dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

PERDIFA Jepon yang notabene adalah organisasi perempuan difabel, saat ini sudah membuka peluang untuk bergabungnya anggota non-difabel ataupun dari kaum laki-laki. Hal ini salah satunya bertujuan untuk menjadi lebih terbuka dengan peluang sumber daya manusia yang lain.

Dengan kemampuan mereka saat ini, baik di bidang organisasi maupun usaha, tentu sangat bermanfaat dalam menunjang keadaan ekonomi para perempuan penyandang disabilitas lain. Sebelumnya mereka belum mandiri secara ekonomi dan tidak percaya diri karena kekurangan yang dimiliki maupun karena stereotip negatif masyarakat yang belum berubah. Stereotip yang selama ini terbangun adalah bahwa difabel di antaranya merupakan aib, dosa keturunan, tiada daya, bahkan hingga penyakit menular, sehingga kaum difabel tidak pantas mendapatkan haknya sebagai manusia. Perlahan-lahan masyarakat sudah mulai mengikis anggapan-anggapan tersebut.

Saat ini, perlahan mereka mulai turut beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, tidak sedikit warga non-disabilitas yang dalam



menjalankan usaha dengan belum memanfaatkan teknologi yang ada. Namun, PERDIFA Jepon dalam pemasaran sudah memanfaatkan teknologi tersebut. Hal ini tentu memberi kebanggaan tersendiri bagi pribadi perempuan penyandang disabilitas.

Harapannya, *output* dari misi ekonomi inklusif ini, selain menunjang kesejahteraan kelompok dampingan, adalah juga pada semakin meningkatnya nilai diri yang dimiliki para perempuan difabel. Dan yang terutama adalah pada semakin berkurangnya stereotip negatif masyarakat mengenai disabilitas, untuk dapat betul-betul lenyap di kemudian hari.

# Suara Grina, Pembawa Warta Adat Namblong



# Suara Grina, Pembawa Warta Adat Namblong

Oleh: Lilik HS

Saat duduk di bangku sekolah dan membaca surat kabar, sempat terlintas dalam benak Sopia Bano (55) untuk menjadi jurnalis. Ada kebanggaan tersendiri ketika tulisannya dibaca masyarakat luas.

“Dulu *kaka* berpikir, kapan bisa bisa menjadi jurnalis? Orang lain bisa seperti begitu, kenapa *kaka* tidak bisa?” tuturnya.

Sopia tidak pernah menyangka, berpuluh tahun kemudian, impiannya dapat terwujud. Tulisannya kini banyak dibaca orang lewat Suara Grina, platform jurnalisme warga yang didirikan oleh Dewan Adat Suku dan Organisasi Perempuan Adat Namblong yang berupaya merawat komunitas jurnalis dari kalangan anak-anak muda suku Namblong di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Kini, aneka kekayaan baik keanekaragaman hayati maupun budaya di kampungnya didokumentasikan dan disiarkan ke luar daerah. Kampung Benyom dan adat Namblong juga makin dikenal orang.

Sopia lahir di Kampung Benyom, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura. Kampung

Benyom sekiranya berjarak 80 kilometer dari Kota Abepura, alias tiga jam perjalanan mengendarai motor dengan menempuhi jalanan berkelok dan memutar Danau Sentani.

Lembah Grime Nawa merupakan dataran rendah dan perbukitan di bagian selatan dan tengah Kabupaten Jayapura. Grime mengalir turun melalui wilayah adat Kentuk, Klesi, dan Namblong, sedangkan Nawa menembus wilayah adat Kaureh dan Kautabakhu, menjadikan perbukitan dan lembah di sekitarnya menjadi hutan rimba dan hutan hujan tropis.

Masyarakat menyandarkan hidupnya dari hutan. Ada tujuh suku berdiam di lembah yang terletak di Kabupaten Jayapura, Papua ini. Ada Suku Kentuk, Gresi, Namblong, Uria, Elseng, Aotaba, dan Tecuari. Mereka tinggal dan berpencar di lembah yang mengalir dua sungai besar, Grime dan Nawa di Distrik Yapsi, dan Unurumguay.

Masyarakat Lembah Grime Nawa hidup bergantung dari hasil kebun, berburu di hutan dan menangkap ikan. Hasil panen selain dikonsumsi keluarga, juga dijual ke Pasar Genyem, Hamadi, atau Pasar Pharaa di Sentani. Hutan dan lembah Grime Nawa menyimpan kekayaan keragaman hayati flora dan fauna. Aneka anggrek, rotan, gaharu, juga ragam tanaman obat. Lembah ini juga menjadi rumah bagi burung cendrawasih.

Sopia menulis keseharian yang ia saksikan di Kampung Benyom. Ia menulis tentang tanaman obat yang banyak tumbuh di Lembah Grime Nawa, salah satunya adalah waisino. Berbentuk tinggi ramping dengan dahan menjulur panjang dipenuhi daun yang selebar ukuran tangan orang dewasa. Di musim bunga, kuncup-kuncup bunga berwarna kuning cerah akan menyeruak di antara hijau dedaunan. Pohon waisano banyak tumbuh di pekarangan rumah masyarakat Namblong.

“Orang-orang di wilayah Namblong memanfaatkan tanaman waisino untuk mengobati penyakit kulit, misalnya panu dan kaskado. Cara menggunakannya sangat sederhana. Pertama, ambil satu genggam daun waisino, cuci bersih. Daun waisino tersebut bisa ditumbuk atau dikecek-kecek menggunakan tangan hingga lumat. Oleskan tumbukan daun waisino ke permukaan

kulit yang mengalami gatal, lalu diamankan beberapa saat. Penggunaannya tidak cukup sekali atau dua kali, tapi harus berulang dan rutin,”

tulis Sophia, dalam salah satu laporannya, yang dimuat di website Suara Grina dan disebarikan melalui platform Facebook dan Instagram.

Sophia sadar bahwa kini Lembah Grime Nawa kini mulai terkepung investasi. Masyarakat Adat Papua di Lembah Grime Nawa, seperti halnya masyarakat penduduk asli Papua lainnya termarginalisasi akibat kekerasan negara dan program pembangunan yang tidak mengutamakan kesejahteraan masyarakat ada. Maraknya industri ekstraktif khususnya perkebunan kelapa sawit saat ini membuat keanekaragaman hayati terancam. Ancaman terhadap ekosistem Grime juga berdampak luas pada masyarakat adat, khususnya perempuan dan pemuda adat kelompok etnis Namblong.

“Sebagai masyarakat adat, kami prihatin dengan permasalahan ini. Suara Grina sebagai media

## komunitas untuk mengangkat isu-isu tersebut kami anggap penting bagi komunitas kami,”

ujar Sopia. Ia juga menyadari, keterbatasan akses jurnalis media arus utama belum dapat menjangkau wilayah Lembah Grime Nawa. Oleh sebab itu hadirnya jurnalis warga menjadi penting.

Melalui foto, video, dan tulisan di media sosial Suara Grina mereka menyuarakan berbagai isu, termasuk budaya dan seni Namblong. Dari cerita daun waisino ia hendak menggambarkan bahwa keanekaragaman hayati di Lembah Grime Nawa merupakan aset untuk kehidupan masyarakat adat. Alam bukan hanya menyediakan sumber pangan, tapi juga tanaman-tanaman yang berkhasiat untuk pengobatan.

Para jurnalis warga Suara Grina gigih meliput dan membagikan kisah-kisah dari pelosok wilayah Lembah Grime Nawa karena mereka ingin mengangkat cerita-cerita dari kampung mereka

### **Menjadi Penyuar Adat Namblong**

Suara Grime Nawa, kemudian disebut Suara Grina, adalah platform jurnalisme warga di Lembah Grime Nawa. Nama Suara Grina berasal dari dua lembah besar di sekitarnya yakni Grime dan Nawa.

Suara Grina berdiri pada 2019, diinisiasi oleh Dewan Adat Suku (DAS) Namblong dan Organisasi Perempuan Adat (ORPA) Namblong. Komunitas ini bermula dari sebuah pelatihan yang dilakukan oleh para jurnalis dari Jayapura yang diikuti oleh 15 orang muda. Lewat tulisan dan audiovisual mereka mendokumentasikan kebudayaan-kebudayaan dari suku yang mendiami Lembah Grime dan Nawa.

ORPA sendiri berdiri pada tahun 2015, dan sejak 2019 Sopia menjadi salah satu pengurus membawahi Bidang Sosial dan Budaya. ORPA fokus pada inisiatif yang memberdayakan perempuan dan anak perempuan pada khususnya.

“Kami bertekad menyuarakan gagasan dari warga, menyiarkan berita dan peristiwa yang terjadi di wilayah Grime Nawa, serta mendokumentasikan kehidupan suku adat Namblong, Kemtuk, dan Gresi sebagai bentuk melestarikan kekayaan budaya yang dapat berupa cerita rakyat, tarian, musik, bahasa asli,

pakaian, ukiran, dan lainnya,”

ujar Sopia.

Suara Grina mendorong dan menguatkan keterlibatan orang muda dalam tiap kegiatan.

“Kami percaya orang muda adat punya hak yang sama untuk bersuara, berpendapat, dan mengambil keputusan bijak terkait dirinya, komunitas adat, serta tanah adat,” tambahnya.

Vebbry Hembring (23) adalah koordinator Suara Grina. Ia adalah bagian dari anak muda dari suku Namblong, berasal dari Desa Imeno, Kecamatan Nimboran. Sehari-hari ia bekerja di sebuah ekowisata burung cendrawasih di Kampung Repang Muaip, Distrik Nimbokrang.

Ia bergabung dengan Suara Grina pada tahun 2019, usai lulus dari kursus bahasa Inggris selama setahun di Sentani. Pulang ke kampung, mamanya, yang merupakan anggota dari ORPA menginformasikan adanya kegiatan pelatihan menulis.

Vebbry suka menulis, kendati hanya di buku harian.

“Saya biasanya kemana-mana bawa buku catatan. Tapi struktur menulis belum tahu. Baru tahu setelah jadi anggota,” ucapnya.

Pada tahun 2022 ia terpilih menjadi koordinator jurnalis warga Suara Grina.

### **Menulis di Buku dan Telepon Genggam**

Pada Oktober 2022 Komunitas Suara Grina mendapat kesempatan untuk mengakses dana hibah dari Voice Global. Mengelola sebuah program yang cukup besar merupakan pengalaman pertama bagi Suara Grina. Sebagai pengurus ORPA, Sopia direkomendasikan untuk mengawal proses pengelolaan program. Seiring berjalannya waktu, ia juga terlibat sebagai jurnalis warga.

Kegiatan utama Suara Grina adalah para jurnalis warga memproduksi setidaknya satu tulisan setiap bulannya dan satu audiovisual atau film dokumenter pendek. Mereka juga menyelenggarakan kegiatan bulanan. Bersama ORPA Namblong dan DAS Namblong, Suara

Grina menyelenggarakan kegiatan bulanan seperti workshop menulis serta membuat film pendek, juga workshop kesenian tentang tari asli Namblong atau membuat noken, sesuai usulan dari anggota. Mayoritas partisipan yang terlibat adalah anak-anak dan orang muda. Kegiatan pemutaran film berupaya membawa film-film dokumenter bertopik masyarakat adat, hutan adat, dan lingkungan hidup dalam diskusi masyarakat di kampung.

Stephani Woro Narriswari merupakan salah satu yang membantu editorial tulisan para jurnalis warga Suara Grina. Baru satu tahun Narris, panggilan karibnya, bergabung. Berasal dari Yogyakarta, ia mengenal Suara Grina dari sesama teman jurnalisnya, Asrida Elisabeth. Ia tertarik untuk membantu Suara Grina karena minatnya untuk bekerja bersama orang-orang muda.

**“Ditambah Suara Grina fokusnya menulis dan dokumentasi kebudayaan,”** imbuhnya.

Ia menyebut, kendati komunitas jurnalis warga Suara Grina telah eksis beberapa tahun sebelumnya, bukan perkara mudah ketika awal mengelola program ini. Pertama yang dilakukan adalah memperkuat komunitas jurnalis warga dengan serangkaian kegiatan pelatihan jurnalistik,

yang meliputi pelatihan menulis, membuat foto dan video.

“Selain kendala menulis, teman-teman juga rata-rata tidak familiar dengan teknologi. Bagaimana mengoperasikan laptop dan memakai kamera,”

Ia menyebut pada akhirnya tekun berpraktik kemudian menjadi kunci. Nyaris semua jurnalis warga juga masih belum piawai menulis dengan kaidah jurnalistik. Selain itu, mereka tak ada yang memiliki perangkat seperti laptop, sehingga, mereka lebih banyak menulis di buku tulis dan menggunakan telepon genggam.

“Mereka kebanyakan menuliskan ide-ide mereka di sebuah buku, menuliskan outlinenya, kemudian mengonsultasikan dengan koordinator atau editor untuk mendapatkan masukan-masukan. Ada juga yang menelepon secara

langsung. Setelah mendapatkan persetujuan, maka liputan akan dilanjutkan,” ujar Narris.

Para jurnalis warga didorong untuk menuliskan apa saja, tentang kejadian yang terjadi di sekitar mereka, adat istiadat, tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitarnya, termasuk khasiat tanaman yang kini banyak dilupakan.

Jarak antar kampung masing-masing anggota di Lembah Grime Nawa juga berjauhan. Sementara itu transportasi terbatas. Hal itu menyulitkan mereka untuk mengadakan pertemuan tatap muka. Untuk itu mereka menjadikan forum daring untuk berkoordinasi. Grup Messenger Facebook dipilih menjadi wadah lantaran jaringannya lebih mudah diakses oleh semua anggota. Di forum inilah para anggota berdiskusi, memberi usulan liputan, saling menanggapi dan memberi dukungan. Lantaran belum memiliki sekretariat, jika melakukan pertemuan tatap muka, mereka sering berpindah dari rumah ke rumah.

“Yang penting setiap hari mereka terhubung di grup Messenger Facebook. Komunikasi di

Messenger ini cukup efektif,”  
ujar Narris.

“Misal di kampung ada cerita yang bisa ditulis, kami menyampaikan di grup Facebook Messenger. Atau menuliskan di buku tulis. Kalau editor sedang sama-sama dengan kami, maka tulisan di buku itu disampaikan ke Kak Narris. Kalau Kak Narris sedang di Jayapura, maka teman-teman akan menulis di HP. Kadang-kadang juga ada kendala sinyal. Jaringan suka hilang,”

tambah Vebbry.

Setelah melalui proses penyuntingan, tulisan kemudian diunggah ke Facebook, Instagram dan website. Vebbry menyebutkan, jika tulisan diunggah ke Facebook dan Instagram, sasarannya adalah pada warga di Lembah Grime Nawa karena mereka juga mengakses keduanya. Tulisan di

website selain sebagai dokumentasi juga untuk diinformasikan kepada pihak luar. Sementara itu, untuk masyarakat sekitar mereka juga memproduksi sejumlah film dokumenter pendek, berdurasi maksimal lima menit.

**“Kami produksi audio visual, cerita masyarakat adat, budaya, dan kami lakukan pemutaran di tiap kampung. Agar mereka tahu akan jurnalis warga,”** imbuhnya.

Bagi Tresya Imelda Yoshua (21), bergabung dengan Suara Grina membuka matanya terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat suku Namblong di daerahnya. Ia menyebutkan bahwa dulunya ia tak tahu banyak persoalan tersebut,

**“Saya jadi tahu setelah bergabung dengan Suara Grina dan mengikuti beberapa kegiatan,”**

kata Imelda, orang muda adat dari suku Namblong.

Imelda bergabung dengan Suara Grina pada Januari 2023. Ia menyebutkan, ia biasa menulis ide-idenya di sebuah buku atau telepon genggam, baru kemudian diserahkan kepada editor.

“Di Suara Grina hanya memiliki satu laptop. Jadi saya menulisnya di buku atau HP. Untuk diskusi juga biasanya di Facebook,” ujarnya.

Aneka tema ditulis oleh para jurnalis warga Suara Grina. Umumnya tentang keseharian di adat Namblong. Salah satu tulisan Imelda adalah tentang kakao di desa Berap, tanaman yang banyak tumbuh di Lembah Grime. Kebetulan ayahnya, Yafeth Yoshua, adalah petani kakao. Ia menjadikan sang ayah sebagai narasumber.

Ada tulisan jurnalis warga tentang daun sagu yang lazim dipergunakan sebagai atap rumah warga Namblong. Atap daun sagu merupakan salah satu produk kebudayaan yang ada di Tanah Papua. Sopia masih ingat, dulu, orangtuanya di kampung Benyom, menggunakan daun sagu sebagai atap rumah. Dengan memanfaatkan daun dari pohon sagu yang banyak tumbuh di sekitar kampung.

Kini anggota Suara Grina ada 15 orang. Namun demikian, keaktifan anggota memang naik turun. Hingga kini, ada delapan yang aktif dan semuanya adalah perempuan. Sebagian mereka berusia di bawah 25 tahun dan datang dari beragam latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga, petani, mahasiswa atau bekerja di swasta. Vebbry

menyebut bahwa sesama perempuan lebih mudah berkomunikasi.

“Kalau laki-lakinya sulit bertemu karena banyak yang kerja bangunan atau proyek di kampung,” ujarnya.

Berbagai kegiatan digelar oleh Komunitas Suara Grina setiap bulan mulai dari liputan, produksi audiovisual, workshop komunitas, dan sekolah bahasa Namblong. Mereka juga mengadakan pemutaran film sebagai medium untuk memperkenalkan Suara Grina dan membincang isu-isu yang terjadi di sekitar, mulai dari kebudayaan, lingkungan hidup, hutan, dan kekerasan.

Pada Februari 2023, Suara Grina menggelar pelatihan kedua. Materinya adalah cara menulis dan meliput di lapangan, juga tentang manajemen komunitas dan pengelolaan media online. Hadir sebagai narasumber adalah jurnalis warga Noken Wene, Wamena dan Bale Bengong, Bali serta dari Greenpeace Indonesia.

Imelda ikut dalam pelatihan tersebut. Semula ia tak tahu seluk-beluk jurnalis warga. Tapi ia punya minat dunia tulis menulis. Ia juga kerap

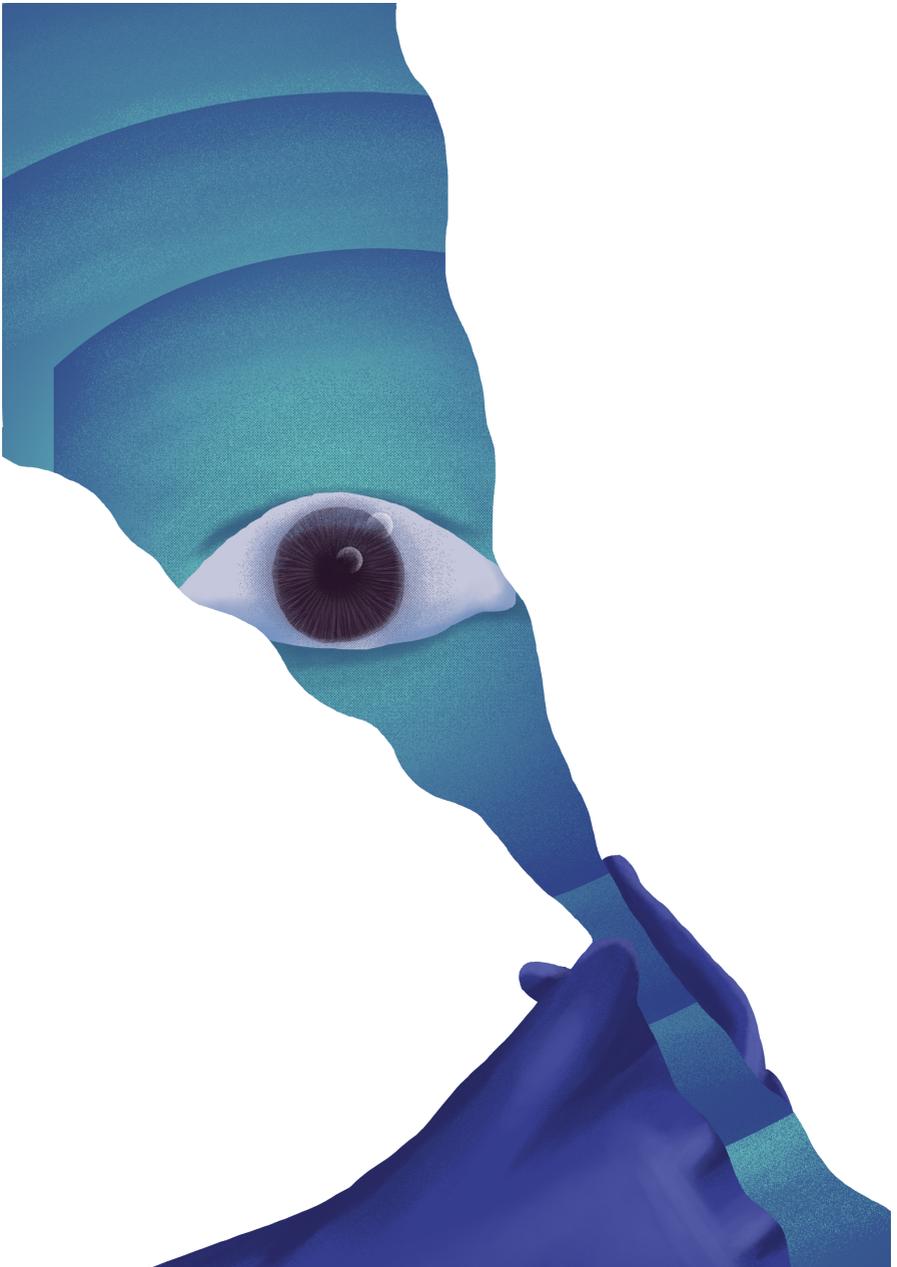
menggubah lagu-lagu gereja ke dalam bahasa Namblong. Karena itu, begitu kerabatnya, Vebbry Hembraing mengabari bahwa akan ada pelatihan jurnalis warga, dia segera bergabung.

**“Saya jadi tertarik untuk menulis tentang Namblong,”** ujarnya.

Imelda lulus dari SMA Negeri Nimboran, Jayapura. Ia anak ketiga dari enam bersaudara. Lantaran menulis tentang tanaman kakao yang banyak tumbuh di daerahnya, barulah ia tahu bahwa biji kakao yang ditanam ayahnya berasal dari Belanda. Pada masa perang dunia kedua, orang-orang Belanda datang ke tanah Papua dengan membawa beberapa jenis tanaman dan salah satunya adalah kakao. Biji kakao dari petani di kampung Berap biasa dijual kepada PT. Kakao Kita Papua untuk diolah menjadi produk makanan.

Dalam liputannya, ia juga melengkapi dengan foto-foto yang menawan. Ia bilang, belajar dari Suara Grina untuk dapat memotret dan mengedit foto dengan baik.

Sopia mengakui bahwa dukungan dari Voice telah menopang keberadaan Komunitas Suara Grina. Selain, aktivitas menjadi lebih intens, mereka dapat membeli peralatan berupa sebuah kamera DSLR dan dua buah laptop yang dipergunakan



bersama-sama. Beragam aktivitas juga semakin menguatkan solidaritas anggota.

“Program ini semakin memperkuat jurnalis warga Suara Grina. Jika dulu sudah ada, kini semakin aktif. Anggota makin banyak. Kualitas tulisan dan foto juga semakin baik,” ujar Sophia.

Aneka tantangan tentu ada. Vebbry menyebut kesibukan masing-masing anggota menjadi salah satu tantangan. Selain, lokasi berjauhan yang membuat mereka jarang bisa bertemu.

“Kendaraan umum tidak ada. Jika mau liputan ke luar desa, kami sewa mobil. 5-6 orang anggota berkumpul, biasanya di Sekolah Budaya milik organisasi perempuan adat, yang ada di rumah Kak Sophia, atau di rumah saya di Benyom Kota. Kami pergi

mulai pagi sampai sore,” tambahnya.

Penggunaan teknologi juga merupakan tantangan. Sebagian besar anggota masih belum mahir mengoperasikan laptop dan kamera.

“Rata-rata belum bisa menggunakan Google Drive dan Excel. Juga kamera. Sebelum program, malah tidak bisa pakai sama sekali. Tidak ada laptop. Kini sudah lumayan bisa, meski masih sedikit. Karena kami jarang bertemu, belum punya sekretariat, jadi kesempatan untuk belajar mengoperasikan sedikit,” tambahnya.

Terbatasnya akses internet juga menjadi salah satu hambatan. Namun demikian, Sopia menyakini bahwa berbagai proses baik dalam pelatihan serta pengalaman turun ke lapangan selama ini akan mempercepat kapasitas para jurnalis warga.

### **Melestarikan Adat Lewat Sekolah Budaya**

Suara Grina juga mendukung penyelenggaraan Sekolah Budaya dan Bahasa Namblong. Sekolah Budaya merupakan inisiatif dari ORPA agar anak-anak di kampung lebih mengenal bahasa Namblong. Rata-rata mereka memahami arti tapi tak mahir menggunakannya.

“Kita mengajar anak untuk mengenal budaya, adat tradisional di suku Namblong, ukiran Namblong, proses pembuatan noken oleh kelompok perempuan, tarian dan musik Namblong, cerita rakyat, dan produk makanan Namblong,” ujar Sopia.

Bermula dari kegelisahan menyaksikan anak-anak di kampung tidak banyak mengenal bahasa Namblong, pada tahun 2000 ia mendirikan sekolah budaya secara mandiri. Ia mengumpulkan anak-anak di kampung untuk belajar menyanyi. Pada akhirnya, ia dan para pengurus ORPA memutuskan untuk mendirikan sekolah. Di halaman rumahnya lantas dibangun sebuah pondok sederhana sebagai kelas belajar.

Kini, sekolah budaya berjalan setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Ada sekitar 15 anak yang belajar. Pagi hari mereka bersekolah di Sekolah Dasar terdekat, kemudian sore jam 15.00 WIT mereka belajar di Sekolah Budaya. Pengajarnya berganti-ganti, diantaranya adalah para pengurus ORPA.

“Yang mengajar saya dan Ketua ORPA Mama Rosita Tecuari. Kami mengajarkan mereka membuat noken, dengan memakai bahan yang ada di sekitar Benyom. Juga belajar bahasa Namblong. Kita ingin supaya anak-anak lebih tahu bahasa. Juga tahu tari-tari dan lagu adat Namblong,” ujarnya.

Absennya dukungan dari pemerintah daerah tak membuatnya patah arang. Ia juga senang, banyak orangtua murid mendukung dan bahkan terlibat untuk mengajar bahasa.

Selain pelestarian budaya, salah satu fokus ORPA adalah pada pemberdayaan ekonomi. Mereka mengajak warga untuk memanfaatkan pekarangan dengan menanam aneka pangan dan tanaman yang dibutuhkan untuk kesehatan.

“Ada program, tanaman itu harus ada setiap kebun, baik untuk pembuatan noken, misalnya pohon mahkota dewa dan melinjo, sebagai bahan dasar pembuatan noken yang sumbernya banyak di Namblong,” tambahnya.

Adanya program Voice membantu untuk memperlancar operasionalisasi sekolah budaya. Selain untuk memberikan insentif kepada tenaga pengajar, juga untuk membeli alat-alat ajar seperti pensil, krayon dan buku gambar.

“Meskipun tidak banyak, tapi cukup membantu. Ini juga bukti bahwa Sekolah Budaya ini diakui keberadaannya,” imbuhnya.

### **Suara dari Namblong Makin Meluas**

Setahun mengelola program, Komunitas Suara Grina telah mengalami banyak kemajuan. Para jurnalis warga mulai meningkat kemampuan menulisnya. Jika semula mereka masih bingung memulai sebuah tulisan, kini mereka



bisa membuat *outline* atau kerangka sendiri. Kemampuan menulis pun semakin baik.

“Tidak harus tema-tema besar, melainkan hal-hal di seputaran mereka,” ujar Narris.

Sopia menyebut, sebelum bergabung dengan Suara Grina, ia tidak tahu cara menulis. Setelah ada program di antaranya pelatihan menulis dan pembuatan foto dan video, ia makin merasa piawai.

“Bagaimana saya tulisnya? Semula saya juga tidak tahu. Tapi diarahkan untuk menulis dengan menggunakan Sekarang tulisan, membuat tulisan memakai 5W1H. Saya terus coba, menulis, membuat foto, akhirnya bisa...”

ujar Sopia. Salah satu yang dibuat oleh Sopia adalah sebuah foto bercerita tentang sayur lilin, sayur yang banyak tumbuh di sekitar rumahnya, yang kini jarang dimanfaatkan.

“Setelah di Suara Grina saya juga

tahu ambil foto. Sekarang saya tahu kalau mau ambil foto harus lawan cahaya.,” tambahnya.

Ia menyebut beberapa mentor, seperti Narriswari dan Asrida Elisabeth banyak mengajarnya untuk menulis dan membuat foto dan video.

“Saya menuliskan cerita-cerita dari Kampung Benyom, mulai dari tanaman obat-obatan dan sekolah budaya. Supaya generasi ke depan melihat kalau kampung kita baik, mereka akan bangga,” ujar Sopia.

Imelda merasakan manfaat dari keterlibatan di Suara Grina. Ia mengakui jika semula ia masih kesulitan menulis, kini ia makin mahir.

“Diarahkan dan diedit. Saya jadi bisa belajar,” kata Imelda.

Ia kini juga mahir memotret dan menggunakan aplikasi editing foto. Ia juga membuat foto bercerita.

Bagi Vebbry, perubahan besar baginya adalah ia yang dulunya pendiam dan tidak bisa bersosialisasi, setelah aktif di Suara Grina dan menjadi koordinator, ia bisa berubah lebih percaya diri untuk bicara di depan forum. Ia juga mahir mengoperasikan kamera DLSR dan membuat film pendek.

“Ini tentu butuh proses panjang. Jika dulu saya menulis belum lancar, sekarang makin tersusun lancar. Sesuai 5WIH. *Sa* sebelumnya sudah ikut pelatihan foto, sekarang makin bagus. Saya juga bikin video,” tambahnya.

Pada hari Selasa, 7 November 2023, lima buah dokumenter pendek produksi Suara Grina diputar di Kampung Sermai Atas, Distrik Namblong. Menempuh perjalanan sekitar satu jam dari Desa Benyom, mereka juga membawa peralatan mulai proyektor, speaker, dan layar.

Jam 19.00, seratusan warga Desa Sermai Atas berkumpul di Balai Adat. Lima buah film dokumenter dengan durasi masing-masing sekitar lima menit itu diputar. Bertema tentang tanaman

obat-obatan wasiano, ukiran Namblong dan pembuatan noken.

Video dokumenter itu diproduksi oleh Vebbry bersama Stanley Tarko. Sementara teman-teman jurnalis warga lainnya terlibat dalam proses dan belajar.

“Saya puas. Apalagi warga tampak antusias,” ujar Vebbry.

Ia menuturkan, selepas video tentang tanaman wasiano diputar, ada sedikit gangguan teknis. Warga, kebanyakan pemuda dan anak-anak, pun berteriak,

“Mana yang lain, saya tunggu ini!”

tutur Vebbry, menirukan reaksi warga. Akhirnya kelima film dapat diputar dengan lancar. Warga baru beranjak pulang usai layar digulung. Mereka senang, lantaran ada film yang berkisah tentang seputar mereka.

“Di salah satu video tentang noken, waktu itu saya rekam, ada salah satu anak dari Sermai Atas. Waktu *dong'* punya muka tampak

di layar, mereka berteriak-teriak. Mereka senang,” tambah Vebbry.

Usai acara, seorang warga meminta padanya untuk juga dibuatkan film tentang desa mereka.

“Harus ada film dari distrik Namblong jugaa.....” ujarnya.

Vebbry pun mengiyakan.

“Itu tujuan kami putar di Bapa punya distrik. Sehingga kami bisa datang. Kalau Bapa minta kami bisa datang..” jawab Vebbry.

Medan yang jauh dan hari sudah larut, malam itu tim dari Suara Grina bermalam di Desa Sermai Atas.

“Saya bangga karena bisa memutarakan lima film produksi Suara Grina dan menyaksikan antusiasnya warga Sermai Atas. Saya sangat senang akhirnya bisa putar film produksi sendiri,” ujarnya.

Berkat tulisan-tulisan yang diunggah ke sosial media dan menjadi perbincangan masyarakat, para jurnalis warga Suara Grina juga semakin percaya diri bahwa karya mereka telah memberi manfaat sebagai upaya menjaga kampung dan adat mereka. Diskusi mengenai Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) juga membawa perubahan pemahaman dan perilaku. Narris menyebut, warga mulai mengenal isu kesehatan reproduksi dan kedaulatan tubuh.

“Mereka mulai tahu, bahwa ternyata konsep orang siul-siul di jalan, itu adalah kekerasan terhadap perempuan. Mereka juga mulai tahu tentang kedaulatan tubuh, mana bagian tubuh yang tidak boleh dilihat,” ujar Narris.

Dengan adanya Suara Grina, kini kabar tentang kampung Benyom tersebar luas. Bagi mereka sendiri, khususnya anak-anak muda menjadi makin dekat mengenali wilayahnya sendiri. Mereka makin sadar bahwa alam dan adat mereka kaya dan harus dijaga dan dilestarikan.

Komunitas Suara Grina kini juga makin dikenal.

Makin banyak orang muda yang tertarik untuk bergabung. Jika dulu Suara Grina mengundang banyak orang muda untuk terlibat dan menjadi anggota Suara Grina, maka sekarang mereka mulai menawarkan diri untuk bergabung.

Narris mengisahkan, beberapa kali bertemu orang muda dan mereka bertanya,

“Kaka saya bisa ikut? Bagaimana bergabung dengan Suara Grina? Artinya mereka punya kepedulian untuk berkomunitas,” ujarnya.

Dari daerah lain pun ada saja yang menyatakan minatnya untuk bergabung. Narris menyebut bahwa Suara Grina terbuka menerima tulisan dari luar, hanya saja topiknya harus terkait dengan adat. Kendati demikian, hingga kini, anggota yang aktif masih berada di seputar wilayah adat Namblong dan Kentuk.

Sopia menyebut jika dulu hendak bikin kegiatan mereka harus mengundang jurnalis dari Jayapura, kini jurnalis warga Suara Grina sudah bisa membuat liputan sendiri.

“Komunitas Suara Grina juga sering mendapat undangan untuk

meliput ibadah syukuran dan acara adat. Mereka mengundang Suara Grina sebagai jurnalis,”

imbuh Sopia.

Sementara Vebbry mengutarakan rasa bangga saat mereka bisa menuliskan kisah-kisah dari kampungnya sendiri,

“Teman-teman anggota Suara Grina bisa menuliskan cerita di *dong* punya kampung. Tidak harus tunggu orang dari kota. Cerita kami bisa tersiar,”

ujarnya.

Suara Grina telah menjadi ruang orang muda berkumpul dan belajar. Mereka kini terhubung kembali dengan kisah dari adat mereka. Sementara itu, suara-suara dari Nambong juga masih luas tersiar.

“Saya bangga sebagai bagian dari Suara Grina. Karena ada Suara Grina kaka jadi bisa bikin

foto, menulis dengan bagus. Hal-hal yang dulu kita belum tahu sekarang jadi tahu. Dengan adanya program ini, maka komunitas kita juga menjadi lebih aktif,” tutur Sophia.

Kebanggaan yang sama muncul dari Imelda. Ia menyebutkan banyak manfaat menjadi jurnalis warga Suara Grina.

“Kami bisa angkat kembali tradisi tari-tarian, pakaian, juga cara bikin noken. Teman-teman di Namblong lainnya jadi bisa tahu. Ikut menuliskan soal Namblong membuat saya bangga,” ujarnya.



Menjaga Asa Perempuan Pembela HAM

# Menjaga Asa Perempuan Pembela HAM

Oleh: Meidella Syahni, Tim LBH APIK, dan Tim  
LRC-KJHAM

Poppy Octasari dan Yehand Permata Sari tak bisa menahan geram. Hari itu mereka tengah mendampingi seorang korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di kantor polisi. Saat proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seorang polisi nyeletuk, “Oh, masih perawan,” menanggapi status korban yang belum menikah.

Yehand mulanya ingin langsung menegur polisi tersebut. Namun, dia ingat proses BAP bisa semakin lama. Sementara korban sudah cukup banyak mendapat tekanan karena ancaman pelaku yang menyebarkan foto dan videonya tanpa persetujuan.

Setelah BAP selesai Yehand dan Poppy, sebagai pengacara pendamping mewakili Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, mencoba menegur aparat tersebut.

“Saya minta maaf sebelumnya.  
Tapi ada perkataan Bapak ada  
yang kurang berkenan meski itu  
bukan ditujukan kepada kami.  
Itu membuat kami tidak nyaman.

Harusnya Bapak memberikan ruang aman. Itu termasuk pelecehan seksual,”

kata Yehand mencoba setenang mungkin.

Polisi tersebut langsung meminta maaf, meski tetap merasa itu tak sepenuhnya salah.

“Mungkin karena Mbak-nya baru jadi pendamping,” jawabnya.

Poppy dan Yehand hanya bisa menghela nafas panjang. Walau mereka tau bisa saja perlakuan ini dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, mereka juga khawatir jika itu bisa mengganggu proses pelaporan yang sedang dilakukan korban. Bagi mereka saat itu, kepentingan korban adalah prioritas.

Akhirnya niat itu diurungkan.

Itu bukan pertama kali dua pengacara perempuan ini harus menghadapi komentar negatif dan bias gender dari aparat penegak hukum saat mengurus laporan kekerasan terhadap perempuan. Dalam pendampingan lain, misalnya, aparat juga pernah bertanya,

“kenapa kamu *ga* langsung melapor?”

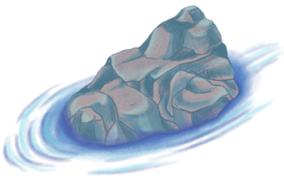
“*Ga* ada perspektif korban. Pernyataan-pernyataannya masih bias gender *banget*,” kata Yehand.

### **Para Pembela Perempuan dari Gen Z**

Poppy dan Yehand bertemu di LBH APIK awal 2023. Yehand bergabung dengan LBH APIK pada 2022, disusul Poppy pada Februari 2023. Keduanya tertarik dengan kerja pendampingan LBH APIK setelah melihat Instagram LBH APIK yang aktif mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sebelumnya Poppy sama sekali awam dengan isu perempuan. Ia pikir, laki-laki dan perempuan sudah setara. Sedangkan Yehand memang sudah tertarik sejak awal dengan isu hak perempuan dan anak.

Pucuk dicinta ulam tiba. Niat Poppy dan Yehand mendalami isu hak perempuan bersambut saat LBH APIK membentuk Akademi untuk Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bagian dari program yang didukung Voice Global.



Lewat program ini Poppy, Yehand dan sejumlah pendamping korban kekerasan seksual lain yang tergabung dalam konsorsium yang dipimpin oleh LBH APIK merancang enam kegiatan mulai dari *workshop* pemahaman Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pelatihan menulis, pelatihan untuk pemangku kebijakan terkait termasuk polisi, jaksa, hakim dan sipir, pemantauan kasus kekerasan seksual, pelatihan lobi dan advokasi, hingga membangun jaringan.

Program-program ini melatih mereka memvalidasi perasaan korban, menangani korban yang mengalami trauma dan menyusun strategi mendampingi korban; baik secara litigasi maupun non litigasi.

Poppy masih ingat kasus pertama yang ditanganinya sungguh menguras energi dan pikirannya. Saat itu, seorang perempuan hamil dan ingin menggugurkan kandungannya. Mitra ini–begitu mereka menyebut korban–mencoba meminum pil penggugur kandungan di kosannya. Namun, efeknya membuat korban begitu kesakitan. Korban kemudian meminta temannya mengantarnya ke rumah sakit.

Saat itulah masalah lebih berat muncul. Pihak rumah sakit menemukan indikasi aborsi pada diri korban. Alih-alih menangani korban dengan sigap, tanpa peduli kondisi fisik dan kejiwaan korban, pihak rumah sakit justru melaporkan korban ke

polisi karena dinilai melanggar kode etik.

Poppy sebetulnya heran. Tak ada pihak yang dirugikan dalam kasus ini kecuali korban yang harus menanggung sendiri trauma dan sakit akibat aborsi. Kenapa pihak rumah sakit harus menuntutnya?

Walau Poppy dan tim LBH APIK beberapa kali mencoba mediasi kepada pihak pimpinan rumah sakit, mereka tetap ingin melaporkan korban. Bukannya mendapat layanan medis di rumah sakit, justru pihak rumah sakit menambah beban korban, hingga kemudian korban harus jadi tahanan kota.

Selain proses hukum yang menjadi masalah, rumah sakit juga membebankan tagihan hingga puluhan juta rupiah. LBH APIK tak hanya mendampingi kasusnya secara hukum, namun juga mendampingi korban untuk mendapatkan pekerjaan baru karena korban juga harus membayar biaya rumah sakit.

Setelah kasus itu, Poppy dan Yehand menerima lebih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang dan KDRT.

Salah satu yang mereka ingat, suatu hari di bulan September seorang perempuan datang dengan mata merah dan lebam. Korban baru saja dipukuli oleh suaminya. Korban datang dan ingin minta pendampingan melapor ke polisi. Mendengar

kronologis cerita korban, mereka sepakat minta polisi menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Namun, saat itu polisi bilang mereka tak bisa menggunakan undang-undang tersebut karena korban ‘hanya’ menikah siri dengan pelaku. Polisi bilang mereka akan gunakan UU KUHP. Poppy dan Yehand berusaha menjelaskan kalau UU PKDRT bisa digunakan dan akan lebih menguntungkan korban.

Dalam pengalaman dan pelatihan yang mereka dapatkan dari program Voice, mereka memahami bahwa lebih mudah mencari saksi dan bukti jika menggunakan UU PKDRT. Hukumannya pun bisa jauh lebih berat.

### **Menghadapi Pejabat Publik Pelaku Kekerasan**

Kesulitan lain dialami perempuan pembela HAM dari Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM).

Witi Muntari, misalnya, yang telah bergabung dengan LRC-KJHAM sejak 2010 masih ingat bagaimana ia dan tim pendamping korban kekerasan harus mengatur strategi lebih banyak ketika pelaku kekerasan adalah pejabat publik.

Saat itu, sedang berlangsung sidang dengan agenda mendengarkan kesaksian korban. Witi dan tim pendamping korban dilanda kekhawatiran

karena pelaku membawa banyak pengacara dan masa pendukung. Suasana persidangan pun menegangkan karena banyak pengunjung sidang yang justru mendukung pelaku.

Witi dan tim kemudian membagi tim. Beberapa berada di pengadilan untuk memantau proses sidang, lainnya bersiap mengamankan korban pasca memberikan kesaksian.

Di luar sidang, LRC-KJHAM juga membangun jaringan yang lebih luas agar lebih banyak orang yang berpihak pada korban.

“Tentu dengan *consent* dari korban,” kata Witi.

Dalam situasi seperti ini, strategi tak hanya diatur untuk keamanan korban, namun juga pendamping.

Tak hanya itu, kadang mereka juga harus menghadapi pihak-pihak yang masih membujuk korban agar mencabut laporan atau menghentikan proses pelaporan di kepolisian.

Di persidangan, Witi ingat pernah ada hakim yang mempertanyakan kapasitas pendamping korban. Atau jaksa yang masih menggunakan toga dalam sidang dengan korban anak.

## “Anaknya nangis menjerit-jerit,”

kata Witi.

Hadirnya UU TPKS sayangnya juga belum bisa menjadi harapan baru untuk perlindungan korban kekerasan seksual.

Sepanjang 2022, LRC-KJHAM mencatat 92 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada jaringan organisasi ini di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 57 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual. Dari semua kasus, hanya satu kasus yang diproses menggunakan UU TPKS.

Penerapan UU TPKS di lapangan masih tersandung persoalan seperti stigma sosial, konteks budaya dan adat, hingga tekanan pada korban perempuan.

Salah satu contoh kasusnya terjadi di Jawa Tengah, saat seorang perempuan berusia 22 tahun melaporkan kepada LRC-KJHAM bahwa ia mengalami kekerasan seksual di kosnya. Saat itu pelaku menyelinap masuk kamar kos ketika korban sedang tidur. Setelah korban terbangun, warga sekitar datang memberi pertolongan. Akibat kekerasan tersebut, korban mengalami trauma, selalu menangis, tidak ingin makan, tidak bisa tidur, hingga ingin bunuh diri.

Atas keinginannya, korban melapor ke Polsek setempat. Laporan korban diterima menggunakan

KUHP pasal 281 dan 290. Tapi karena bapak pelaku memohon-mohon kepada korban, akhirnya korban mencabut laporannya kepada polisi.

Korban mengaku bahwa keputusan berat tersebut sebenarnya bukan karena didasari rasa iba atau kebaikan hati sesaat, tapi karena korban sadar bahwa kekerasan seksual dianggap aib oleh masyarakat. Ia tahu ia akan menghadapi banyak tekanan dan keluarga pelaku dan orang-orang di sekitar pelaku. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan kasusnya.

Salah satu jejaring LRC-KJHAM di Jawa Tengah, organisasi Talita Kum, bahkan melaporkan bahwa tidak ada satupun kasus kekerasan seksual yang mereka tangani yang diproses hukum. Peranan mereka terbatas pada proses pemulihan psikologis.

Karena tidak ada keadilan ini, korban dampingannya cenderung sangat tertutup, tidak mudah percaya pada orang lain, dan sulit mengisahkan pengalamannya. Bahkan, mereka baru bisa bercerita setelah tiga sampai empat kali pertemuan intens. Mereka semua tidak ada yang melanjutkan kasus karena terlalu khawatir akan stigma dan diskriminasi.

### **Susahnya Implementasi UU TPKS**

Di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), stigma ini bahkan terpatritasi dalam hukum.

Sepanjang 2022, LBH APIK Aceh menangani 18 laporan kasus kekerasan seksual. Namun, UU TPKS seolah kehilangan gigi karena aparat penegak hukum cenderung lebih menaati kode hukum lokal atau Qanun Jinayat.

Contoh kasus yang naas muncul saat mereka menerima laporan seorang perempuan muda penyandang disabilitas mental yang diperkosa oleh tetangganya. Kejadian pemerkosaan ini berulang berkali-kali, dan baru diketahui ketika korban sudah hamil tua. Pada saat dilaporkan pertama ke aparat desa maupun kepolisian, kasus ini tidak dianggap serius karena dianggap korban sudah dewasa dan melakukan hubungan seksual atas keinginannya sendiri.

Saat keluarga korban mau melangkah lebih jauh, hukum menghentikan mereka. Dalam penerapan Qanun Aceh No. 6 tahun 2014, korban dewasa berpotensi dianggap pelaku dan mendapat hukuman juga bila dia tidak dapat membuktikan tindakan kekerasan tersebut dan bila kekerasan seksual terjadi lebih dari satu kali. Maka secara hukum, korban dianggap sebagai pelaku juga, dan akan ikut dihukum bersandingan dengan pelaku.

Aturan Qanun Jinayat Pasal 77 juga membatasi adanya aturan lain yang dilaksanakan di Aceh, termasuk UU TPKS. Walhasil, semakin sulit bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Di lapangan, keluarga-keluarga korban

menanggapi hal ini dengan mengambil langkah drastis. Apabila korbannya dewasa dan kekerasan terjadi saat berpacaran, misalnya, biasanya korban akan didamaikan lalu dinikahkan.

Situasi itu tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi TRUK-F, jejaring di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka paling tidak punya preseden langka: satu-satunya kasus kekerasan seksual yang diproses dengan UU TPKS terjadi di Maumere.

Pada laporan yang diterima, korban sedang sakit dan minta diobati oleh bapak mertuanya yang berprofesi sebagai dukun. Saat sedang melakukan ritual, pelaku melakukan kekerasan seksual. Awalnya, korban berpikir akan memaafkan dan tidak melaporkan mengingat pelaku adalah mertua sendiri, apalagi suami korban pun meminta agar mereka berdamai.

Tapi, karena pelaku tidak ada itikad baik untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf, bahkan mengancam akan melaporkan korban atas tuduhan pencemaran nama baik, korban akhirnya melapor ke polisi.

Pada kasus tersebut pendamping mendorong agar menggunakan undang-undang TPKS, tetapi polisi juga mengalami kesulitan akan menggunakan pasal yang mana. Pada akhirnya kasus tersebut dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan

Anak (PPA) dan menggunakan Pasal 6a UU TPKS. Namun, tetap masih ada keraguan dari penyidik jika berkasnya akan dikembalikan oleh pihak kejaksaan.

Setelah kasus ini dilaporkan, terdapat tiga kasus kekerasan seksual dewasa yang dilaporkan ke TRUK-F dan diproses dengan UU TPKS. Penyidik menjawab bahwa kasus pertama akan dicoba dulu dengan UU TPKS. Bila naik berkas jadi status P21, hasil penyidikan perkara tindak pidana lengkap dan siap dilimpahkan ke kejaksaan, maka kasus kekerasan seksual lainnya baru akan diproses menggunakan UU TPKS. Lain halnya dengan kasus dengan korban anak, yang otomatis menggunakan UU Perlindungan anak sehingga dianggap “lebih mudah” ditangani.

### **Stigma Terhadap Korban Jalan Terus**

Penanganan kasus mungkin mangkrak, tapi stigma terhadap korban jalan terus. Secara adat, korban kerap dianggap telah melanggar tata krama. Korban pun diasingkan dari kampung karena dianggap membawa malapetaka dan aib. Dalam kepercayaan lokal, kehadiran orang seperti ini akan mendatangkan banjir dan hujan angin, sehingga kampung harus dibersihkan.

Lembaga adat setempat melakukan ritual pembersihan dengan membakar semua pakaian

korban dan menebang semua pohon yang ada di sekitar rumah korban. Ritual ini dikenal sebagai Demu Lero Wulan. Tak henti di sana, korban disuruh keluar dari kampung dan dilarang untuk kembali lagi.

Korban pun didampingi oleh TRUK-F dengan diberikan penguatan psikologis, akses ke rumah aman, dan layanan kesehatan serta pendampingan hukum. Lebih pelik lagi, korban rupanya sedang dalam kondisi hamil. Dari masa kehamilan, sampai dengan ketika korban melahirkan, sudah mulai kembali pulih, dan akan melanjutkan pendidikannya; kasusnya tetap mangkrak.

Ternyata, walau UU TPKS telah disahkan selama setahun, nasib perempuan korban tidak jauh berubah. Mulai dari Aceh, Jawa Tengah, hingga NTT, korban tetap sulit mendapatkan keadilan. Sudah seharusnya pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga penyedia layanan bersinergi untuk sungguh-sungguh mengimplementasikan UU TPKS.

Kasus di Aceh dan NTT membuktikan bahwa hadirnya hukum formal di tataran pemerintah pusat saja tidak cukup. Dalam kasus Aceh, pemerintah harusnya mengkaji ulang beberapa aturan khususnya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 pada pasal 77, agar UU TPKS dapat diterapkan secara maksimal. Sedangkan di NTT, harus ada



upaya kolaborasi dengan lembaga adat untuk mendukung penanganan kasus, perlindungan, dan pemulihan korban.

### **Jaminan Sosial Untuk Para Pejuang Perempuan**

Terlepas dari sulitnya pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan, para pendamping juga berkuat dengan tantangan mulai dari kurangnya sumber daya manusia hingga kurangnya dukungan untuk proses litigasi maupun non litigasi.

Tak jarang korban yang sudah hampir sampai proses persidangan meminta mencabut laporan entah karena lelah dengan proses yang panjang atau kekhawatiran lainnya.

Poppy dan Yehand kadang merasa *burnout* karena hampir setiap hari menerima pengaduan korban dan terus memikirkan bagaimana dapat membantu korban dengan maksimal. Ditambah kasus-kasus yang rumit, seperti kasus KBGO di mana identitas pelaku sulit ditemukan. Padahal identitas pelaku sangat penting untuk bikin laporan ke polisi.

Beruntung mereka punya cara sendiri untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan mental. Poppy rutin olahraga lari sementara Yehand meluangkan waktu untuk menonton film atau mendengarkan musik jika sudah merasa banyak pikiran.

Namun, ini saja sebetulnya tidak cukup. Perempuan pembela HAM seperti Poppy, Yehand dan Witi masih membutuhkan banyak dukungan baik secara fisik, ekonomi, sosial, budaya dan mental.

Pada 2021, LRC-KJHAM yang menjadi bagian dari program Konsorsium IPROTECTNOW, yang juga menjadi bagian dari penerima hibah program Voice, mencoba merumuskan panduan bagi lembaga yang menaungi PPHAM (Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia).

Dalam program ini, manajemen lembaga dilatih untuk menyusun panduan perlindungan sosial, ekonomi, dan pendidikan untuk PPHAM. Ini mencakup juga fasilitas asuransi kesehatan, ketenagakerjaan, hingga kesempatan untuk mendapatkan konseling atau pendidikan lanjut.

**“Karena setiap hari interaksi dengan kasus, rentan untuk trauma sekunder,”** kata Witi.

Sebetulnya LRC-KJHAM menurut Witi sudah memikirkan dan memberikan fasilitas-fasilitas tersebut kepada PPHAM di dalam organisasinya. Namun, perlindungan ini tidak baku dan belum masuk dalam operasional lembaga.

Lewat program ini menurut Witi, LRC-KJHAM mendapat bantuan untuk mengintegrasikan fasilitas ini ke dalam manajemen lembaga sehingga manfaatnya terjamin dapat dirasakan oleh para PPHAM. Dengan dimasukkannya perlindungan-perlindungan untuk PPHAM dan akses pengembangan maupun pemulihan diri dalam kebijakan organisasi, kelak tidak ada lagi kekhawatiran generasi muda untuk memilih PPHAM menjadi jalan hidupnya.

“Jika hak-hak ini terpenuhi pilihan seseorang untuk menjadi PPHAM tidak lagi menyimpan kekhawatiran. Tidak ada lagi PPHAM lanjut usia yang harus berjuang sendiri kelak.”



Tempat Aman dan Dukungan yang Layak bagi Lansia

# Tempat Aman dan Dukungan yang Layak bagi Lansia

Oleh: Lilik HS

Seorang transpuan lanjut usia (lansia), Mbok Erni Dadang (57) tergolek sendirian di tempat kost. Penyakit liver yang lama diidapnya kambuh hingga perut dan kakinya membengkak. Alih-alih periksa ke dokter, untuk makan sehari-hari pun ia kerepotan. Ia masih tetap mengamen demi bertahan hidup. Mbok Erni kemudian dibawa ke *shelter* Senior Support Center (SSC) Teratai, di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain memperoleh perawatan memadai, ia juga mendapat banyak teman mengobrol. Ia merasa diterima. Ia tak lagi sendirian.

**“Aku ingin meninggal di sini....”**

ucapnya, ditirukan oleh Mami Tata (58), salah seorang pengelola SSC Teratai. Saat sakitnya bertambah parah ia dirawat di Rumah Sakit. Mbok Erni akhirnya meninggal di *shelter* SSC Teratai, tak lama kemudian, dikelilingi oleh teman-teman transpuan seperti harapannya selama ini. Peristiwa itu begitu melekat di benak Mami Tata.

Ada lagi kisah Mbah Mento Sariyah (102) dari Kabupaten Gunung Kidul. Sebagai lansia soliter yang hidup sendirian dan sakit-sakitan, ia mendapatkan dukungan dan perhatian dari para relawan pendamping yang tergabung

dalam SSC Megarsore. Para ibu-ibu pendamping dengan telaten berkunjung dan menemani Mbah Mento. Saat Mbah Mento wafat, mereka yang memandikan, mengurus pemakaman, dan memberikan perlakuan layak di akhir hidupnya.

Kisah Mbok Erni dan Mbah Mento Sariyah adalah dua diantara beragam kisah para lansia di di Yogyakarta dan Gunung Kidul yang selama ini merupakan dampingan dari program Senior Support Center (SSC) yang diselenggarakan oleh Elderly Rights Advocacy & Treatments (ERAT) Indonesia.

ERAT Indonesia merupakan perkumpulan yang bergerak dalam bidang penguatan hak dan *treatment* bagi lansia di Indonesia. Berdiri di Yogyakarta pada 2019, awalnya diprakarsai oleh sekumpulan anak muda yang gelisah menyaksikan banyaknya lansia yang tidak memperoleh perawatan dan perlakuan secara memadai.

Terlebih data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa DIY merupakan provinsi dengan penduduk lansia terbesar dalam skala nasional. Jumlahnya mencapai 3,68 juta jiwa mendapat porsi 17,33% dari total jumlah penduduk DIY.

Sapta Widi Wusana (40), salah satu pendiri ERAT Indonesia menyebutkan bahwa tak lama setelah berdiri, mereka mendapat dukungan dari Voice

Global dalam program SMILE yang berbasis pada pembentukan dan penguatan komunitas lansia.

Setelah Program SMILE usai, mereka kembali mendapatkan dukungan dari Voice Global. Modalitas yang telah dimiliki seperti terbangunnya komunitas lansia lantas dilanjutkan dengan penguatan jejaring pendukung lansia dan penguatan advokasi. ERAT Indonesia memfokuskan pada hak lansia yang paling rentan yakni transpuan lansia dan lansia perempuan soliter.

Program Support Center (SSC) yang berjalan pada November 2021 hingga Oktober 2023. Adapun sebagai tujuan utama dari program ini adalah menghadirkan ruang aman yang lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau bagi lansia rentan (transpuan dan perempuan soliter) yang meningkatkan aksesibilitas lansia rentan terhadap bantuan langsung, advokasi, dukungan sosial serta dukungan perawatan di provinsi DIY.

Selain itu, ERAT juga mendorong munculnya kebijakan pro-lansia di tingkat lokal (kabupaten dan provinsi) dan terutama di tingkat komunitas masyarakat yang lebih kecil (kampung/dusun/desa).

Untuk menghadirkan ruang aman yang dekat, mudah, dan terjangkau bagi lansia rentan (transpuan dan perempuan soliter) tersebut

dinyatakan dalam pendirian Senior Support Centre (SSC).

Program tersebut dilaksanakan di dua wilayah yakni di Yogyakarta yang bernama SSC Teratai yang berbasis transpuan lansia dan di Kabupaten Gunungkidul bernama SSC Megarsore yang berbasis pada komunitas lansia perempuan soliter. SSC Teratai mengembangkan shelter sebagai tempat aman bagi para transpuan lansia dan SSC Megarsore sebagai titik kumpul dan beraktivitas antara perempuan lansia soliter dan komunitas pendukung lansia yang terdiri dari para warga di sekitarnya.

“Banyak perempuan lansia soliter yang kami temukan. Kami melakukan pendekatan berbasis komunitas. Mereka bisa menyatakan dukungan pada lansia, yang bisa mengakomodir problem lansia dan pada jangka panjang akan memberikan perubahan sosial,” ujar Sapta.

## **SSC Teratai, Tempat Aman bagi Transpuan Lansia**

ERAT mengelola sebuah shelter SSC Teratai bersama Waria Crisis Center (WCC) yang dipimpin oleh Mami Rully Malay (60). Pada awalnya, Mami Rully Malay dan Shinta Ratri (almh) mendirikan WCC untuk menampung para transpuan yang menjadi korban perundungan dan kekerasan. WCC tersebut berdiri di bawah naungan Pondok Pesantren Al Fattah di mana Shinta Ratri menjadi pemimpinnya.

Setelah bekerjasama dengan ERAT, shelter SSC Teratai kemudian dikelola dengan lebih baik dan menampung transpuan lansia. Hal ini menjawab persoalan banyaknya transpuan yang tak memiliki tempat tinggal di masa tua serta sulit mendapat dukungan dari orang-orang sekitar. Sementara itu, akses untuk masuk ke panti-panti wreda milik pemerintah dan swasta pun relatif terbatas.

Rully Mallay adalah Koordinator WCC. Ia juga aktif di Yayasan Keluarga Besar Waria Yogyakarta (KEBAYA), Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, dan Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO). Sejak lama ia bekerja mengadvokasi isu-isu transpuan, dari mulai isu kekerasan, pemberdayaan ekonomi, hingga mengupayakan para transpuan mendapatkan dokumen adminduk berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Yogyakarta, agar mereka

bisa mengakses layanan sosial dan kesehatan.

Mami Tata merupakan salah satu pengelola SSC Teratai. Sejak lama ia aktif mengadvokasi isu transpuan bersama Mami Rully. Sebuah kejadian berbelas tahun lalu tak bisa ia lupakan, di mana di stasiun Kota Yogyakarta ia menyaksikan seorang kawannya sesama transpuan menjemput ajal lantaran sakit parah dan tak mendapat pertolongan. Proses pemakaman pun sulit lantaran ia tak punya KTP.

Sejak itu, Mami Tata memutuskan untuk bergabung dengan organisasi yang bergerak untuk memperjuangkan para transpuan seperti Yayasan KEBAYA. Ia juga ikut mendirikan *shelter* Eben Ezer bersama Mami Rully. KEBAYA merupakan wadah yang menaungi keberadaan transpuan di Yogyakarta, termasuk membantu mengakses layanan termasuk akses kesehatan terutama bagi lansia.

“Makanya penting yang *diberesin* soal KTP dulu. Sebagian besar mereka tidak atau belum memiliki KTP. Kawan-kawan transpuan di Yogyakarta kebanyakan adalah pendatang,

merantau karena kabur dari kampung halaman. Penyebabnya beragam, sebagian besar karena tidak diterima oleh keluarga atau lingkungannya,” ujarnya.

Ketiadaan dokumen kependudukan seperti KTP menyebabkan mereka tidak dapat mengakses berbagai program pemerintah, terutama terkait kesehatan dan bantuan sosial.

*Shelter* SSC Teratai yang terdiri dari tiga kamar tersebut menjadi tempat berteduh bagi transpuan lansia yang tidak memiliki tempat tinggal. Di lokasi berhawa sejuk dan dekat persawahan tersebut, mereka beraktivitas secara mandiri: memasak, berkebun, membuat kerajinan tangan, dan membincang masalah keseharian mereka.

Kini ada empat orang transpuan lansia yang tinggal di *shelter* SSC Teratai. Mami Tata menyebut, penerimaan dan perlakuan yang baik membuat mereka bisa menikmati hari tua dengan lebih bahagia.

Mbok Erna (64) adalah salah satu penghuni di SSC Teratai. Disebutkan oleh Mami Tata, ia adalah transpuan perantau yang telah lama menetap di Yogyakarta. Setelah usia lansia, ia mulai sakit-sakitan dan kesulitan mencari nafkah.

“Aku senang di sini. Aku tidak bingung mau makan apa. Aku jadi lebih sehat dan tidak mikir macam-macam. Aku bisa berkebun dan menanam terong,”

ujar Mbok Erna setelah beberapa saat tinggal di shelter SSC Teratai, seperti ditirukan oleh Mami Tata.

Pengalaman Mami Tata membantu mengadvokasi akses layanan sosial bagi para transpuan, kemudian juga ditularkan ke SSC Megarsore di Gunungkidul.

### **SSC Megarsore, Bahu-Membahu Mendukung Lansia**

Sebelum mendirikan Senior Support Center di Wonosari, ERAT mengawali dengan sebuah riset di yang dilakukan di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul selama dua bulan, dimulai pada Juli 2022. Riset tersebut melibatkan anak-anak muda perempuan serta para ibu rumah tangga di sekitar mereka sebagai pewawancara. Beragam temuan seputar lansia soliter pun mengemuka.

Dalam artikel yang ditulis oleh Adityo Nugroho

dan Wiwin Risky dari ERAT Indonesia, disebutkan bahwa rata-rata kondisi ekonomi para lansia soliter ini adalah menengah ke bawah, nyaris tidak dijangkau oleh layanan kesehatan, dan terisolir dari berbagai sumber informasi. Selain itu, lansia soliter banyak yang memiliki kendala fisik seperti tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, dan tidak bisa mendengar atau susah mendengar.

Hal ini dialami oleh Mbah Jumiye dan Mbah Mento Sariyah. Mbah Jumiye baru diketahui tidak memiliki KTP saat ia mengurus surat kematian suaminya. Ia tidak tahu kalau KTP-nya hilang dan perlu diurus. Karena identitasnya tidak lengkap, Mbah Jumiye pun kesulitan mengakses jaminan kesehatan.

Kondisi Mbah Mento Sariyah lebih menyedihkan. Berusia 102 tahun, ia tinggal sendirian di rumahnya dengan kondisi lemah. Ia sudah tak bisa bangun dari tempat tidur. Tetangga lah yang tergerak untuk mengurusnya sehari-hari.

Para lansia soliter ini rata-rata ditinggal pasangan karena cerai atau meninggal. Bagi yang punya anak, sebagian besar ditinggal oleh anak-anaknya yang merantau ke kota lain. Untuk kebutuhan hidup, sebagian dari mereka yang masih mampu bekerja mengais nafkah dengan menjadi buruh tani, berdagang, beternak, dan lainnya. Penghasilan tersebut tak sepenuhnya bisa

mencukupi kebutuhan mereka. Separuh lansia lainnya hanya mengandalkan dari kiriman anak-anaknya di perantauan. Sebagian lagi, bahkan menunggu kebaikan hati tetangga, yang selama ini merupakan orang-orang terdekat secara fisik yang dimiliki oleh mereka.

Tidak semua keluarga mampu menempatkan lansia sebagaimana mestinya. Berkurangnya kemampuan fisik dan mental membuat posisi lansia menjadi serba salah di dalam keluarga. Bahkan, tak jarang mereka malah menjadi beban tersendiri bagi keluarga yang tinggal dalam satu rumah tangga. Keterasingan di tengah keluarga sendiri kerap dirasakan lansia.

Di sisi lain, ruang atau kegiatan bersama yang bisa diikuti lansia masih minim. Walau beberapa lokasi mampu membuat kegiatan Posyandu Lansia, senam khusus lansia, serta kegiatan khusus lansia lain; jumlahnya begitu sedikit. Sebagian besar lansia belum memiliki ruang, baik yang diinisiasi masyarakat atau pemerintah.

Para ibu rumah tangga dan perempuan muda yang sebelumnya terlibat sebagai pewawancara dalam riset tersebut, akhirnya membentuk diri menjadi *support system* bagi lansia soliter di Gunungkidul yang bernama GERAK Solidaritas. Mereka tergerak untuk membantu para lansia dan kemudian menjadi ujung tombak melakukan penjangkuan para lansia soliter di Gunungkidul.

Sapta menjelaskan bahwa peran dari para pendamping ini cukup besar, “Para relawan pendamping ini menjangkau lansia soliter yang hidup sendiri dan tidak memiliki HP. Mereka menengok bergantian bila ada tetangga yang hidup sendirian. Mereka juga mengabarkan jika ada sesuatu yang dibutuhkan,” ujarnya.

Pada November 2022, GERAK Solidaritas membentuk Senior Support Center yang diberi nama Megarsore. SCC Megarsore ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat kepada lansia soliter yang membutuhkan dukungan khusus. Ibu Sumirah, salah satu tokoh masyarakat di desa setempat kemudian menjadi coordinator lansia SSC Megarsore. Sementara itu sebagai koordinator utama SSC Megarsore adalah Tisan Nur Cahyani dari tim muda pendukung lansia.

**“SSC Megarsore berfungsi sebagai titik kumpul bagi para lansia soliter dan para relawan. Di sinilah kemudian berbagai persoalan-persoalan kelansiaan dibahas,”** ujar Sapta.

Ia menyebutkan, dengan adanya komunitas ini maka pendampingan terhadap para lansia soliter semakin rutin dilakukan.

“Dengan adanya komunitas ini mereka rutin mengunjungi Mbah Mento. Mengurus makanan hingga memandikan. Hingga ketika Mbah Mento meninggal, warga pula yang bergotong royong untuk mengurusnya,”

sebutnya. Sebuah pengalaman menarik lainnya diceritakan oleh Sapta, bagaimana warga bergotong-royong untuk membangun kamar mandi yang layak di rumah salah seorang lansia soliter.

Mami Tata yang banyak memberikan pelatihan advokasi di SSC Megarsore menuturkan bahwa persoalan lansia tak hanya dialami oleh masyarakat ekonomi rendah, namun lansia yang berasal dari keluarga yang mampu pun mengalami persoalan kesepian dan kurang perhatian.

“Saya pernah bertemu seorang lansia yang anaknya merantau ke luar kota. Sementara cucunya sehari-hari kuliah. Tidak ada



yang memedulikan. *Dicuekin*. Itu tingkat stresnya tinggi. Mereka butuh teman *ngobrol*, butuh merasa *diuwongke*<sup>1</sup>,” ujar Mami Tata.

SSC Megarsore menjadi titik simpul para lansia dan relawan pendamping untuk bertemu dan berdiskusi membahas segala persoalan lansia. Pertemuan rutin dilakukan setiap minggu sekali untuk bertukar informasi dan saling menguatkan.

Tim SSC Megarsore juga rutin melakukan jangkauan kepada para lansia soliter untuk memetakan kebutuhan mereka, menjadi teman bercerita dan membuka komunikasi kembali dengan keluarga dan tetangga terdekat.

Persoalan ketiadaan KTP banyak dialami oleh lansia sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Ada yang memang tidak punya KTP atau KTP-nya hilang, ada juga yang data-datanya tidak sinkron sehingga ketika jatuh sakit mereka kerepotan untuk mengakses layanan kesehatan. Untuk itu SSC Megarsore juga membantu lansia soliter mengurus berkas-berkas administrasi seperti KTP dan jaminan kesehatan (BPJS).

---

1 dimanusiakan

Mereka juga mengkomunikasikan dengan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil (Dukcapil) atau pemerintah setempat untuk memberikan dukungan terhadap kebutuhan lansia, khususnya lansia soliter.

Proses mengedukasi pentingnya KTP terhadap para lansia ini juga bukan perkara mudah. Mami Tata, yang memiliki banyak pengalaman mengurus hal serupa di WCC, lantas diajak untuk bertukar pengalaman dan memotivasi teman-teman Megarsore.

Sebagai transpuan, Mama Tata tidak mengalami kesulitan ketika pertama terjun di Gunungkidul. Karena di awal program berjalan, ERAT Indonesia membuat sebuah forum diskusi untuk mempertemukan perwakilan dari SSC Teratai dan SSC Megarsore. Di forum itulah Mami Tata pertama kali bertemu dengan para relawan pendamping SSC Megarsore.

**“Kita menggarap hak dasar dulu. Saya jelaskan apa pentingnya punya KTP, juga apa itu BPJS Mandiri dan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kalau BPJS Mandiri dibayar secara mandiri,**

BPJS PBI dibayarkan pemerintah dari anggaran Kemensos dan APBD dari kabupaten setempat. Kita berikan edukasi dulu kepada mbah-mbah dengan bahasa yang paling mudah,” ujar Mami Tata.

Ia mengajak para lansia yang masih leluasa beraktivitas untuk mendampingi lansia lainnya mengurus KTP atau BPJS. Hal ini ia lakukan bukan tanpa alasan.

“Saya sampaikan, kalau Mbah sendiri yang maju ke Dukcapil itu efeknya luar biasa. Ini Mbah-nya saja mau membantu mendampingi sesama lansia mengurus dokumen, masa sebagai Dukcapil tidak mau membantu?” ujar Mami Tata.

Ternyata cara ini cukup mujarab. Para mbah-mbah turut senang karena dapat membantu sesama lansia lainnya.

“Aku jadi merasa berguna,”

ujar mereka, seperti ditirukan oleh Mami Tata. Menurutnya, perasaan dibutuhkan dan berguna itu sangat penting bagi lansia, karena selama ini mereka kerap dianggap tidak produktif dan hanya merepotkan.

Diskusi tentang pentingnya dokumen adminduk juga dilakukan di SSC Megarsore dengan menghadirkan pihak dari Dinas Sosial dan Dukcapil. Pada tahun 2023, SSC Megarsore sudah mendampingi 17 lansia yang memiliki kendala kependudukan, sampai akhirnya sudah bisa menggunakan Jaminan Keselamatan Nasional (KJN) atau BPJS.

Hingga kini, tim SSC Megarsore masih kerap mengontak Mami Tata via grup Whatsapp,

“Biasanya mereka berkonsultasi soal BPJS dan cara mengakses bantuan sosial,” imbuhnya.

### **Jadi Manusia Berkarya**

Kehadiran SSC Teratai dan SSC Megarsore telah memberikan sejumlah dampak kepada para lansia transpuan dan lansia soliter. Mereka kini menikmati hak dasarnya, yakni bisa menikmati masa tua dengan bahagia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Mami Tata,

“Mereka merasa kualitas hidupnya lebih baik. Jadi manusia yang berkarya. Bisa berinteraksi dengan yang lain dan bisa berbuat lebih berguna. Mereka bisa membantu teman itu ya akhirnya terpicu, bahwa aku harus sehat. Bahwa tua itu bukan renta,” ujarnya.

Ia juga menambahkan betapa senangnya para lansia ketika nama mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

“Mereka senang sekali. Biasanya aku cuma bisa lihat saja, tidak bisa nyoblos karena tidak punya KTP,”

tambahnya, menirukan pernyataan para simbah yang di Gunung Kidul.

“Hak per individu yang harus dikerjakan dulu. Dengan

adanya KTP, maka akses BPJS, dan bantuan soal lain bisa tertangani,” tambah Mami Tata.

Mami Tata juga menyebutkan, bahwa adanya SSC Teratai telah membuat para transpuan lansia merasa terlindungi.

“Mereka jadi terlindungi. Mereka dapat menjalani masa tua yang jauh lebih berkualitas, karena ada yang mengayomi,” ujarnya.

Di sisi lain, Sapta menyebutkan bahwa adanya SSC telah membangkitkan semangat warga, dari anak-anak hingga pra-lansia untuk mendukung kegiatan lansia di desa setempat.

“Dengan adanya dorongan dan semangat masyarakat setempat, para lansia menjadi termotivasi untuk saling bersosialisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa selain manfaat yang dirasakan bagi para lansia soliter, kemajuan

serupa juga dialami oleh para relawan pendamping yang sebagian besar adalah perempuan.

“Mereka adalah agen-agen yang menemani dan mendampingi para lansia soliter secara langsung. Mendampingi lansia, kebutuhan mutlakny adalah mau mendengar, dan ibu-ibu ini lebih punya kemampuan mendengar. Mereka punya kekuatan untuk bertemu dalam aspek kemanusiaan. Di sisi lain ada aspek menguntungkan lainnya, karena mereka yang semula ibu rumah tangga di rumah saja, tidak banyak bertemu kelompok lain, kemudian dapat bertemu jaringan dan juga orang-orang dari Dinas. Hal itu tentu menguatkan dan membuat

mereka lebih percaya diri,”

ujar Sapta.

Dampak lainnya juga terlihat pada perluasan jejaring ERAT Indonesia baik di pemerintahan daerah, akademisi dan jaringan masyarakat sipil.

“Proses membangun keberdayaan lansia ini melebihi ekspektasi kami di awal. Jika pada Oktober 2021 kami masih merancang, kini kami sudah banyak dikenal orang, dan dilibatkan oleh *stakeholders*. Jaringan lainnya adalah dari pihak kampus.”

“Kami telah merintis kerjasama dengan kampus Universitas Gunung Kidul (UGK) terkait upaya pemberdayaan lansia. Meskipun sampai saat ini Memorandum of Understanding (MoU) belum hadir, kami merencanakan hal

tersebut dapat dilanjutkan di tahun 2024. Sementara itu, kami juga telah membuat MoU dengan Lingnan University, Hongkong, untuk mengembangkan *age friendly city* di Gunungkidul, adaptasi dari Hongkong,” tambahnya.

Sapta menambahkan, program ini juga memungkinkan mereka meningkat dalam kapasitas advokasi kebijakan. Jika advokasi kebijakan terkait transpuan lebih banyak bertumpu pada peran Mami Rully dan Mami Tata yang sangat berpengalaman dan telah memiliki jejaring kuat, di Gunungkidul proses advokasi tersebut benar-benar dimulai bawah dengan menggerakkan para ibu relawan, hingga akhirnya diperhatikan dan akhirnya dilibatkan oleh para *stakeholder* dan akhirnya dilibatkan.

Dukungan program dari Voice Global sangat dirasakan oleh ERAT Indonesia. “ERAT organisasi yang relatif baru. Ruang aman bagi transpuan lansia adalah isu yang baru dan

bagaimana Hivos menerima isu ini dan mendukung sangat luar biasa. Demikian juga capaian di Gunungkidul di mana akhirnya kami makin berkembang dan jaringan meluas,” ujarnya.

Upaya penjangkauan terhadap para lansia rentan dalam program ini tidak hanya bermanfaat bagi para lansia saja, melainkan juga bagi ERAT Indonesia. Proses interaksi bersama para lansia telah menjadi proses belajar yang sangat berharga baik secara personal sebagai organiser/penjangkau maupun sebagai organisasi pendukung lansia.

Para penjangkau, yang terdiri dari lintas generasi memiliki pengalaman untuk berinteraksi dan mendengarkan cerita para lansia, meraih nilai-nilai baru, dan mendapatkan penguatan personal setelah memahami kuatnya perjuangan hidup para lansia tersebut.

“ERAT Indonesia merasakan penguatan pemahaman dan kesadaran sebagai manfaat bertemu lansia yang punya

beragam ilmu, pantang menyerah, juga penyintas beragam kejadian di masa lalu,” lanjut Sapta.

Sementara menurut Mami Tata salah satu poin penting lainnya adalah tentang peningkatan kapasitas pada manajemen program dan manajemen keuangan.

“Dana itu bukan segalanya, dari dana itu efektif kita gunakan,” ujarnya.

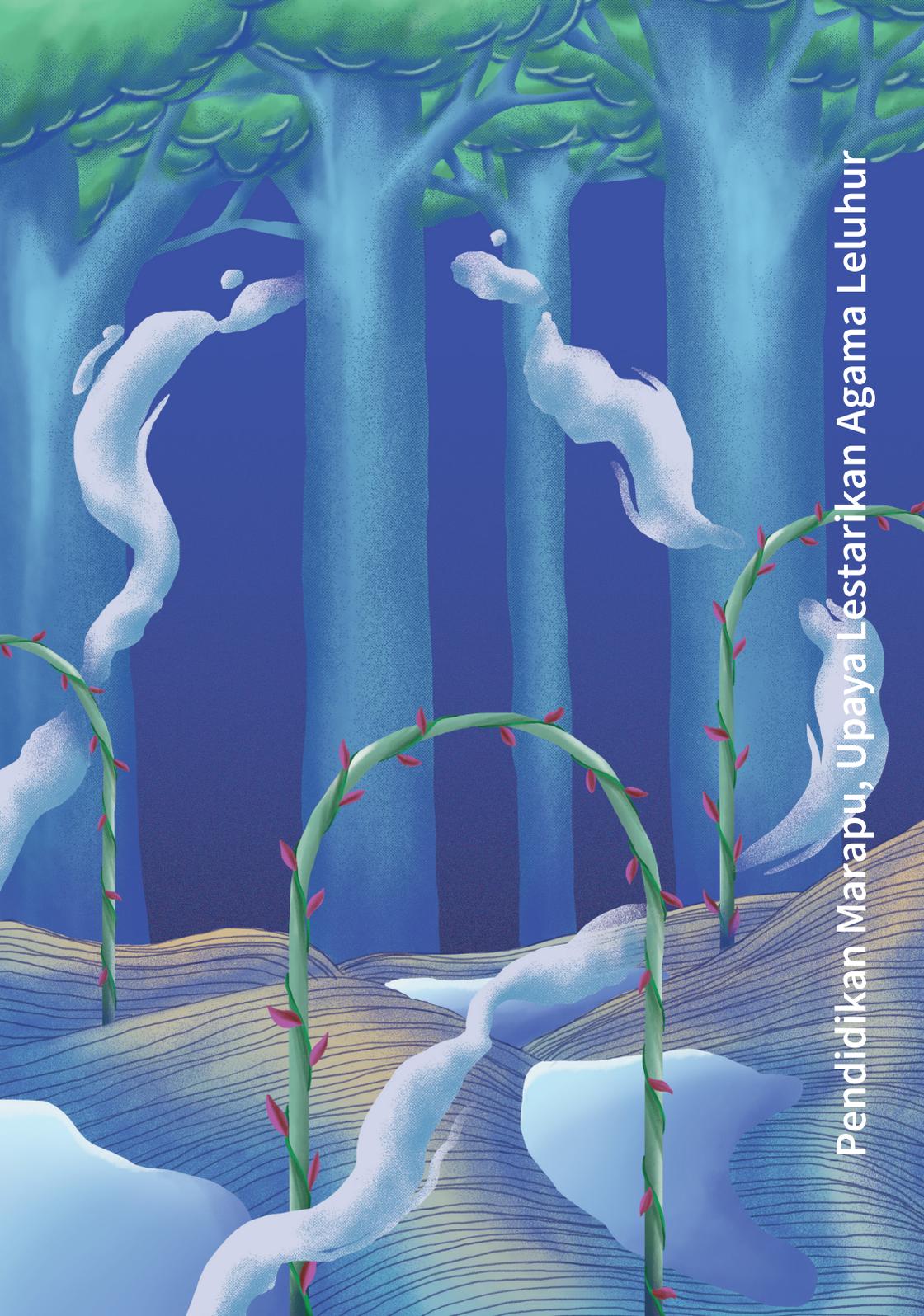
Atas keberhasilan inisiatif untuk transpuan lansia dalam mengelola SSC Teratai, Mami Rully diundang sebagai menjadi mitra penerima hibah untuk berpartisipasi dalam Konferensi ILGA Asia ke-9 di Ho Chi Minh, Vietnam pada 28 November-2 Desember 2022. Di hadapan seluruh peserta di forum tersebut, Mami Rully mempresentasikan tentang pengalaman di WCC dan SSC Teratai dalam upaya mengelola komunitas transpuan lansia.

Kendati bukan untuk pertama kali berbicara di forum internasional, namun Konferensi ILGA Asia tersebut membuatnya terkesan. Ia bertemu dengan mitra-mitra Hivos yang lain.



“Saya berharap akan ada lebih banyak kerjasama dalam aspek penguatan kapasitas dan proses pembelajaran bersama yang diterapkan dalam strategi dan program untuk mendukung kelompok queer, khususnya pada isu transgender lansia, sehingga kita dapat mencapai kesetaraan dalam hal keadilan sosial,”

ujar Mami Rully di forum tersebut.



Pendidikan Marapu, Upaya Lestarikan Agama Leluhur

# Pendidikan Marapu, Upaya Lestarikan Agama Leluhur

*Oleh: Anton Jawamara dan Roni Seran*

Tanggal 6 September 2023 adalah sebuah momen penting di Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Hari itu, Sekolah Adat Marapu Desa Kamanggih diresmikan oleh Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Sjamsul Hadi, SH, MM.

Sekolah adat ini merupakan inisiatif dari masyarakat Penghayat Marapu di Desa Kamanggih dengan tujuan utama melestarikan budaya Sumba Timur yang kaya akan nilai-nilai spiritual dan moral.

Sjamsul Hadi menyatakan bahwa pemerintah sangat mendukung upaya pemajuan budaya yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kamanggih. Kemdikbudristek RI siap bekerjasama untuk mendukung perkembangan positif ini.

“Semoga kehadiran sekolah adat Marapu bisa menjadi percontohan di wilayah Pulau Sumba dan wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur,” ujarnya dalam kata sambutan.

Acara berlangsung meriah. Diiringi oleh Tarian Kandingang dari Sekolah Adat Marapu Desa Kamanggih. Tari Kandingang adalah tarian tradisional dari Sumba Timur, biasa dimainkan oleh penari perempuan dan kerap ditampilkan di berbagai acara adat, perkawinan, penyambutan dan acara budaya lainnya.

Program Sekolah Adat ini adalah kerjasama antara Sumba Integrated Development (SID), Yayasan Marungga yang didukung oleh Voice Global lewat Program Lii Marapu dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi cq. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat (Dit. KMA).

Program Lii Marapu bertujuan untuk memperkuat penghayat Marapu dalam mengakses hak-hak sipil. Pendirian Sekolah Adat Marapu, sebagai salah satu kegiatan dari Program Lii Marapu adalah upaya untuk melestarikan adat budaya Marapu. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab masyarakat Marapu terhadap lelehur untuk mentransfer pengetahuan adat dan budaya Sumba khususnya Marapu bagi generasi muda.

Anton Jawamara adalah Program Manajer di SID. Ia menjelaskan bahwa program ini berlangsung mulai dari September 2021 hingga Agustus 2023. Ada empat tujuan utama yang dilakukan

dalam program Lii Marapu, diantaranya adalah penguatan kelembagaan kepengurusan Marapu baik di level kabupaten maupun di tingkat desa, adanya layanan pendidikan formal dan non formal, serta penguatan advokasi kebijakan. Pada level penguatan kelembagaan, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi lembaga Marapu di tingkat kabupaten.

“Selama ini kepengurusan Marapu sudah dilegalisasi oleh Kemendikbud RI tapi pengurusannya tidak aktif. Hanya ada ketua, wakil ketua dan bendahara. Kami memandang penting untuk menambah struktur bidang. Yang semula hanya lima orang kini menjadi 21 orang. Di dalam struktur tersebut juga ada pelibatan orang muda dan perempuan,”

ujar Anton. Bentuk peningkatan kapasitas lain yang dilakukan adalah dalam manajemen pengelolaan organisasi.

Penguatan kelembagaan juga dilakukan di level desa dengan tetap di bawah koordinasi kepengurusan kabupaten. Dibentuk struktur dan program kerja yang membawahi bidang sosial budaya, pendidikan, advokasi dan pengembangan sumber daya manusia. Mereka mulai mengakses layanan adminduk mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran. Warga mulai sadar akan haknya. Implikasi positifnya adalah jangkauan wilayah terkait dengan pengakuan negara pun mulai meluas.

Anton menyebut jumlah penghayat Marapu di Kabupaten Sumba Timur adalah 17.450 orang. Dari jumlah tersebut, yang wajib KTP sebanyak 12.755 orang. Hingga pertengahan 2023, sudah 12.500 orang (98% dari 12.755 orang) yang melakukan perekaman e-KTP. Tersisa 255 orang yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Adanya penguatan kelembagaan tersebut telah memperkuat upaya agar penghayat Marapu dapat mengakses hak-hak sipil, termasuk dengan pendirian Sekolah Adat Marapu adalah guna melestarikan adat budaya Marapu. Para tokoh adat dan pemimpin agama Marapu di wilayah tersebut telah menyadari pentingnya transfer pengetahuan dari generasi tua ke generasi muda, dan mereka mengakui bahwa ini memerlukan upaya sistematis melalui pendidikan formal dan non-formal.

Anton menyebut, di awal program, yakni pada bulan Desember 2021, ia mendatangi para tokoh adat Marapu di Kampung Raja Prailiu. Kampung ini merupakan satu-satunya kampung adat yang terletak di tengah Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Di kampung itu Marapu tetap hidup dan tumbuh.

Ia menjumpai Umbu Remi (41), putra asli Kampung Raja Prailiu, seorang penghayat kepercayaan Marapu.

“Saya sekeluarga adalah penghayat kepercayaan Marapu yang merupakan agama asli orang Sumba. Saya sangat bangga menjadi seorang Marapu, agama leluhur, yang sudah ada jauh sebelum negara ini ada,”

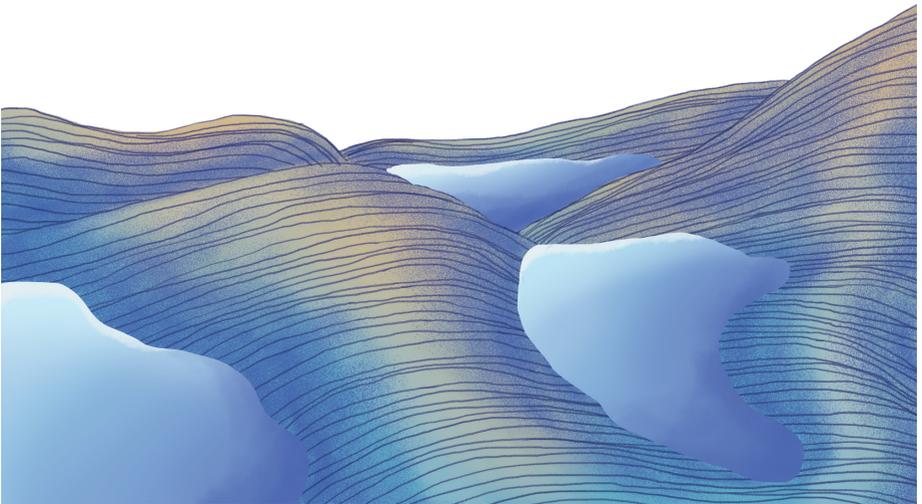
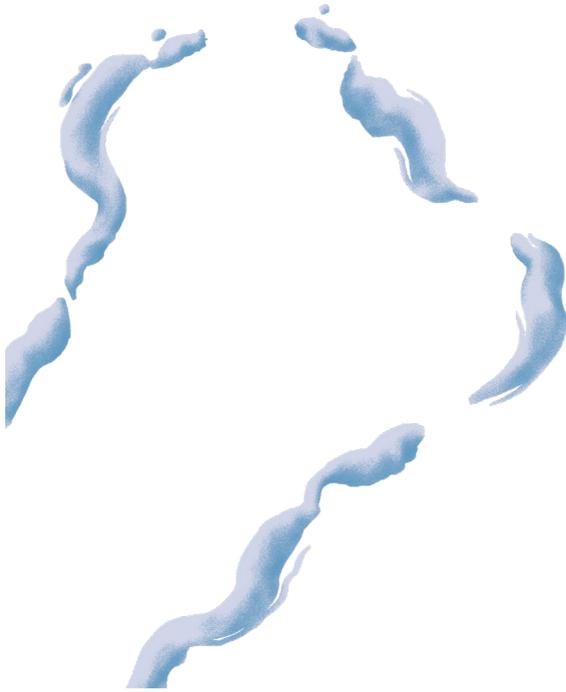
tutur Umbu Remi, seperti dituturkan oleh Anton.

“Marapu adalah agama asli Orang Sumba, semua nilai-nilai kehidupan pada agama modern juga ada pada Marapu. Prinsip

yang diturunkan dari Marapu menjangkau seluruh tatanan kehidupan. Tujuannya untuk menata pola perilaku individu dan masyarakat demi tercapainya ketenteraman, kesejahteraan dan keseimbangan dengan semua unsur alam. Nah, kalau ini ada dalam Marapu, kenapa saya harus beralih kepada kepercayaan yang lain?” tambahnya.

Kepada Anton, Umbu Remi juga berkisah bahwa ia tidak mendapatkan hak atas pendidikan agama ketika masih duduk di bangku sekolah. Ia menceritakan bagaimana dirinya terpaksa harus mengikuti mata pelajaran salah satu agama mayoritas karena Marapu tidak masuk dalam daftar pelajaran agama di sekolahnya.

Umbu Remi adalah seorang penganut agama leluhur yang sadar atas haknya sebagai warga negara. Ia tahu betul bahwa pendidikan merupakan salah satu hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara sesuai dengan



amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar. Ia juga paham bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memperluas makna agama termasuk di dalamnya Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, Marapu dan penghayat Marapu mendapat pengakuan negara dan memiliki hak-hak yang setara dengan penganut agama lainnya. Dengan demikian maka kolom agama di dokumen administrasi kependudukannya tidak boleh lagi dikosongkan.

Sebagai implementasi dari putusan MK tersebut, pada 2016, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga telah menerbitkan Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan bagi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hal itu merupakan peluang agar masyarakat Marapu, terutama anak-anak sekolah, memperoleh hak pendidikannya. Kepada Anton, Uumbu Remi berharap agar pengalamannya sebagai kaum terpinggirkan tidak terulang lagi kepada orang lain.

**“Negara harus hadir dan menjalankan kewajibannya memenuhi hak pendidikan penghayat Marapu sesuai**

dengan kepercayaan yang diyakini,” ungkapnya.

### **Marapu, Agama Leluhur di Sumba**

Ajaran Marapu yang mengatur adanya keselarasan hidup dengan alam adalah jiwa budaya orang Sumba. Marapu merupakan kepercayaan atau agama asli orang Sumba yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum agama Abrahamik masuk ke Indonesia. Marapu secara harafiah berarti “yang sudah tuntas”. Ini dapat berarti nenek moyang atau leluhur.

Penghayat Marapu memuja leluhur sebagai perantara mereka dengan Tuhan. Mereka meyakini bahwa Marapu adalah nenek moyang mereka yang dianggap sebagai jalan, perantara doa, atau Roh yang menyampaikan permohonan kepada Sang Pencipta. Penghayat Marapu menjalankan ibadah yang dikenal dengan istilah Hamayang (sembahyang) di beberapa tempat.

Penghayat Marapu percaya akan trigonologi atau hubungan tiga elemen, yaitu Manusia dengan Sang Pencipta, Manusia dengan Alam, dan Manusia dengan sesamanya. Mereka menganggap penting menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi penghayat Marapu, etika kehidupan, larangan-larangan, dan kewajiban

adat merupakan hal utama yang harus dijalankan dalam kehidupan mereka.

Sebelum pengakuan resmi terhadap Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penghayat kepercayaan seperti Marapu di pulau Sumba mengalami diskriminasi. Mereka dianggap kafir, penyembah berhala, atau warga kelas dua, dan belum mendapatkan hak-hak seperti layanan sosial dan pendidikan.

Hingga pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai pengakuan negara terhadap Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah Marapu. Putusan ini memberikan ruang yang lebih baik bagi penghayat Marapu untuk mendapatkan layanan sosial dan pendidikan. Meskipun demikian, pada tahap ini, masih terdapat penghayat Marapu yang kurang percaya diri atau pesimis karena mereka belum sepenuhnya menyadari bahwa keberadaan mereka diakui oleh negara.

Kendati merupakan kepercayaan asli Sumba, Marapu tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Bertahun-tahun pula, ribuan anak-anak Marapu di Sumba tidak terpapar pendidikan kepercayaannya sendiri di sekolah formal. Satu-satunya pilihan adalah mengikuti pelajaran agama resmi yang diakui pemerintah. Bahkan,

beberapa penghayat Marapu justru mendapat diskriminasi di lingkungan sekolahnya jika tidak mengikuti pelajaran agama lain. Kondisi tersebut ini perlahan-lahan berubah.

### **Penyuluh Marapu Hadir di Sekolah Formal**

Pada tahun 2016, sebagai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 tahun 2016, muncul Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidik. Permendikbud tersebut, mengatur hak layanan pendidikan dan pembelajaran bagi penghayat kepercayaan. Di antaranya menyebutkan bahwa harus ada tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru (pamong belajar) sesuai dengan kekhususannya, serta adanya kurikulum muatan pendidikan kepercayaan yang memiliki kompetensi inti dan kompetensi dasar, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan buku teks pelajaran.

Namun, kendati telah ada aturan di tingkat pusat, implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya dapat terwujud. Belum ada kebijakan daerah yang memperkuat regulasi di level daerah untuk mendukung layanan pendidikan tersebut. Hal inilah yang menjadi latar belakang perlunya melakukan intervensi. Agar penyediaan pendidikan kepercayaan ini bisa berjalan,

pemerintah pusat maupun daerah dan sekolah perlu bekerja sama dengan organisasi penghayat yang telah terdaftar di daerah tersebut.

“Kondisi riil di lapangan tidak ada layanan pendidikan di sekolah terkait agama atau kepercayaan. Padahal diatur bahwa di setiap peserta didik dia harus mendapatkan layanan pendidikan. Ternyata anak-anak di sekolah formal mendapat pendidikan agama yang bukan kepercayaan, misalnya di Marapu anak-anak ikut pelajaran agama Kristen,” ujar Anton.

Program Lii Marapu tidak hanya membantu tersedianya pendidikan Marapu di sekolah, melainkan juga membantu mencari dan mendidik penyuluh Marapu yang nantinya disebar di sekolah-sekolah. Mencari dan mendidik tenaga penyuluh merupakan salah satu tantangan. Proyek Lii Marapu kemudian menggandeng Kemendikbudristek RI dengan mengadakan

bimbingan teknis untuk calon penyuluh Marapu.

Tantangan terbesar adalah soal teknologi, karena 90% tenaga pengajar adalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang masih belum familiar menggunakan perangkat laptop untuk membuat bahan ajar dan menyusun laporan.

“Mereka masih sulit untuk menyusun laporan dengan menggunakan *template* yang disediakan oleh Kementerian,”

tambah Anton. Untuk itulah tim Lii Marapu juga melakukan pendampingan kepada penyuluh, pun hingga pada proses menyusun laporan. Setelah beberapa bulan melakukan pendampingan, pada bulan keenam, para penyuluh telah dapat menyusun laporan sendiri.

“Memang sulit, ini soal tanggung jawab moril kami. Kami kumpulkan mereka, mari kita latihan-latihan ulang bagaimana membuat laporan. Kami selenggarakan di salah satu

sekolah..” tambah Anton.

Pihaknya juga melakukan advokasi terkait minimnya uang transportasi yang diberikan kepada penyuluh, yakni Rp300.000,- setiap bulannya.

“Kami juga melakukan advokasi juga ke provinsi, dan mendorong sekolah untuk mengalokasikan anggaran dari internal sekolah, menjadi Rp500.000,-,” tambahnya.

Adanya penyuluh tersebut telah membantu siswa untuk mendapatkan haknya, yakni mendapatkan pengajaran sesuai dengan kepercayaannya. Salah seorang penyuluh juga mengaku merasa bangga bisa terlibat menjadi penyuluh di sekolah-sekolah.

“Saya bersyukur ketika menjadi penyuluh, karena ini untuk pertama kalinya. Saya juga merasa ada kebanggaan ketika kepercayaan dan budaya kami dapat kami transfer untuk anak

didik kami...”

ujar salah satu penyuluh, seperti ditirukan oleh Anton.

Sementara itu, salah seorang siswa di SMAN 1 Rindi Umalulu menyampaikan rasa senangnya bisa mendapatkan pelajaran sesuai dengan kepercayaannya.

“Saya bersyukur sekali sudah ada guru dan ada mata pelajaran penghayat. Kami sangat terbantu. Kami bukan hanya tahu tentang identitas kami sebagai penghayat tapi kami diajari juga nilai-nilai leluhur kami,”

ujarnya, seperti dituturkan oleh Anton.

Saat ini, sudah ada 20 penyuluh Marapu yang tersebar di enam sekolah formal. Ini terdiri dari enam SMA yaitu SMAN 1 Rindi Umalulu, SMAN 1 Haharu, SMAN 1 Kahaungu Eti, dan SMAN 1 Rindi. Sementara, ada dua SD yaitu SDN Wainggai dan SDN Nari.

Lii Marapu juga berhasil mengadvokasi keluarnya Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2023 tentang

Layanan Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumba Timur.

### **Berdirinya Lima Sekolah Adat**

Para tokoh adat dan pemimpin agama Marapu menyadari pentingnya transfer pengetahuan dari generasi tua ke generasi muda. Mereka mengakui bahwa ini memerlukan upaya sistematis melalui pendidikan formal dan non-formal. Untuk itulah mulai diusulkan adanya Sekolah Adat, yang menyasar anak-anak yang tidak terjangkau dengan sekolah-sekolah formal.

Program Sekolah Adat diawali pada Februari 2023 dengan membuka sekolah adat di lima desa, diantaranya Sekolah Adat Marapu Desa Kamanggih, Sekolah Adat Marapu Desa Hambapraing, Sekolah Adat Marapu Desa Pambotanjara, Sekolah Adat Marapu Desa Watupuda, dan Sekolah Adat Marapu Desa Tamburi.

Di Desa Kamanggih yang terletak di Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, sekolah berlangsung sekali dalam seminggu. Anak-anak yang bersekolah antara umur 7-24 tahun. Biasanya kegiatan berlangsung antara 1,5 hingga dua jam. Sementara pengajarnya, dikenal sebagai fasilitator sekolah adat, ditentukan oleh Lembaga Adat di



kepengurusan desa. Ada sejumlah tema yang disepakati bersama tokoh adat untuk diajarkan untuk anak-anak, mulai dari tema sejarah, tarian adat, musik adat hingga bahasa.

“Bukan hanya agar mereka tahu adatnya itu tapi mereka juga bisa memahami maknanya.

Contohnya adalah soal tenun.

Di sekolah adat ini bukan hanya mengajar untuk menenun tapi juga anak-anak bisa memahami sejarah tenun dan makna yang terkandung dalam motifnya,”

ujar Anton. Hal yang sama ketika mereka belajar mengenai lagu. Bukan hanya mampu menghafal lagu saja tapi mereka juga diajarkan untuk memahami makna serta konteks ketika lagu itu dinyanyikan.

Sekolah adat di desa yang kehidupan warganya tergantung pada hasil tani dan ternak ini memiliki berbagai kurikulum lokal yang dikembangkan oleh Sumba Integrated Development dan Yayasan Marungga, antara lain, tarian, menenun, bahasa

sastra tradisional (*lawiti-luluk*), permainan tradisional, kerajinan tangan, dan ritual Marapu. Fasilitator yang membimbing anak-anak di sekolah ini adalah tokoh adat dan tokoh agama yang merupakan penduduk lokal.

Anton menuturkan bahwa transmisi pengetahuan lintas generasi terjadi lewat Sekolah Adat ini. Jika awalnya targetnya adalah untuk anak Marapu yang tidak bisa sekolah, kemudian juga menyasar kepada orangtua.

Salah seorang tokoh adat di Desa Kamanggih, Umbu Lamik Mangia, amat terkesan dengan proses di sekolah adat tersebut.

“Ada sesuatu hal yang dikenang anak cucu saya sebelum saya meninggal, yaitu saya mengajarkan pada mereka tentang nilai-nilai luhur Marapu...”

ujarnya, seperti ditirukan oleh Anton.

Sebelum ada bangunan lokasi, yang dipakai untuk kegiatan belajar adalah kantor desa, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Kemudian warga mengusulkan adanya bangunan fisik. Mereka

bergotong-royong membangun secara mandiri. Ada yang menyumbangkan material batu dan pasir, ada yang menyumbang kayu, ada pula yang menyumbang tenaga. Dari Kemendikbudristek RI membantu dengan alat musik, alat tenun dan sebagian sarana dan prasarana. Warga tampak bahagia ketika bangunan tersebut akhirnya diresmikan pada 6 September 2023.

Salah satu buah keberhasilan dari program ini adalah keberhasilan dari Badan Pengurus Marapu (BPM) mengadvokasi pemerintahan desa untuk mendapatkan anggaran bagi sekolah adat.

### **Sekolah Adat di Desa Tamburi**

Kisah manis dari program pendidikan non formal juga datang dari desa Tamburi, sebuah desa kecil di Kabupaten Sumba Timur, sekira 76 kilometer dari ibu kota kabupaten, Kota Waingapu. Desa ini terkenal karena masyarakatnya yang masih memegang teguh Marapu.

Sebagian besar penduduk di desa ini, mencapai 70 persen dari jumlah penduduk desa tersebut adalah penghayat Marapu. Mereka menjalankan ritual-ritual dan warisan budaya seperti tenun ikat dengan motif-motif asli Sumba Timur, serta pembuatan alat musik tradisional Sumba Timur seperti jungga humba dan gunggi.

Sejak tahun 2021, desa Tamburi merupakan

salah satu desa yang menjadi bagian dari wilayah pengembangan program Lii Marapu. Masyarakat desa, khususnya penghayat Marapu di sana, sangat mendukung program tersebut karena berhubungan erat dengan perlindungan dan pelestarian adat sekaligus kepercayaan asli orang Sumba. Demikian juga, pemerintah desa Tamburi sebagai pemerintahan terkecil di negara ini, turut ambil bagian atas pengakuan negara akan penghayat Marapu yang berada di desanya.

Masyarakat desa, khususnya penghayat Marapu di sana, sangat mendukung program tersebut karena berhubungan erat dengan perlindungan dan pelestarian adat sekaligus kepercayaan asli orang Sumba. Demikian juga, pemerintah desa Tamburi sebagai pemerintahan terkecil di negara ini, turut ambil bagian atas pengakuan negara akan penghayat Marapu yang berada di desanya.

Sebelum program Lii Marapu dilaksanakan, belum ada sekolah adat di desa ini, dan anggaran untuk mendukung kegiatan terkait kepercayaan Marapu sangat minim. Keterlibatan penganut Marapu dalam perencanaan desa juga minim karena tidak adanya Badan Pengurus Marapu di desa. Selain itu, akses ke layanan sosial seperti dokumen kependudukan dan layanan pendidikan untuk anak-anak yang berkeyakinan Marapu tidak tersedia di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Roni Seran dari Yayasan Marungga menyatakan bahwa pihak desa dalam proses Sekolah Adat sangat berperan penting. Ia mengingat perjalanan pada bulan Maret 2023. Bulan itu merupakan masa akhir dari musim hujan di pulau Sumba, namun, padang sabana masih menyuguhkan pemandangan yang segar berupa hamparan rumput hijau.

Hari itu, Roni Seran membuat janji dengan Lidu Lakinggela (33), biasa disebut Uumbu Tamu, kepala desa Tamburi, untuk berbincang tentang akses sosial dan pendidikan bagi penghayat Marapu di desanya. Kepala desa berusia muda ini sangat serius memperhatikan kehidupan penghayat Marapu di desanya.

Desa Tamburi telah mengalami transformasi yang signifikan. Uumbu Tamu, yang terpilih menjadi kepala desa pada tahun 2020, merespons positif Program Lii Marapu. Ia menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung kepercayaan, budaya, dan tradisi Marapu di desa ini.

“Kepada desa aktif berpartisipasi dalam kegiatan proyek. Kami berdiskusi dengan kepala desa, juga dengan pemimpin adat desa. Juga dalam pemilihan dan

pelantikan Badan Pengurus Marapu di desa, serta pelatihan advokasi dan perencanaan di Desa Tamburi,” ujar Roni.

Ia menambahkan bagaimana Kepala desa bekerja sama dengan BPM Kabupaten dan tim Lii Marapu untuk memantau dan membimbing kegiatan sekolah adat di desanya.

Guna memperoleh dukungan anggaran untuk mendukung penghayat Marapu bukanlah hal yang mudah. Roni menyebut berbagai upaya yang dilakukan. Diawali dengan melakukan lobi intensif antara pemerintah desa dan penghayat Marapu.

“Penghayat Marapu sendiri memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga mereka perlu dilatih agar dapat bersuara dengan percaya diri dan mengadvokasi hak-hak mereka dalam forum resmi di desa, seperti Musrenbang dusun, Musrenbang desa, dan

musrenbang kecamatan,”

tambah Roni.

Dari proses tersebut lahir kebijakan strategis untuk mendukung penghayat Marapu di Desa Tamburi, seperti Surat Keputusan Kepala Desa yang menetapkan penyelenggaraan Sekolah Adat Marapu. Selain itu, anggaran dana desa juga mendukung kebutuhan transportasi bagi fasilitator Sekolah Adat Marapu di Desa Tamburi. Pada anggaran pembangunan Desa tahun 2023, alokasi anggaran tersebut mencapai Rp24 juta rupiah.

“Budaya merupakan kebiasaan dan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang,”

ucap Uumbu Tamu saat bertemu dengan Roni.

“Ini seperti fondasi bagi masyarakat kami untuk menjalankan kehidupan sebagai orang Sumba,” imbuhnya.

Kini, saat ini, telah terdapat 62 anak yang rutin mengikuti kegiatan di sekolah adat. Di sekolah adat ini, anak-anak belajar banyak hal tentang budaya

Sumba dan kepercayaan Marapu, sesuai dengan buku panduan penyelenggaraan sekolah adat yang telah dikembangkan oleh program Lii Marapu.

Sebagai bagian dari generasi muda, Umbu Tamu juga menyampaikan harapan bahwa kepercayaan Marapu di desanya dapat tetap terjaga dan tumbuh subur.

**“Agar budaya dan adat istiadat masyarakat Sumba Timur yang diwariskan oleh nenek moyang dapat dijaga dan dilestarikan agar tetap menjadi landasan bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas kehidupan masyarakat Marapu,”**

tambah Umbu Tamu, seperti ditirukan oleh Roni Seran.

Kepala desa juga memberikan dukungan layanan lainnya seperti mendata masyarakat desa Tamburi yang berkepercayaan Marapu guna mengetahui kelengkapan administrasi kependudukan yang mereka miliki, seperti Kartu Keluarga dan Kartu Identitas kependudukan.

Dukungan ini dilakukan guna mengekskiskan kembali kepercayaan Marapu di desanya setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 tahun 2016 tentang pengakuan Negara akan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Marapu).

Sekolah adat di desa Kamanggih dan di desa Tamburi, adalah dua contoh dari lima desa lainnya yang telah mendirikan sekolah adat. Proses ini merupakan buah dari dukungan banyak pihak. Peran aktif pihak desa, serta masyarakat Marapu, serta dukungan dari program Voice semakin memperlancar prosesnya. Pada prosesnya kemudian, dukungan dari Kemdikbudristek RI semakin menambah pengakuan bagi masyarakat adat Marapu.

Anton menyebutkan, hingga kini telah ada replikasi di desa Kota Kawau, Kecamatan Kahaungu Eti. Semula, seorang penyuluh adat di SD yang menyaksikan proses Sekolah Adat yang dikembangkan di desa Kamanggih dan Tamburi tertarik dan mengundang para tokoh Marapu, pemerintah desa, dan tim Lii Marapu; sebelum akhirnya disepakati untuk mengembangkan Sekolah Adat di desanya.



Memperjuangkan  
Keadilan Sebaik-baiknya

# Memperjuangkan Keadilan Sebaik-baiknya

Oleh: Dian Septi Trisnanti

Suara hakim ketua lebih pelan dari lima kali sidang Pengadilan Hubungan Industrial sebelumnya. Intonasinya tak jelas. Lebih mirip suara orang berkumur. Hanya sedikit yang bisa ditangkap telinga dengan jelas. Sidang-sidang sebelumnya, Ika Ching biasanya didampingi Ita Purnamasari, perwakilan divisi advokasi Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI). Karena Ita Purnamasari sedang mendampingi kasus perburuhan lain di Bandung, di sidang putusan ini, Ika didampingi Ari Widiastari, juga dari FSBPI, lambat-lambat mendengar ucapan tak jelas hakim,

*“Dikabulkan sebagian.”*

Meski tak jelas mendengar, Ari lantas berbisik ke telinga Ika Ching, menjelaskan interpretasinya dan langkah berikutnya yang harus ditempuh Ika Ching,

*“kayaknya dikabulkan sebagian deh. Biasanya kalau kayak gitu, upah sisa kontrak dikabulkan tapi tuntutan lain seperti upah proses tidak dikabulkan, gitu.”* Upah

proses yang dimaksud adalah upah selama proses perselisihan yang jadi salah satu tuntutan.

Sesampainya di sekretariat buruh usai persidangan, keduanya menertawakan betapa konyolnya mereka yang tidak bisa mendengar dengan jelas putusan hakim. Aku bertemu Ika dan Ari sesampainya mereka di sekretariat.

Aku menambahkan langkah-langkah yang mesti disiapkan untuk tahap eksekusi. Bagaimana teknis bos Ika Ching membayar hakmu. Ika tampak lebih semangat. Senyum kecil tersungging di bibirnya. Di penghujung hari itu, Ika merasakan kelegaan luar biasa seolah beban berat terlepas dari pundaknya yang kurus. Ada harapan ia akan mendapat hak-haknya.

Baik Ika Ching ataupun kami dari Serikat Buruh Persatuan Indonesia yakin dengan informasi bahwa Ika Ching menang di pengadilan tingkat pertama. Karena yakin dikabulkan, kami tak melakukan verifikasi putusan ini dan juga tak mempersiapkan diri untuk melakukan banding yang jatuh temponya empat belas hari setelah putusan sidang.

“Karena yakin menang, kami tak mempersiapkan diri untuk melakukan banding,” kata

Ita Purnamasari, “Ini murni kesalahan kami karena tak melakukan verifikasi putusan.”

Harapan itu tak bertahan lama. Tepat empat belas hari setelah putusan Ika Ching bersama Ita Purnamasari mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka hendak memastikan: apakah bosnya mengajukan banding atau tidak?

Kenyataan pahit itu baru kami ketahui di pengadilan. Mereka tahunya putusan sidang Ika Ching adalah dikabulkan sebagian, namun sesampainya di pengadilan dia dapat informasi langsung kalau ditolak keseluruhan tuntutan.

“Kami awalnya datang untuk memastikan apakah pihak perusahaan melakukan banding atau tidak,” kata Ita Purnamasari.

“Setelah tahu kalau ditolak semua, aku sangat kaget. Apalagi waktu untuk mengajukan banding sudah habis. Ini

kesalahanku juga. Mengapa tak memeriksa lebih awal.”

Ita Purnamasari tak tahu bagaimana harus bersikap dan menyampaikan informasi ditolaknya tuntutan pada Ika Ching. Suasananya benar-benar tidak enak. Dia tahu, Ika sudah berusaha dengan maksimal, dengan segala keterbatasan dia, untuk memperoleh keadilan. Keberanian dia melakukan tuntutan sendiri. Tiba-tiba gagal di belakang banget.

Akhirnya dengan berat hati Ita mengatakan pada Ika Ching,

“Mbak, maaf sepertinya waktu itu ada yang salah informasi. Saat itu saya tahunya, dimenangkan sebagian. Ternyata ditolak semua. Sampai sekarang aku masih *nggak* tega.”

Karena ada lima kasus perburuhan lain yang sedang ditangani Ita di Jakarta dan Bandung. Ia tak membayangkan akan ada kejadian tersebut. Ia percaya betul informasi kalau kasus Ika Ching sudah dikabulkan sebagian. Karena sibuk dengan

kasus-kasus lainnya, Ita tak sempat memeriksa ulang hasil putusannya. Bahkan tak ketemu Ika Ching hingga dua minggu setelahnya.

“Kenapa aku tidak menanyakan sebelumnya. Kenapa baru tahu sekarang setelah masa banding sudah lewat.” Sesal Ita.

Setelah tahu informasi lisan keputusan tersebut langsung dari petugas satu pintu pengadilan, Ika tak tahu harus berbuat apa. Dia kecewa sekali, bahkan dia tak mengambil salinan fisik keputusan kasusnya. Mereka langsung pulang.

Berat bagi Ika untuk menerima putusan pengadilan ini. Terlalu banyak yang dia pikirkan, ia teringat dengan perjuangan menghadiri persidangan-persidangan ini telah menguras habis tabungannya, teringat dengan persediaan beras di kosnya yang menipis, uang kos yang harus segera dibayar, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang menanti untuk dilunasi.

### **Tak Dipercaya Ketika Susah**

Ika Ching sudah terbiasa kesepian sejak kecil di Semarang. Kedua orang tuanya meninggal saat dia belum memasuki sekolah dasar. Tak banyak

kenangan yang dia miliki bersama keduanya. Dia lantas diasuh oleh keluarganya hingga lulus SMA di Semarang dan pindah kuliah ke Yogyakarta dan mengambil jurusan Bahasa Inggris di Universitas Sanata Dharma.

Ada kejadian saat dia SMA yang menjadikan Ika trauma. Saat jam makan siang, dia berjalan bersama kawannya, kawannya di sisi jalan dan Ika di sisi dalam. Di ujung gang ada bajaj yang melintas dan melewati mereka. Di ujung gang bajaj putar balik dan kembali ke arah mereka, kawan Ika diraba pahanya sambil bajaj melaju.

“Aku hanya bisa teriak dan mengambil kerikil dan melempari bajaj,” tutur Ika Ching.

Kejadian itu bikin Ika trauma dan takut bersosialisasi dengan masyarakat.

“JANGAN bersosialisasi, mendengar bajaj saja, aku takut. Kalau denger suara bajaj aku langsung tengok. Kalau bawa barang, pasti langsung aku dekap,” tutur Ika Ching.

## “Sampai sekarang kalau sendiri aku tak berani naik bajaj.”

Dia tak menceritakan kejadian itu pada keluarganya, karena tak ingin menambah masalah. Dia pendam sendiri dan menjadi trauma hingga sekarang.

Tak ingin merepotkan keluarga lebih banyak lagi, setelah lulus kuliah tahun 2006, Ika lantas pindah dan mencari kerja dan hidup mandiri di Jakarta. Tak ada koneksi dan berjuang sendiri, tentu saja Ika mendapatkan pekerjaan seadanya. Meski bekerja di sektor mentereng, ekspor-impor, namun gajinya di bawah upah minimum provinsi dan tentu saja tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk menutup kebutuhan ini dia berdagang online.

Anggapan umum banyak orang adalah, orang-orang Tionghoa hidup mapan dan sejahtera. Anggapan ini tentu tak mengenakan bagi Ika Ching dan orang-orang Tionghoa lainnya, yang kurang beruntung secara finansial. Meski bekerja sebagai buruh kontrak dengan upah bulanan di bawah upah minimum dan jam kerja yang sering molor melebihi waktu kerja sebenarnya. Ika Ching tetap dianggap sebagai kelas menengah yang mapan dan hidup sejahtera.

Bagian paling pahit dari anggapan ini adalah saat dia kesulitan keuangan, karena hidup di ibukota di mana tiap gerak hidup memerlukan biaya, dia kesulitan mencari bantuan.

**“Orang-orang tidak percaya kalau aku hidup pas-pasan,”**

tutur Ika Ching.

Situasi seperti ini, yang dijalani di ibukota sejak lulus kuliah pada 2006, mengajari Ika Ching untuk tidak mengandalkan siapa pun dalam urusan finansial. Ia berhubungan dengan orang lain seperlunya saja. Dia juga terbiasa hidup hemat dan merencanakan tiap pengeluaran sehari-harinya dengan sangat hati-hati.

Untuk menutupi kebutuhan hariannya, Ika Ching membuat anyaman tali menjadi gelang-gelang cantik dan menjualnya secara online. Selain itu, dia juga menjadi *reseller* produk-produk rumah tangga, hingga rumah.

Ika merasa sudah cukup dibantu oleh keluarga-keluarganya di Semarang hingga lulus kuliah. Dia tak ingin merepotkan mereka lagi dengan berbagai keluhan beratnya hidup di Jakarta. Ia menjalani pahit-getirnya ibukota sendiri, tanpa berkeluh kesah pada siapa pun.

Kesempatan bekerja dengan gaji lumayan didapatkan Ika justru saat dunia menghadapi wabah COVID-19. Masih di bidang ekspor-impor, dia ditawari bagian pemeriksaan barang yang hendak dikirim. Tugasnya, mulai periksa alamat, jumlah barang dan lainnya. Dia ditawari gaji tujuh juta perbulan dengan kontrak setahun.

“Waktu kerja terakhir di Exim, saya bertanggungjawab mengurus proses exim dari awal sampai akhir. Dijanjikan oleh teman yang meminta tolong dengan gaji dua digit. Namun setelah *deal* dan mulai bekerja, saat tandatangan kontrak ternyata gaji tidak sesuai dan dikurangi jauh dari *deal* awal. Dan masih banyak lagi omongan yang cuma kebohongan,”

tutur Ika Ching.

Dengan tawaran upah segitu, Ika rela meninggalkan tempat kerja sebelumnya yang

memberinya gaji jauh di bawah upah minimum provinsi. Namun tak dinyana, justru dunia kerjanya yang baru tak seindah yang dibayangkan. Awalnya Ika merasa nyaman saja bekerja di tempat baru, meski jam kerja lebih panjang tanpa upah lembur, namun lama-kelamaan ia mulai diperlakukan secara tidak adil. Saat itu, Ika tidak tahu tentang haknya, bahkan ia tak menyadari kalau ia juga adalah buruh.

“Aku dibuang begitu saja, padahal aku sudah bekerja sampai larut malam, kadang sampai dini hari tanpa upah lembur,” ucapnya Ika.

### **Reuni Sedih Setelah 16 Tahun**

Aku dan Ika sama-sama kuliah Sastra Inggris di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Masuk tahun 2021 dan lulus tahun 2006. Saat itu, kami sama-sama dari luar daerah yang kuliah di Yogyakarta. Aku dari Rembang, sementara Ika dari Semarang. Aku hanya tahu keluarga besarnya di Semarang dan dia disekolahkan oleh tantenya.

Lulus kuliah kami sama-sama mengadu nasib di Jakarta namun kita tak pernah berhubungan. Hingga kejadian di penghujung COVID-19. Awalnya Ika mengirimkan pesan di inbox *Facebook*-ku.

Mengabarkan persoalan yang dihadapi dan menanyakan apakah kalau pekerja kantor bisa dibantu? Untuk lebih leluasa bicara, kami janji ketemu di Taman *Jogging* La Piazza, di Kelapa Gading.

Aku belum sadar betul, kalau kawan lamaku ini benar-benar terpuruk secara ekonomi dan tak punya duit sama sekali. Aku baru menyadari ketika janji ketemu di La Piazza dia jalan kaki hampir enam kilometer, dari halte busway Sunter, di Kelapa Gading ke tempat kami bertemu di La Piazza.

“Astaga! Kamu jalan kaki sejauh itu. Kalau kamu kasih tahu kan bisa aku jemput,”

kata-kata itu aku sampaikan padanya begitu kami bertemu. Dia masih mengatur nafasnya dan sesekali menyeka keringat di wajahnya.

“*Nggak papa,*” jawabnya singkat.

Setelah istirahat beberapa saat. Dia menceritakan kasusnya setahun terakhir ini. Ia berjuang sendiri melakukan mediasi di dinas ketenagakerjaan yang memediasi dia dan mantan bosnya. Hasilnya nihil. Dia kalah dalam proses itu.

Dia juga cerita tak ada kawan untuk menceritakan semua persoalan ini. Bagaimana dia hidup sebatang kara, karena tak ingin merepotkan keluarga. Dia sangat berharap aku bisa membantunya karena dia tahu kalau selama ini aku berkecimpung di isu perburuhan. Namun dia tak yakin apakah bisa dibantu atau tidak, pasalnya, dia bekerja kantor. Saat itu, dia masih meyakini, kalau pekerja kantor itu bukan buruh. Baginya, buruh itu hanya mereka yang bekerja di pabrik.

Pelan-pelan aku menjelaskan. Kalau tiap orang yang bekerja dan dapat upah bulanan, punya kontrak, punya jam kerja, ada bos itu adalah buruh.

Mendengar penjelasanku, dia senang.

“Aku kira buruh hanya yang kerja di pabrik. Seneng banget ketemu kamu!”

Mulailah Ika menceritakan kondisi kerjanya, dari soal jam kerja saja yang sering hingga larut malam hingga dini hari, hingga sikap semena-mena bosnya yang menyuruh karyawan bekerja di luar *job desc*.

“Aku bagian pemeriksaan barang yang akan dikirim. Tapi

sering disuruh ikut *packing* dan pekerjaan-pekerjaan lain di luar tugasku,” tutur Ika.

Kerja siang malam dengan jam kerja yang tidak tentu, tidak pernah dapat lemburan, harus bantu kerjaan-kerjaan bagian lain yang harus saat itu kelar. Bukan tak mau bantu, tapi kerjaan Ika Ching juga menumpuk dan tidak kelar-kelar, karena waktu habis untuk membantu mereka. Pekerjaan mereka, masih dapat bantuan dariku.

“Semua atas instruksi bos yang pecat aku. Jadi aku bisa apa? Biar pun kadang ada yang aku *pending* untuk bantu, tapi tetap saja itu bos mengejar-ngejarku, padahal bukan *job desk*-ku,”

jelas Ika Ching.

Hal itu, di kemudian hari berimbas pada pemutusan kontrak secara tiba-tiba tanpa surat peringatan. Alasan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), adalah bahwa Ika telah berkelakuan tidak baik. Padahal masa kontrak Ika masih 6 bulan lagi, dan pedihnya lagi, sisa upah kontrak Ika

tidak diberikan. Ia merasa diperlakukan tak adil, padahal selama pandemi, meski bekerja secara daring, Ika sama sekali tidak pernah absen *meeting*.

Tak terima diperlakukan tidak adil, beberapa kali Ika mengajukan bertemu dengan bos namun atasannya itu menolak bertemu. Hingga akhirnya, seorang diri, Ika mengadu ke suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Barat. Dari tiga kali mediasi yang ia jalani, bosnya hadir dengan diwakili pengacara. Setelah beberapa bulan, hasil mediasi di disnaker tak ada titik temu. Ika tetap menuntut haknya dan perusahaan tak mau membayarkan upah sisa kontrak enam bulan Ika. Karena buntu, disnaker menyarankan mereka untuk melanjutkan proses hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Ika Ching disarankan untuk mencari pengacara.

“Aku stress saat itu. Bagaimana mungkin aku membayar *lawyer*? Untuk sehari-hari saja aku sudah tidak ada pemasukan,”

suara Ika tersendat dan matanya berkaca-kaca.

“Dan itu beberapa bulan aku harus pindah-pindah kos. Sudah

tak sanggup hidup. Saking bingungnya, saking *nggak* tahu harus bagaimana. Aku merasa semua pintu tertutup. Aku waktu itu sampai berpikir mau mati saja. Karena kalau tidak bisa bayar kos pasti saya akan tinggal di luar. Tinggal di jalan.”

Sejak itu, semua pintu harapan seolah tertutup. Tak ada satu pun pengacara yang ditemuinya mau membela karena Ika hanya menjanjikan membayar bila menang kasus. Sementara, ia harus menjual semua barang berharganya, pindah kos ke tempat yang jauh lebih murah. Sebagai penghasilan tambahan, ia harus berjualan apa saja secara *online*. Mulai dari masker, aksesoris buatan sendiri dan banyak lagi. Pun, ia harus memasak sendiri, menakar hati-hati setiap butir nasi yang ia telan setiap hari demi harus berhemat.

Sesekali kutatap lekat-lekat sosok Ika yang duduk di hadapanku. Malam itu, kuantar dia dengan berkendara motor menuju halte busway Sunter, Kelapa Gading. Sepanjang jalan, bak sebuah adegan film, aku membayangkan Ika berjalan kaki dari halte busway Sunter, Kelapa Gading ke Taman

Jogging yang berjarak hampir enam kilometer. Dari keringat yang menetes dan membekas di wajah, tercatat jejak perjuangannya dalam perjalanan hidupnya yang keras.

### **Berjuang Di Meja Hijau Perburuhan**

Kasus-kasus perburuhan perseorangan semacam yang dihadapi Ika Ching ini marak terjadi di era pandemi di mana usaha-usaha kecil di sektor perumahan ini banyak banyak tumbuh dan mereka mempekerjakan karyawan dalam jumlah kecil. Ketika terjadi perselisihan perburuhan biasanya dilakukan secara pribadi.

Bagi Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), kasus-kasus seperti yang dihadapi Ika Ching ini dilematis dalam hal energi yang digunakan untuk melakukan advokasi terlalu besar untuk kasus individual. Tenaga tersebut akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk advokasi kasus-kasus yang melibatkan ratusan hingga ribuan buruh.

Namun, kasus-kasus semacam yang dihadapi Ika Ching ini makin banyak dan Serikat Buruh tak cukup tenaga untuk mengadvokasinya.

Belum lagi soal jarangnyanya para pekerja sektor perumahan ini tak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari buruh dan jarang sekali mereka yang berserikat. Kasus Ika Ching ini diadvokasi



lebih karena kedekatan personal kami. Lebih dari itu, pendampingan terhadap korban eksploitasi buruh perempuan dan kekerasan verbal dan tidak dipenuhi hak-hak perburuhan yang dialami oleh Ika Ching, adalah bagian dari kerja-kerja Konsorsium Advokasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 190.

Selama dua setengah tahun, terhitung sejak 2019, beberapa organisasi buruh, media dan perempuan membentuk Konsorsium Advokasi Konvensi ILO-190. Konsorsium ini dipimpin oleh Perempuan Mahardika dan beranggotakan: Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), Yayasan Konde, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) dan Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (Yapesdi).

Konsorsium ini bekerja utamanya untuk memperkokoh advokasi terhadap hak-hak buruh perempuan, utamanya pasca Konvensi International Labour Organization No. 190 tentang kekerasan dan pelecehan di tempat kerja dan rekomendasi No. 206.

Konvensi ILO ini hendak memastikan semua buruh terbebas dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Konvensi ini juga

memastikan semua negara anggota menghormati konvensi ini dengan melakukan tiga kewajiban. Utamanya, meratifikasi konvensi ini. Konsorsium ini mengampanyekan ratifikasi sekaligus penerapan konvensi ILO ini melalui dua jalur, yaitu lobi terhadap pembuat kebijakan dan kampanye media.

Saat Ika Ching datang menemuiku, dengan persoalan perburuhan yang dihadapi dan berharap bantuan, aku bekerja di Marsinah FM yang masih merupakan bagian dari Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI). Dalam bayanganku aku bisa bantu menuliskan ceritanya dan membuat video ceritanya. Namun Ika Ching perlu pendampingan lebih karena ia akan membawa kasusnya ke pengadilan.

Siang itu, di sekretariat serikat buruh, kuperkenalkan Ika kepada Ita Purnamasari, seorang pengurus serikat bagian advokasi kasus-kasus perburuhan. Ia bercerita seraya menyerahkan berkas dokumen yang ia punya selama bekerja. Mulai dari slip gaji, perjanjian kontrak, hingga surat PHK yang menurutnya tanpa alasan jelas itu.

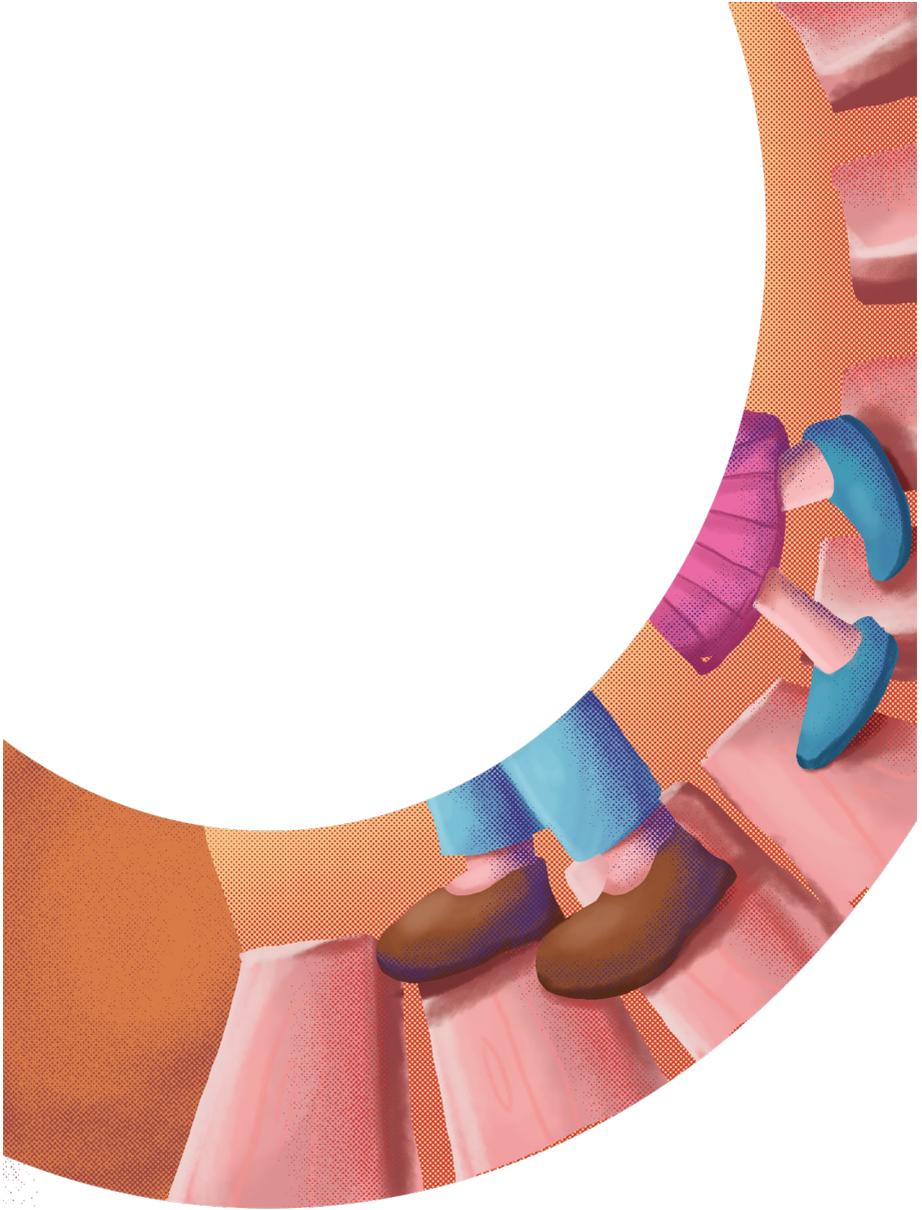
Sejak pertemuan tersebut, Ika lalu disibukkan dengan proses menyusun gugatan. Isi gugatan secara garis besar adalah kronologi kasus dan tuntutan. Ika menuntut sisa upah kontrak selama

6 bulan sebesar Rp 42 juta dan upah proses (selama perselisihan berlangsung). Ika memang tidak paham hukum, namun secara garis besar ia mengetahui isi gugatan.

Persidangan. Mendengar sepele kata itu saja membuat Ika agak bergidik. Dalam imajininya, ada seorang hakim dengan tampang kering dan garang, memegang palu pengadilan seperti dalam film-film yang kerap lalu-lalang di kotak televisi.

Hingga suatu hari, tiba masa di mana ia harus menghadiri persidangan untuk pertama kalinya. Gedung PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) terletak di Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat. Untuk kali pertama, Ika menginjakkan kaki di gedung PHI dalam rangka menggugat bos yang baginya sangat berkuasa. Perlahan, terdengar suara debar jantungnya. Perlahan namun pasti suara debaran itu kian kencang tak beraturan. Ika berhenti sejenak dan mengatur napas. Di papan dinding pengumuman, bersama Ita, ia perhatikan nomor urut dan jadwal sidang. Sejenak, Ika menghela nafas. Ia mendapat giliran bersidang di siang hari.

Debaran itu hadir lagi saat giliran sidangnya tiba. Ika pun maju ke ruang sidang, duduk di sebelah kiri sebagai penggugat. Di seberangnya, delapan pengacara pengusaha duduk berjajar, sementara Ika hanya seorang diri. Di posisi tengah terdapat



meja hakim. Ada tiga hakim, satu hakim ketua di tengah dan dua hakim lainnya di sisi kiri dan kanan. Secara keseluruhan sidang tidak berlangsung lama, hanya 15 menit. Ika cukup menyerahkan berkas gugatan kepada hakim dan pengacara lawan. Sebelum proses persidangan, kami memberitahu Ika bahwa tak jarang pengusaha melakukan intimidasi supaya buruh menyerah.

“Sebenarnya, aku menanti untuk diintimidasi lho, Di,”

celetuk Ika saat kami mengobrol via telepon.

“Penasaran ya?” sahutku sambil terkekeh.

“Nah, bener. Penasaran dong, *eh* ternyata *nggak* ada intimidasi.”

Sedari awal aku sudah memberitahu Ika Ching bahwa perjuangan perburuhan seperti yang dia hadapi tak mudah dimenangkan. Namun Ika Ching sudah bulat tekadnya untuk berjuang mendapatkan hak-haknya.

“Tak peduli bagaimanapun hasilnya. Yang penting sudah diperjuangkan sebaik-baiknya.”

# Oase Kampung Duri



# Oase Kampung Duri

Oleh: Mama Atha

Tak banyak kampung di Indonesia yang penduduk warianya<sup>1</sup> diperlakukan setara serta bisa mengekspresikan identitas seksual dan berkarya secara leluasa. Kampung yang dengan terbuka menerima para waria.

Di banyak tempat kelompok rentan ini justru kerap jadi sasaran persekusi. Berita-berita seperti waria dikejar-kejar dan dilempari batu, ditangkap dan digunduli, hingga disiram bensin dan dibakar hidup-hidup sering melintas di gawai kita dan jamak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ada anggapan yang keliru, yakni tiap terjadi kesialan dan bencana, warialah yang menjadi penyebabnya.

Kampung Duri, Jakarta Barat, mungkin satu-satunya kampung yang menerima waria dengan baik dan terbuka, sebagai sesama warga yang setara. Setidaknya, itulah yang aku rasakan sedari lahir dan tumbuh dewasa di Kampung Duri, pada tahun 1970-an. Waria-waria ini bekerja dari menjual makanan, perias salon, hingga pekerja seks.

Tak seperti di kampung lain, di mana waria sering menyembunyikan identitasnya, bahkan dari

---

1 Catatan editorial: Mama Atha secara pribadi lebih nyaman menggunakan istilah “waria” dibandingkan “transpuan”.

keluarga sendiri, karena tidak diterima. Tak sedikit dari mereka bahkan lari dari rumah di usia sangat dini, tak cukup bekal pendidikan dan kecakapan bekerja. Bahkan tak punya kartu identitas diri.

Mereka pergi ke kota-kota untuk menyambung hidup dengan kerentanan berlipat ganda. Kurangnya kecakapan dan tanpa identitas diri, menyebabkan mereka tak dapat menikmati fasilitas-fasilitas kesehatan. Jalan pintasnya dan pilihan cepatnya adalah dengan menjadi pekerja seks.

Kampung Duri ibarat oase dalam hal ini. Di mana para waria, seperti warga lainnya punya kartu penduduk, meski tak sedikit dari mereka yang tak cukup pendidikan dan kecakapan kerja. Setidaknya mereka bisa menikmati layanan kesehatan saat sakit. Karena penerimaan ini, banyak waria dari berbagai daerah tinggal di sini dan menjadikan kampung ini menjadi salah satu wilayah paling padat nomor dua di Asia.

Dari tahun 1970-an, Kampung Duri memang dihuni banyak waria. Bahkan dekat rumahku dulu, ada satu kontrakan yang berisi waria dari berbagai daerah. Sampai-sampai, ada satu gang disebut: Gang Bencong, karena padatnya penduduk waria di sana.

Bahkan aku sendiri berproses menjadi waria

dengan mulus di Kampung Duri. Meski terlahir sebagai laki-laki, namun dari kecil aku sudah seperti perempuan. Aku senang memakai baju perempuan, bermain dengan mainan perempuan dan suka membantu belanja Emak ke pasar dan kalau sudah pulang sekolah membantu memasak di warung. Saat kanak-kanak, ku ingat, kalau main rumah-rumahan, aku selalu menjadi sosok Ibu.

Warung Emak berada di tengah Pasar Pos Duri, sekarang pasar itu masih ada meski sudah beberapa kali direnovasi. Kenanganku terhadap warung Emak begitu indah. Aku senang membantu emak melayani para pelanggan. Saat itu, aku senang sekali, kalau lagi membantu di warung. Banyak pelanggan minta aku layani. Aku tersipu-sipu kalau mereka bilang padaku, “lucu dan cakep.”

Sekarang umurku sudah 55 tahun. Karena dari kecil aku sudah seperti perempuan, orang yang tinggal dekat dengan rumahku sudah mengerti karakter dan tingkah laku aku. Seiring berjalannya waktu, aku pun tumbuh menjadi seorang waria. Beruntungnya aku tinggal di wilayah Kampung Duri, karena warga sekitar sudah menerima keberadaan kami dan kami juga bisa menyatu dengan warga sekitar.

Para waria di Kampung Duri juga menikmati hak berhimpun dan berkesenian. Mereka punya ruang

untuk berkarya dan mengasah kreativitasnya. Dalam berkesenian mereka bergabung dalam kelompok kesenian bernama Teater Manekin. Pada 20 Oktober 2016, kelompok ini berkembang menjadi Sanggar Seroja –nama yang diinspirasi dari nama bunga yang hidup di air keruh. Harapannya, seperti bunga seroja, meskipun hidup di air kubangan, kami akan selalu mekar dan terlihat indah.

Kami ingin Sanggar Seroja menjadi wadah untuk kelompok transgender berkesenian, membangun penerimaan diri, menciptakan ruang diskusi, bersolidaritas serta menghasilkan karya untuk kampanye dan menyuarakan keberagaman agar bisa mewujudkan nilai-nilai kesetaraan di masyarakat.

### **Solidaritas Saat Pandemi**

Para waria ini, sebagaimana warga lainnya, punya keluarga yang perlu dinafkahi dan disayangi. Aku sendiri, misalnya, punya dua anak asuh dan kerabat yang tinggal di rumah. Kami sekeluarga menggantungkan hidup pada salon rias yang dikelola di rumahku.

Seperti usaha-usaha lain yang gulung tikar diterjang gelombang pandemi COVID-19, usaha salonku juga merasakan betul dampaknya. Banyak pesanan jasa rias ditunda, bahkan dibatalkan. Tak



hanya itu, untuk beberapa bulan aku juga harus menutup usaha riasku.

Sumber pemasukan yang terhenti, sementara kebutuhan sehari-hari tak henti menuntut tiap peser uang yang tersisa. Ada titik, duit di dompetku tinggal 5000 *doang* dan anak-anak serta keluarga perlu makan. Karena pusing, aku bikin status di WhatsApp. Sekedar untuk menyalurkan beban di kepala.

Aku tak berharap belas kasihan. Sekedar berpikir, *ada nggak sih yang ngerasain duit tinggal goceng doang? Apakah aku doang yang mengalami kesialan akibat pandemi ini?*

Ternyata status ini banyak direspon kawan-kawan. Utamanya di lingkaran waria. Setidaknya ada 26 waria di Kampung Duri merasakan hal serupa. Susah cari duit dan susah makan. Kerentan para waria terhadap infeksi COVID-19 juga amat tinggi. Karena kebanyakan mereka tinggal berkelompok dan rumah-rumah kontrakan yang sempit untuk menghemat biaya sewa. Selain itu lapangan kerja mereka yang sudah sempit, kian menyempit. Tanpa bekerja, mereka terancam dikeluarkan dari kontrakan, karena tak mampu membayar sewa. Kemungkinan terjangkau COVID-19 kian tinggi.

Karena perasaan senasib dan sepenanggungan akhirnya mereka bersepakat untuk membuat dapur umum. Membagikan makanan untuk

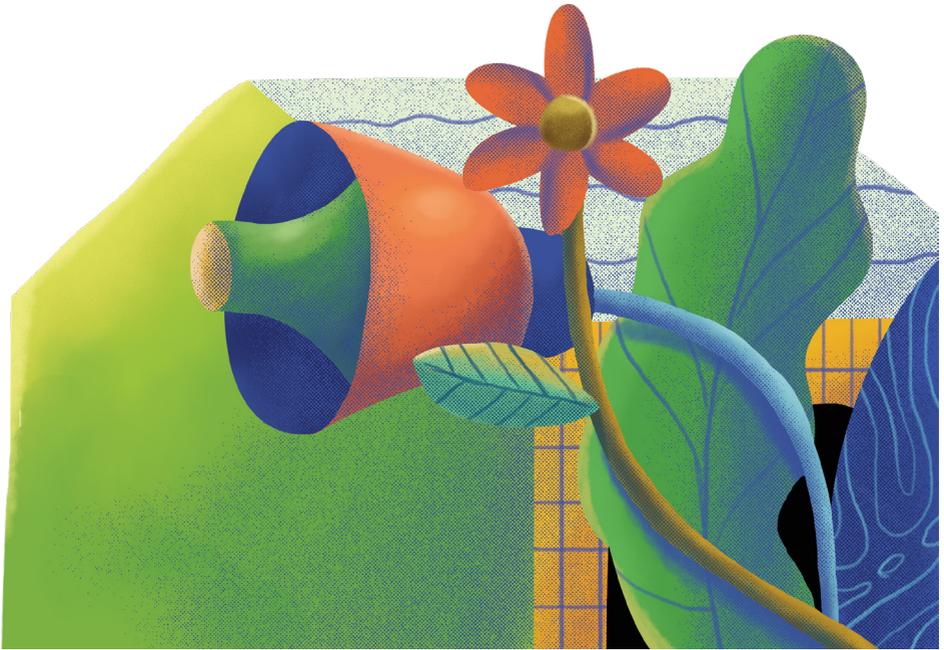
siapapun yang membutuhkan.

Akhirnya, Sanggar Seroja membuka donasi untuk membantu teman-teman yang terdampak pandemi. Gayung bersambut, dengan bantuan Queer Language Club (QLC), Sanggar Seroja pun menggalang donasi publik #BantuanUntukWaria dan mengumpulkan dana 100 juta Rupiah yang kemudian kita bagikan.

Mereka mendapukku sebagai juru masak untuk membantu teman-teman waria, yang kehilangan mata pencaharian dan kesulitan menyambung hidup. Aku mau membantu karena aku sendiri merasakan kebutuhan untuk dibantu. Sederhananya, kalau aku tak bisa bantu duit, minimal aku bantu tenaga. Karena itulah aku jadi relawan.

Aku menggerakkan semua anggota keluargaku untuk membantu dapur umum ini. Dua anak asuh, kakak dan dua relawan lain tiap hari berjibaku menyiapkan makanan. Setidaknya tiap hari kami masak 140 porsi makanan untuk makan siang dan makan malam warga sekitar. Tak hanya untuk warga Kampung Duri, hidangan ini juga kami distribusikan hingga Kampung Kali Anyar, sebelah Kampung Duri.

Kesulitan lain yang aku hadapi selama menjalankan dapur umum adalah kesulitan mendapat bahan baku karena pasar-pasar ditutup



jam-jam tertentu. Pas itu, masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di mana operasi pasar dibatasi, guna mengurangi kerumunan massa yang berpotensi menyebarnya virus COVID-19. Selain itu, juga keterbatasan tenaga juru masak, juga jadi persoalan.

Kesulitan ini akhirnya diatasi dengan mengubah pola bantuan. Setelah PSBB, bantuan yang sebelumnya diberikan berupa makanan jadi, diganti dengan membagi bahan kebutuhan pokok dan uang jajan. Sebelumnya dibagikan tiap siang dan malam, menjadi dibagi seminggu sekali.

Kami pun mengadakan “Dana Bergulir” untuk memodali teman-teman Seroja mendirikan usaha kuliner. Seiring berjalannya waktu, kami mengelola tujuh bisnis kuliner kecil-kecilan. Salah satunya milikku sendiri, Bolu Mama Pandan. Sanggar Seroja juga masih tetap mengadakan pementasan teater meskipun hanya lewat virtual.

Bantuan ini sangat meringankan beban para waria yang rata-rata pendapatnya terjun bebas hingga 70 persen selama pandemi. Yang ngamen sehari paling bagus cuma bisa dapat Rp 50.000. Yang paling parah ya yang seperti aku, merias, yang tak punya pendapatan sama sekali.

### **Dari Usaha Kue Hingga Kepedulian Lingkungan**

Saat pandemi pada puncaknya, pemerintah

mengucurkan bantuan sosial yang didistribusikan melalui RT di masing-masing kampung. Puluhan waria di Kampung Duri juga ikut mengajukan bantuan ini. Namun, meski memiliki KTP dan nomor wajib pajak, hanya dua hingga tiga orang yang diakomodasi pemerintah setempat.

Pengalaman pahit sulit mengakses dana bantuan sosial membuat, para waria anggota Sanggar Seroja, berusaha untuk bikin usaha mandiri berskala kecil. Donasi publik yang mereka kumpulkan bersama.

Pada pertengahan masa pandemi, sejumlah anggota Seroja sempat kembali bekerja di salon dan menjadi penata rias. Tapi, gara-gara PPKM, aktivitas itu terhenti lagi. Akhirnya kami mengandalkan pemasukan dari usaha kuliner. Alhamdulillah pesanan ada terus yang masuk.

Waria lain yang menjalankan usaha kuliner berkat bantuan modal itu ialah Uti, yang sempat kehilangan pekerjaan di sebuah salon kecantikan. Ia kini punya usaha produksi dan penjualan aneka kue serta jajanan pasar dengan nama Risol Teteh Uti.

“Awalnya jualan risoles karena memang aku punya resepnya, dan memang sejak lama aku bisa bikin

kue dan aneka jajanan pasar,”

kata Uti.

Produk-produk Uti dikemas dengan kemasan menarik dan dipromosikan di media sosial. Pemesannya datang dari berbagai wilayah di Jabodetabek.

“Aku kirim dengan memberdayakan warga sekitar yang bekerja jadi tukang ojek, jadi saling membantu,” ujarnya.

Dalam beberapa kesempatan, seperti bulan Ramadhan, Uti juga membuka lapak berjualan di sekitar tempat tinggalnya.

Bagi Uti, bantuan permodalan ini menjadi gagasan cemerlang untuk kalangan waria.

“Kami terbantu banget, jadi bisa punya usaha sendiri dan tak bingung lagi cari uang untuk makan,” katanya.

Hal yang tak kalah penting, kata Uti, dengan adanya kegiatan membuat kue ini, ia tak lagi stres memikirkan tekanan hidup akibat pandemi.

Setelah Pandemi usai, Jakarta dilanda kemarau panjang dan kualitas udara yang sangat buruk. Bahkan salah satu yang terburuk di dunia.

Karena kami sedang aktif di isu lingkungan hidup, kami juga membuat kostum untuk superhero-superhero unik dari bahan daur ulang. Ada kostum Trans Superhero, ada kostum Asih yang merupakan pahlawan di bidang kesehatan, kostum Dana yang pahlawan keuangan, Feilan yang pahlawan kebersihan, dan Tara sang pahlawan advokasi. Dengan kostum-kostum itu, kawan-kawan Sanggar Seroja sering mengadakan pementasan yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup serta aksi-aksi termasuk untuk isu perubahan iklim.

Di tahun 2023 ini, kami mengadakan pementasan dengan naskah khayalan sendiri. Pada pementasan yang didukung oleh Voice Global ini, kami mengangkat kisah keluarga jawara silat Betawi yang mempunyai lima orang anak-semuanya waria. Sang Bapak sangat murka dengan keadaan ini, hingga mengusir semua anaknya satu per satu. Tapi, kelima anaknya kemudian berhasil menjadi orang-orang yang sukses dan terkenal. Lakon ini akan dimainkan oleh rekan-rekan Sanggar Seroja, beserta seorang laki-laki yang menjadi karakter Babeh.

Lakon bertajuk *Nothing's Gonna Change* ini





merupakan kolaborasi Sanggar Seroja bersama sutradara Joind Bayuwinanda. Awalnya Joind memberi judul “Hayal” pada 2016 saat dia pertama kali menyusun lakon ini dan kemudian diganti judul *Nothing’s Gonna Change* yang menggambarkan getir-pahitnya kehidupan awal yang dijalani berbagai ragam minoritas gender. Yang paling berat adalah penolakan orang tua.

Para pemeran lakon ini adalah sembilan waria dan satu pemeran laki-laki: Devi Bernadette, Joind Bayuwinanda, Wanty Soraya, Tatiana Kaldera, Donitta, Yara Syahrazad, Sherly Wijayanto, Mama Atha, Metha Guritha, dan Nuke Herawati.

Pementasannya berlangsung di Auditorium Gelanggang Remaja Jakarta Barat pada 29 September 2023 dan terbuka untuk semua kalangan, dari pelajar hingga penggiat teater. Cerita *Nothing’s Gonna Change* ini ingin menyuguhkan gambaran kehidupan waria yang kerap menghadapi pengusiran dari keluarga. Ia disajikan dengan apik dengan berbagai adegan komedi satir di berbagai babak.

Dengan cara ini, kami berharap bahwa kritik kami terhadap realita sosial dapat sampai di benak para audiens dengan tanpa merasa digurui, sekaligus terhibur dan melahirkan empati yang ujungnya dapat mengikis stigma tebal terhadap para minoritas gender ini.

Diskusi, latihan dan penggodokan pementasan banyak dilakukan di Kampung Duri yang bagiku adalah tempat yang sangat indah dan berarti. Meskipun banyak yang bilang kampung ini kumuh dan padat, aku bahagia menjalani kehidupanku di sana. Apalagi, di kampungku banyak sekali teman-teman waria dan pendatang yang saling berbaur.

Keberadaan kami dan Sanggar Seroja pun sangat diterima oleh warga, bahkan pihak RT dan ormas setempat pun selalu mendukung kegiatan kami. Anak-anak kecil di Kampung Duri sudah tidak merasa aneh melihat kami yang waria, dan setiap Sanggar Seroja melakukan latihan di tengah pasar atau parkirannya, anak-anak sekitar akan ramai menonton kami. Bahkan kadang mereka minta diajak ikut latihan dengan kami.

Aku sangat bahagia menjalani kehidupanku saat ini. Apalagi, sekarang aku diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk merawat dan membesarkan seorang anak. Anakku memanggilku Mama, dan mulai dari situ banyak orang memanggilku dengan sebutan Mama Atha. Panggilan itu semakin memperkuat diriku sebagai seorang Ibu, meskipun aku tidak merasakan hamil dan melahirkan, aku bisa menjadi sosok yang baik untuk teman-temanku dan untuk anakku, Incess Saljuku.

Kuharap aku juga bisa menjadi Mama buat semua orang dan Mama untuk Sanggar Seroja.

# Melihat Kembali Lansia: Kisah Pemuda dan Lansia di Karawang



# Melihat Kembali Lansia: Kisah Pemuda dan Lansia di Karawang

Oleh: Tati Sulastri & Nurul Aeni

Sore itu aku menerawang jauh ke masa 20 tahun silam. Saat aku tinggal bersama ibu dan kakekku yang telah berusia senja. Saat menyaksikan ibu mengurus kakek, aku hanya memandangi sebelah mata. Aku tak pernah mau membantu saat ibuku kerepotan menggantikan popok atau memindahkan kakek dari posisi tidur.

“Bukankah itu sudah seharusnya urusan anak-anaknya kakek?”

gumamku, saat itu.

Menyaksikan kakek yang telah renta, dengan kulit keriput, rambut beruban dan giginya yang telah ompong, aku sama sekali tidak tertarik. Aku tidak pernah menemani kakekku berbincang, karena bagiku pertanyaan-pertanyaan yang ia lontarkan sangatlah menyebalkan dan mengganguku saat sedang menikmati menonton televisi.

Aku tak menyangka, berselang 20 tahun kemudian, aku justru berada bersama-sama para lansia seusia kakekku dan memperoleh beragam pelajaran hidup yang amat berharga dari mereka.

Namaku Tati Sulastri, pendamping lapangan di organisasi perempuan bernama Pusat

Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) Pasoendan Digdaya. Aku bergabung sejak 2019, setelah sebelumnya bekerja di sebuah pabrik garmen. PPSW Pasoendan Digdaya bekerja di sembilan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Banten yaitu Sukabumi, Karawang, Cianjur, Bogor, dan Purwakarta.

Sejak Agustus 2021, aku mulai mengerjakan Program Anggaran Desa Bagi Lansia Sehat Sejahtera dan Terampil (Andil Sahate) yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang. Program ini bertujuan untuk berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan perempuan lanjut usia melalui peningkatan akses dan layanan bagi lansia dan keterlibatan dalam perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan responsif gender.

Di program ini, PPSW Pasoendan berkonsorsium dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Barat. PPSW mendapatkan dukungan dari Voice Global dalam program Linking and Learning yang menghubungkan para penerima hibah.

Program bekerja di empat desa di dua kecamatan yakni Desa Curug dan Desa Karanganyar di Kecamatan Klari serta Desa Pinayungan dan Desa Telukjambe di Kecamatan Telukjambe Timur. PPSW Pasoendan melakukan pendampingan kepada lansia, sementara FITRA melakukan

advokasi ke pemerintah desa. Seiring berjalannya waktu, konsorsium berganti dengan Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK).

Di Karawang, sebuah tempat yang masih asing bagiku, aku mendampingi kelompok lansia di Desa Curug dan Desa Karanganyar untuk melakukan advokasi anggaran desa guna memenuhi hak seperti layanan kesehatan, ekonomi, dan lainnya.

### **Survei di Empat Desa**

Perjumpaanku dengan para lansia ini adalah saat melakukan survei kepada 200 orang lansia di empat desa untuk memetakan kondisi mereka sebagai rujukan program ke depan. Semula kami menanyakan ke pihak desa dan ternyata tidak ada data terpilah terkait lansia. Survei dilakukan selama satu bulan secara *door to door* dengan melibatkan kader Posyandu setempat.

Perjumpaan itu sungguh membuat hatiku bergetar. Mereka bercerita aneka persoalan hidup, seperti bagaimana rasa sepi yang mereka rasakan saat keluarganya pergi untuk bekerja. Ada yang sulit memperoleh penghasilan padahal mereka hidup sendiri atau bahkan menanggung anak dan cucu. Ada pula yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan lantaran jarak yang jauh sementara mereka kerap sakit-sakitan.

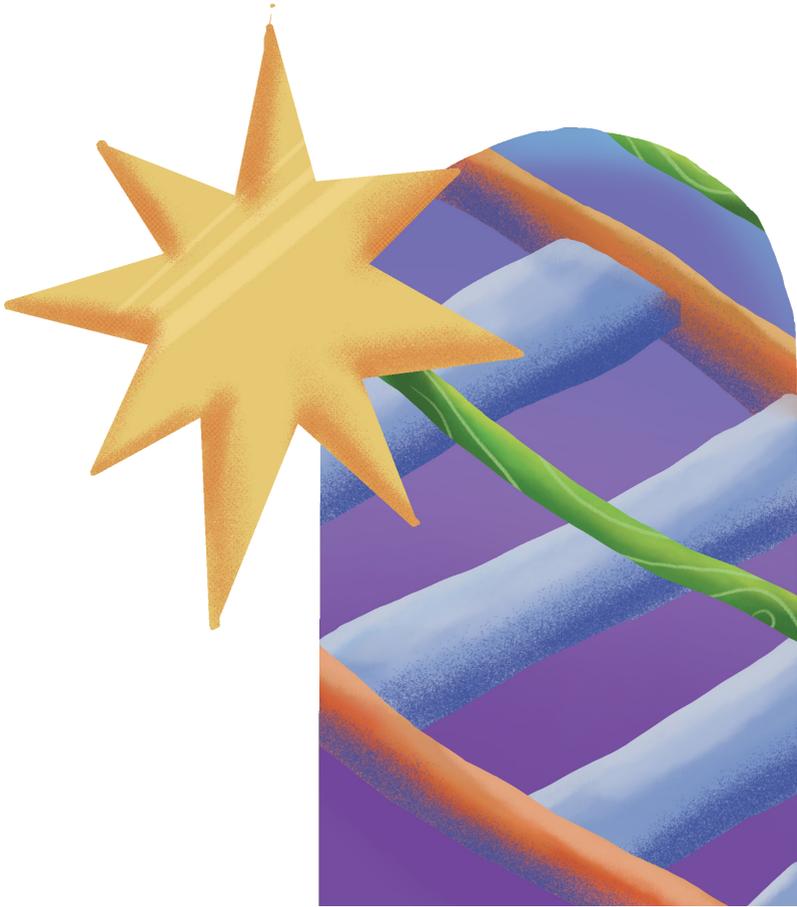
Mak Endoy (68) tinggal di Dusun Cariu, Desa

Karanganyar. Ia salah satu yang kujumpai pada saat survei. Sosoknya ramah dan penuh senyum. Saat berbincang, dua giginya yang tersisa akan menyembul keluar. Ia tinggal di sebuah rumah kecil berlantai tanah dengan dinding penuh retakan. Sebuah sumur timba tua terdapat di belakang rumahnya sebagai sumber air untuk minum, mencuci, dan mandi.

Mak Endoy tinggal bersama seorang anaknya yang merupakan penyandang disabilitas mental. Menghidupi diri dan anak, ia bekerja di sebuah pabrik pengolahan limbah plastik air mineral. Tugasnya adalah memilah limbah plastik. Dengan upah Rp30 ribu per hari, ia harus bekerja nyaris sepuluh jam. Untuk berangkat ke pabrik, ia berjalan kaki selama 30 menit. Jika sedang beruntung, ada motor tetangga yang lewat dan menawari memboncengnya.

Cerita serupa dialami oleh Mak Lasem (65), seorang lansia soliter di Dusun Krajan, Desa Curug. Ia tinggal di sebuah rumah panggung di pinggir sawah. Hanya ada satu ruangan yang sarat tumpukan barang, sehingga ia kerap sulit bergerak bahkan hanya untuk menyelonjorkan kaki. Saat malam hari, kadang ia tidur dalam keadaan gelap gulita manakala lampu penerangan yang diaksesnya dari tetangga mengalami kerusakan.

Di usianya tuanya, Mak Lasem tinggal sendiri.



Suaminya telah meninggal dan ia tak memiliki anak. Sehari-hari ia menjadi buruh tani.

**“Emak hidup sendirian, Neng,  
tidak punya siapa-siapa,”**

ucapnya sambil menghela napas saat kutemui.

Hal yang sama juga ditemukan oleh teman-teman dari Tim Andil Sahate PPSW Pasoendan Digdaya saat melakukan wawancara dengan lansia di desa dampingannya. Ada Mak Ursih, seorang janda di Desa Curug. Alih-alih dapat menikmati hidup di usia tua yang menyenangkan, menikmati suasana santai sambil menyesap secangkir teh di beranda sembari menyaksikan cucu-cucunya bermain, untuk memeriksakan kesehatan saja bagi Mak Ursih butuh usaha luar biasa.

Mak Ursih tidak sendirian. Rasa kesepian juga membuat mereka seperti telah kehilangan harapan untuk hidup. Dengan kondisi seperti ini, jangankan menyampaikan aspirasi atau terlibat dalam pembangunan desa, semangat mereka untuk hidup saja nyaris sirna.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Tim PPSW Pasoendan Digdaya pada bulan Agustus 2021, hampir 40 persen lansia tinggal sendirian, anak-anaknya sudah tinggal terpisah. Anak-anak yang sudah menikah banyak yang memutuskan

untuk tinggal di kompleks perumahan sementara para orangtua tetap tinggal di rumah usang milik mereka. Anak-anak mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga jarang sekali berkunjung ke rumah orangtua meskipun hanya untuk bertegur sapa.

Potret Mak Endoy, Mak Lasem, dan Mak Ursih, hanya segelintir di antara sekitar 200 lansia perempuan di Desa Curug dan Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, juga Desa Pinayungan, dan Desa Telukjambe di Kecamatan Telukjambe Timur. Sebagian besar dari mereka adalah lansia dengan ekonomi rendah.

Kecamatan Klari adalah sebuah daerah yang tengah mengalami pertumbuhan pembangunan dari kawasan pertanian ke kawasan industri. Alih fungsi lahan yang masif berdampak pada pendapatan lansia yang sangat mengandalkan dari sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan oleh Mak Ebah (56) tahun dari Dusun Munjul, Desa Curug. Di video yang ditayangkan di kanal Youtube PPSW Pasoendan, Mak Ebah berkisah bahwa dulu Desa Curug sangatlah subur dan asri.

“Curug dulu asri. Sawah dan pepohonan masih asri. Sekarang banyak pabrik. Air Sungai

Citarum tidak bisa diminum. Tidak bisa dipakai mencuci. Tidak bisa dipakai mandi. Padahal dulu bisa dipakai apa saja, mandi, mencuci. Sekarang setelah banyak pabrik, banyak limbah. Limbahnya bau. Terbawa angin jadi bau,” ucapnya.

Sama halnya dengan Klari, Kecamatan Telukjambe juga merupakan sebuah kawasan industri. Hingga kini tinggal tersisa sedikit lahan persawahan. Kecamatan ini dilintasi jalan tol Jakarta-Cikampek, sehingga banyak sekali pembebasan lahan. Sementara itu, di sebelah selatan Jalan Tol Jakarta-Cikampek sudah menjadi kawasan industri. Banyak rumah-rumah lansia yang tergusur. Demikian juga lahan persawahan yang kini telah beralih fungsi.

Aku menyaksikan bagaimana fisik dan kesehatan para lansia ini mulai merosot dan mereka tetap harus bekerja. Suatu hari, aku ikut hadir dalam pertemuan para lansia dengan aparat desa di salah satu rumah warga. Aku lebih banyak memerhatikan saja. Kulihat mereka duduk dengan menyelonjorkan kaki, sesekali memijatnya.

## “Sakit asam urat,”

kata mereka. Ada yang hanya diam terkantuk sepanjang acara. Ada yang malu-malu. Ada juga yang berharap mendapat bantuan. Bayangan almarhum kakek kembali berkelebat saat aku melihat sosok yang mirip dengannya: kulit keriput, gigi ompong dan badan membungkuk. Andai bisa memutar waktu, tentu aku ingin memperlakukan kakekku dengan selayaknya. Agar hari-hari tuanya berbahagia dan tidak kesepian.

Selain tidak memiliki data terpilah di desa, pemenuhan hak-hak lansia kerap tidak menyentuh beberapa persoalan mendasar. Beberapa kegagalan kebijakan pelayanan kesejahteraan lansia yang ada disebabkan oleh tidak tersentuhnya akar persoalan yang sebenarnya dihadapi oleh mereka. Pemerintahan desa kerap tidak menganggap lansia sebagai kelompok yang harus difasilitasi kebutuhannya. Mereka lebih berfokus kepada pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jalan lingkungan dan infrastruktur lainnya.

Setelah menemukan data itu, aku dan tim mencoba melakukan komunikasi dengan pemerintah desa setempat. Kagetnya, mereka menganggap semua ini wajar.

“Sudah jadi lansia, memang kenapa harus dipermasalahkan?”

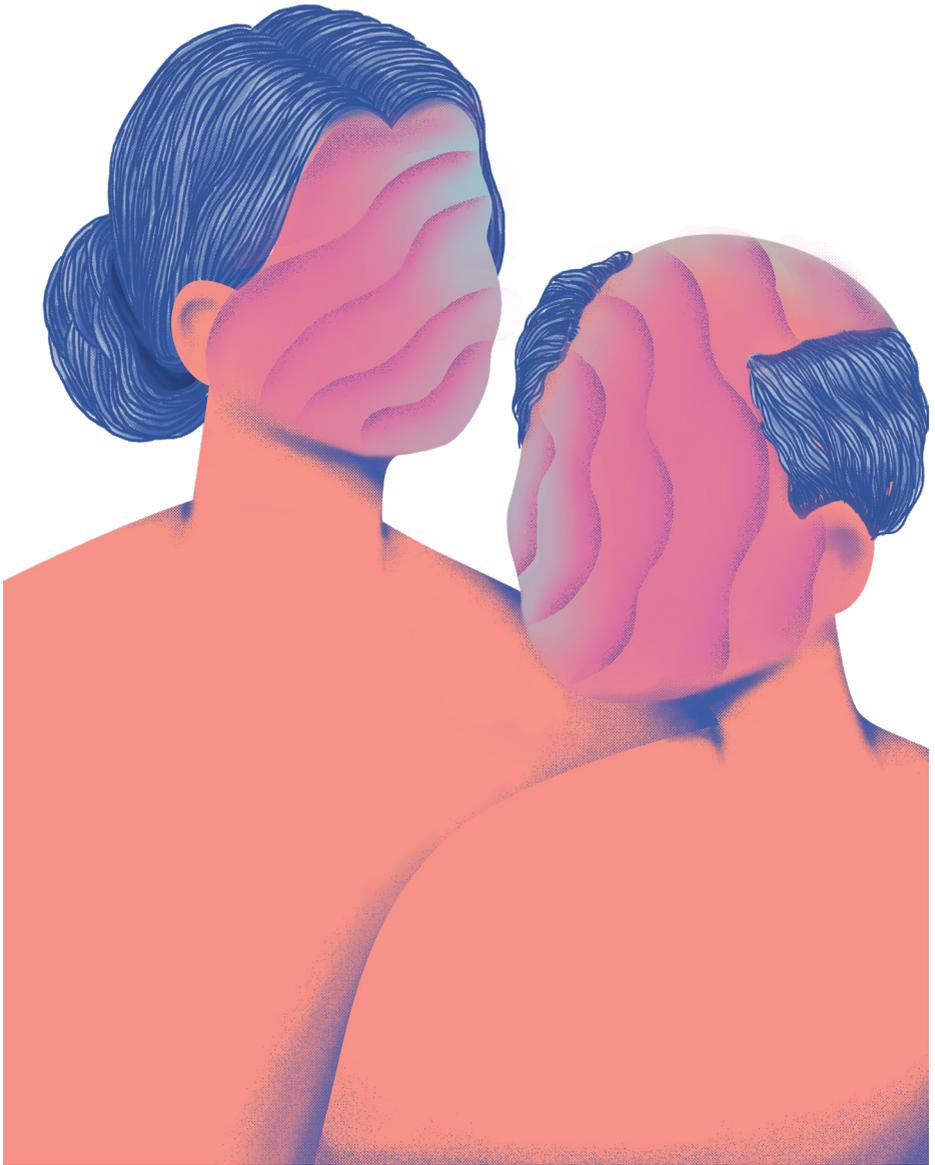
ucap salah seorang aparat desa.

“Toh, sebentar lagi mereka akan meninggal,” tambah yang lain.

Dengan beragam problem tersebut, akhirnya kami merasa penting menciptakan wadah bagi lansia untuk mendapat pengetahuan, menambah kepercayaan diri, dan dapat menyampaikan aspirasinya. Kelompok ini harus punya anggota beragam, tidak hanya lansia tapi juga anak muda dan perwakilan keluarga. Kami mendorong agar kelompok lansia berani menyampaikan aspirasinya, baik dalam forum formal yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Dusun (Musdus) maupun forum-forum informal.

### **Terbentuknya Nyekar Desa**

Pada bulan September 2021, kami mempertemukan pihak desa, lansia dan keluarganya untuk memetakan hasil survei. Usai kegiatan itu, kami mengumpulkan para lansia dan keluarga dan inilah cikal bakal terbentuknya Kelompok *Nyekar Desa*, singkatan dari *Nyakola* Anggaran Desa. *Nyakola*, dalam bahasa Sunda adalah sekolah.



Di kelompok ini berbagai kegiatan dilakukan bersama para lansia, kader lansia, dan keluarga melalui pertemuan rutin sekali sebulan. Mereka belajar mengenai motivasi berkelompok, gender, potensi diri, hak-hak lansia sebagai warga negara, cara menyampaikan aspirasi di forum dan mereka mendapat ruang untuk saling bertemu dan berbagi antar lansia sehingga mereka tidak merasa sendiri.

Program Andil Sahate juga melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG), pengarusutamaan lansia kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa. Pasca pelatihan, proses ini dilanjutkan dengan pendampingan, sehingga BPD memahami tugas dan fungsinya dalam menggali, mengelola, dan menyalurkan aspirasi warga.

Program Andil Sahate melakukan pendampingan pada dua sisi: pada kelompok lansia dan pemerintahan desa. Yang pertama adalah di kelompok lansia sebagai *demand* dan BPD sebagai *supply*. Pendekatan advokasi yang dilakukan lebih banyak merupakan kerja-kerja kolaboratif. Advokasi ini dipilih untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara kelompok lansia sebagai penerima manfaat dengan BPD dan Pemerintah Desa sebagai pemberi layanan. Dengan demikian keberlangsungan dukungan Pemerintahan Desa kepada lansia akan tetap berjalan meski program sudah selesai.

Mayoritas dari anggota BPD yang ada di desa dampingan juga tidak memahami secara utuh apa saja hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai BPD. Ada kesan BPD “seolah-olah” menjadi bawahan Kepala Desa. Mereka tidak banyak mengambil inisiatif untuk mempengaruhi pembangunan desa. Penggalan aspirasi dari masyarakat tidak menyentuh kelompok-kelompok marginal seperti para perempuan lansia.

Ketua BPD Desa Curug, Bapak Ujang, mengakui bahwa sebelumnya penggalan aspirasi dilakukan melalui RT dan RW serta tokoh masyarakat yang mayoritas adalah laki-laki.

**“Usulan yang disampaikan seputar infrastruktur,”** ujar Pak Ujang.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Curug. Sebelum adanya program Andil Sahate, tidak pernah ada musyawarah khusus yang diselenggarakan oleh pihak desa untuk menggali aspirasi dari masyarakat. Pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa pun tidak pernah dilakukan musyawarah di tingkat dusun. Hal ini juga terjadi di desa-desa lain di wilayah dampingan program.

Dengan anggota sekitar 20 orang lansia di setiap dusun, Nyekar Desa bertemu sebulan sekali di

balai desa. Hanya memakan waktu paling lama dua jam saja. Tapi rentang waktu itu saja sudah butuh pengorbanan. Tidak mudah bagi para lansia untuk sanggup bertahan selama dua jam dengan menahan kantuk, pusing, panas pada punggung, dan harus membuka telinga lebar-lebar.

Menyesuaikan dengan kondisi mereka, maka kami merancang pertemuan secara ringan. Kami membangun suasana yang menarik dan tidak membosankan. Emak-emak kami ajak untuk bernyanyi, menari bersama, belajar membaca dan menulis. Mereka juga didorong untuk bercerita apapun yang dihadapi. Karena para lansia tersebut tidak cakap bahasa Indonesia, maka pertemuan pun dilakukan dalam bahasa Sunda.

Agar stamina mereka kokoh dan tak mudah sakit, kami mengadakan senam lansia, lengkap dengan tari-tarian seru, sebelum pertemuan dimulai. Selepas senam, kami memulai pembelajaran kelompok. Materi yang kami pelajari bersama di antaranya adalah motivasi, kesadaran isu gender, pentingnya menyampaikan pendapat, hak-hak dasar lansia, menjaga kesehatan dan kebugaran, kearifan lokal, dan lainnya.

Favorit mereka adalah di sesi tentang kearifan lokal. Para lansia terlihat lebih bergairah dengan mendongeng tentang desa-desa mereka di masa lalu. Ada seorang emak yang dengan riang

menyanyikan lagu daerah seperti “Tokecang” dan “Cing Cakeling”, dan ada yang ramai-ramai memperagakan permainan *kaulinan budak lembur*, sebuah permainan tradisional Sunda yang biasa dilakukan secara berkelompok.

Pada permainan ini, para lansia berdiri dengan saling memegang pundak teman di depannya, membuat barisan panjang seperti ular, dan melewati terowongan yang dibuat oleh sepasang temannya yang lain. Semua orang akan bernyanyi, dan saat nyanyian berhenti, terowongan itu akan berusaha menangkap si ular. Permainan ini sukses bikin mereka terpingkal-pingkal.

### **Perubahan di Desa**

Adanya program Andil Sahate lambat laun membawa perubahan di tingkat desa. Pada tahun 2022, perubahan positif terjadi di desa-desa dampingan. Pemerintah Desa bersama BPD menyelenggarakan musyawarah di tingkat dusun yang melibatkan lansia, pemuda, perempuan dan kelompok lainnya.

Di forum Musyawarah Dusun (Musdus), para lansia menyampaikan aspirasi terkait pelayanan kesehatan lansia melalui Pos Binaan Terpadu (Posbindu), kesejahteraan sosial lansia, peningkatan pendapatan untuk lansia, kemampuan baca tulis untuk lansia, kesenian

untuk lansia, perbaikan dan penerangan jalan, banjir dan persoalan sampah. Aspirasi yang disampaikan dalam musyawarah di dusun dicatat oleh BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa.

Selain itu, para lansia juga terhubung dengan kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan senam lansia, belajar baca tulis, kabaret lansia, Iqra, pelibatan lansia dalam peningkatan pendapatan melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Opak Sahate, pelibatan lansia dalam Kelompok Wanita Tani SAHATE dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka siap menjadi lansia SAHATE (Sehat, Sejahtera, dan terampil), dan menjadi bagian masyarakat yang mempunyai keinginan untuk tetap produktif di usia lanjut.

Mendorong para lansia untuk menyampaikan aspirasi pasti butuh waktu panjang. Aku biasa menyampaikan kepada mereka dengan bahasa yang mudah dipahami.

“Bapak Lurah tidak tahu kebutuhan Emak jika Emak tidak cerita. Bapak Lurah bukan dukun...” ujarku, dalam sebuah pertemuan.

Perlahan, mereka pun mulai berani menyampaikan aspirasinya.

FITRA Jabar melakukan Musdus sebagai sarana untuk menggali aspirasi. Kami mendorong BPD untuk lebih aktif menggali aspirasi masyarakat terutama lansia. Bahwa para lansia juga membutuhkan wadah-wadah berkumpul. Agar suara mereka terwakili di Musdus dan perwakilan lansia yang bicara di Musrembang. Pengarusutamaan akan memberikan kesadaran kepada semua pihak tentang arti pentingnya isu Lansia dan Kelanjutusiaan yang harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

### **Perubahan Individu Lansia**

Perubahan besar juga terlihat di kehidupan pribadi para lansia. Pertemuan-pertemuan itu membuat mereka senang. Perjumpaan dengan teman-teman sebaya, aneka kegiatan ringan dan menyenangkan, membuat mereka bergembira.

“Ternyata Emak tidak sendiri. Emak senang, bisa saling tukar pikiran. Di sini, Emak punya keluarga baru,” ujar Mak Endoy.

Sementara itu, Mak Ebah dari Kampung Munjul, Desa Curug menyebutkan betapa ia senang ikut dalam kegiatan Nyekar Desa.

“Alhamdulillah Emak ketemu Neng Imas, Neng Tati, Neng Yati di Nyekar Desa. *Kan* saya sudah jarang baca, jarang tulis, belajar di Lansia Berdaya Alhamdulillah sekarang bisa lancar. Sekarang Emak berani sampaikan aspirasi ke Bapak BPD. Emak berani utarakan keluhan-keluhan lansia,” ujarnya.

Berani untuk berbicara di depan pejabat desa, diakuinya, sesuatu yang dulu nyaris tak mungkin dilakukan.

“Dulu Emak tidak berani karena malu. Sekarang banyak sesama lansia. Jadi lebih berani. Emak juga suka nyanyi, suka joget. Jadi dikembangkan. Ibu-ibu bahagia, Emak juga senang,” tambahnya.

Menurutku, hal terpenting adalah mereka bisa

menerima diri sebagai lansia. Menjadi lansia dengan segala keterbatasan dan tantangannya memang tidak mudah. Tidak satu-dua orang saja di kelompok kami yang mengaku bahwa menjadi pesakitan dan menua terasa seperti kutukan.

Seorang lansia yang semula enggan ikut kegiatan Nyekar Desa berkali-kali menyatakan,

**“Emak ingin segera mati saja. Teman-teman Emak sudah tidak ada semua,”** ujarnya.

Atas ajakan yang lain, akhirnya ia mau ikut hadir di pertemuan. Kini mereka mendapatkan ruang untuk berkumpul dengan teman-teman sebaya dalam suasana riang gembira. Mendapatkan pengakuan dan perhatian dari pihak desa juga membuat mereka lebih merasa dihargai.

Dari ragam pertemuan, kunjungan dan obrolan-obrolan santai, rupanya para lansia kini juga sudah mulai memperhatikan soal kesehatan. Dalam sebuah kunjungan kami membagikan tumbler untuk air minum. Rupanya tumbler itu benar-benar mereka manfaatkan.

**“Emak sudah minum air putih banyak. Sudah kurangi kopi hitam,”**

ujar salah satu lansia. Mereka juga bilang, mempraktikkan gerakan senam mandiri di rumah. Satu kelompok lain dengan bangga bercerita bahwa mereka baru saja memulai tabungan bersama.

Akhirnya, pengalaman mendampingi kelompok lansia di Karawang telah mengubah pandangan dan sikapku terhadap lansia. Jika di masa lalu, aku abai terhadap kakekku sendiri, tidak tahu kebutuhan-kebutuhan dan perasaannya sebagai seorang lansia, proses bersama di Andil Sahate ini benar-benar menumbuhkan kesadaran baru bagiku. Bahwa lansia juga selayaknya mendapatkan hak sebagai warga bangsa untuk sehat dan bahagia.

Dari mereka aku juga banyak belajar tentang kehidupan. Kendati hari-hari Mak Endoy, Mak Lasem, dan Mak Ebah cukup berat, tetap saja ada pancaran bahagia saat mereka bercerita. Ada yang berkisah tentang pernikahan mereka yang langgeng, cucu mereka yang menggemaskan, hingga pencapaian anak-anak mereka. Dari cerita mereka, aku belajar bahwa kebahagiaan dapat ditemukan dalam setiap tahap kehidupan, meskipun harus menghadapi tantangan yang tak ringan.

Perjumpaan-perjumpaan dengan para lansia juga semakin memompa semangatku. Sebelum



pertemuan Nyekar Desa, aku selalu bertekad bahwa di hari itu aku harus bisa membuat para lansia tertawa bahagia saat berkumpul. Aku sendiri tidak menyangka, aku bisa begitu menikmati proses ini. Andai saat ini almarhum kakekku masih ada, pasti sikapku akan jauh lebih baik. Aku pasti akan memahami suara hatinya dan bisa memperlakukan dengan sebaik-baiknya.

Mendampingi kelompok lansia bukan hanya perkara memberikan bantuan praktis belaka, tapi juga soal memberikan perhatian, empati, dan penghormatan yang tulus. Mereka bukan hanya objek kegiatan sosial. Mereka juga manusia yang memiliki kebutuhan emosional dan sosial yang sama pentingnya seperti kita semua.



**Jalan Terjal Penerimaan Ibu,  
Pendukung Utama dalam Perjuanganku**

# Jalan Terjal Penerimaan Ibu, Pendukung Utama dalam Perjuanganku

Oleh: Adamar Ghofari Ananda

Kegiatan berjudul Family Support yang berlangsung di Yogyakarta pada bulan Juni 2022 itu tak mungkin dilupakan oleh Adamar Ghofari Ananda (26) dan ibunya, Yuli (60). Mengenakan kerudung kelir merah, Yuli (60) bertutur,

“Tadinya saya sedih anak saya berubah *kayak gitu*. Tapi setelah kita berkumpul di sini, saya bertemu dengan banyak taman-temannya dan keluarganya, akhirnya saya bisa menerimanya,”

tutur sang ibu, dalam sebuah rekaman video seusai acara.

“Melalui sesi ini, aku bisa tahu yang *dirasain* ibuku selama ini. Bahkan ibuku yang dari desa tidak tahu banyak tentang gender dan keberagaman seksualitas ini, akhirnya bisa mengerti kalau

*dijelasin* dengan caranya sendiri. Kami butuh bertahun-tahun untuk saling bisa menerima diri,” tutur Adam, panggilan akrabnya.

“Ibu senang kan?” tanya Adam. Yuli pun tersenyum.

“Senang. Hati Ibu jadi lepas. Ini bukan tujuan yang salah, tapi tujuan yang baik...” imbuhnya.

*Family Support* adalah sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Jaringan Transformasi Indonesia (JTID) sebagai bagian dari Konsorsium Building Resilience of Vulnerable Activist in Indonesia (BRAVE) yang didukung oleh Voice Global. Kegiatan ini dilandasi oleh adanya kebutuhan dukungan yang bukan hanya bagi para transgender melainkan juga untuk keluarganya.

Bertempat di lokasi berhawa sejuk di Yogyakarta, acara selama empat hari itu mengalir penuh kehangatan. Diawali dengan sesi perkenalan, mereka dibagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari beberapa keluarga untuk memperkenalkan diri dan berbagi kekhawatiran dan harapan.

“Saya merasa nyaman dan aman, karena kami semua memiliki pengalaman yang mirip dan saling memahami,” ujar Adam.

Pada hari kedua, yakni sesi sharing bersama, di sebuah ruangan yang nyaman, ia dan ibunya duduk bersama. Adam mengawali dengan bercerita tentang perjalanan penuh likunya sebagai seorang transpria. Selama ia bicara, sang ibu dan para keluarga yang lain mendengarkan penuh takzim.

Usai Adam bicara, sang ibu mengulurkan tangannya, menggenggam kedua tangan Adam.

“Saya mencintai anak saya apa adanya. Adam anak yang kuat,”

lanjut sang ibu. Seluruh ruangan pun hening. Dibekap haru.

Diakui oleh Adam, itu adalah sebuah suasana yang amat emosional.

“Itu adalah momen yang sangat berharga bagi saya, yang menghapus segala keraguan dan

kekhawatiran dalam hati saya,”

ujar Adam. Air matanya kala itu terus menetes saking bahagianya.

### **Masa Kecil dan Pertanyaan-pertanyaan Tak Berjawab**

Jalan panjang penuh kelokan bagi Adam dan ibunya untuk bisa menerima pilihan sebagai seorang transpria. Adam seorang anak tunggal. Ia lahir dan bertumbuh di lingkungan keluarga yang agamis dan konservatif di Padang, Sumatra Barat.

Sejak kecil ia dekat sekali dengan ibunya, yang bekerja sebagai seorang perawat di sebuah Rumah Sakit. Ayahnya bekerja di luar kota, dan beberapa bulan sekali pulang ke Padang. Saat Adam duduk di bangku SMP, kedua orangtuanya bercerai.

Kegelisahan itu ia rasakan sejak duduk di bangku TK dan semakin menguat saat ia di Sekolah Dasar. Adam tak nyaman jika dibelikan boneka dan gaun. Ia lebih suka mengenakan kaos dan celana pendek. Ia juga lebih nyaman bermain dengan mobil-mobilan yang disertai *remote* daripada boneka *barbie* yang dibelikan ibunya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah perbedaan laki-laki dan perempuan? Apakah perempuan harus bisa memasak? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya disimpannya dalam hati. Tak ada saudara



tempatnyanya bertanya. Ibunya juga sibuk bekerja dan pulang ke rumah di sore hari, sehingga ia akan sibuk mengurus pekerjaan rumah. Adam tak tahu bagaimana harus memulai bicara tentang dirinya yang ia rasakan berbeda.

Saat duduk di bangku SMP, ia menjadi lebih leluasa. Ia bisa memilih baju yang lebih maskulin. Ia juga memangkas rambut panjangnya menjadi pendek ala Polwan. Masa SMA adalah periode terberat baginya. Ia makin tak nyaman dengan tubuhnya sendiri. Ia selalu mandi cepat-cepat dan mengenakan *binder* untuk membebat bagian dada. Pertanyaan-pertanyaan mengenai identitas dirinya tak juga menemukan jawaban. Literasi mengenai gender dan seksualitas masih terbatas diakses. Adam mengenal istilah lesbian, tapi ia merasa bahwa dirinya bukan di posisi itu. Ia masih tertarik pada pria.

Di sisi lain, pertanyaan-pertanyaan dari tetangga dan keluarga besar kian berderet. Suatu hari, saat itu ia kelas dua SMA, ia pulang dari jalan-jalan dengan teman perempuannya. Rupanya keluarga besarnya tahu. Jadilah ia disidang di rumah tantenya.

“Kamu pacaran sama cewek ya?  
Ada yang lihat tadi!”

Tante membuka obrolan pertama.

“Kamu kok *nggak* normal,” imbuhnya.

Omnya menyahut,

“Iya, kalau *kayak gitu* kamu *nggak* diterima di sorga!” lanjutnya.

Adam hanya diam. Takut dan sedih. Ibunya juga diam dan kemudian menangis. Adam tak tahu bagaimana harus menjelaskan pergulatan dalam dirinya. Usai kejadian itu, ia makin takut bicara perihal dirinya pada sang ibu. Ia tak tak tega menyaksikan ibunya terluka.

### **Kuliah, Berselancar di Internet dan Suntik Hormon**

Tahun 2016, Adam kuliah di Fakultas Sastra Inggris di sebuah kampus di Padang. Ia bebas berekspresi lebih maskulin. Di fakultasnya, pada mahasiswa berasal dari beragam latar belakang dan daerah. Mereka jauh lebih terbuka. Pada semester tiga, Adam mulai aktif di BEM Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris. Ia juga bergiat di teater kampus.

Salah seorang dosen yang mengajar tentang studi gender dan berpikiran terbuka menjadi tempatnya berdiskusi. Adam juga mulai membaca jurnal-jurnal asing. Saat berselancar di internet, ia menemukan sebuah grup line komunitas queer di

Indonesia. Ia juga bertemu secara daring dengan salah satu transpria yang menjual hormon.

Tekadnya untuk suntik hormon yang telah dipikirkannya bertahun-tahun mulai menebal. Dan akhirnya terlaksana pada 6 Agustus 2016. Masih takut-takut, ia meminta ibunya untuk menyuntikkan jarum.

**“Ini suplemen..”** ujarinya.

Sang ibu tak keberatan. Ia menyuntikkan jarum di paha Adam. Setelah suntikan ketiga, barulah Adam berani menyuntikkannya sendiri. Sepanjang itu pula, ia membohongi ibunya bahwa itu adalah suntikan untuk suplemen. Adam tak tahu, bahwa ibunya telah tahu sejak awal.

**“Saya ini kan perawat. Jadi saya tahulah itu obat...”** ujar Yuli.

Ia mengaku tak tega menolak permintaan anaknya.

**“Saya tidak mau dia kecewa,”** ujarinya.

Jika rata-rata suntikan hormon baru berdampak setelah setahun, rupanya pada Adam suntikan hormon berdampak lebih cepat. Pada bulan ketiga, ia telah berhenti menstruasi. Suara dan otot-otot

di tubuhnya mulai berubah. Apalagi, Adam juga rajin ke gym sejak SMA.

Yuli menangkan perubahan itu tapi ia memilih tidak berkomentar. Setelah setahun pemakaian hormon dan ciri-ciri fisiknya mulai terlihat jelas, Adam barulah mengaku pada ibunya.

Adam makin aktif mencari-cari referensi komunitas seperti dirinya. Di platform twitter ia mengikuti banyak akun yang bicara tentang keberagaman seksualitas. Ia memperoleh banyak teman.

Suatu hari, ia mendapatkan informasi tentang organisasi Transmen Indonesia (TI). Kebetulan ia kenal salah seorang anggotanya. Ada informasi tentang rekrutmen staf di lembaga itu. Ia pun mendaftar. Sayangnya, saat itu ia skripsinya belum selesai, ia tak bisa meninggalkan Padang. Tak lama kemudian, ia menerima undangan untuk mengikuti pertemuan nasional TI di Bandung.

Akhirnya, Adam berangkat ke Bandung. Pertama kalinya ia pergi ke Jawa dan naik pesawat. Sebelum berangkat ia meminta izin pada ibunya.

**“Kamu pergilah. Hati-hati. Kabari kalau sudah sampai..”** ujar ibunya.

Adam merasa, sang ibu telah memberinya restu. Hal ini membuatnya lega.

Acara berlangsung selama enam hari dan diikuti oleh sekira 20 peserta dari 12 provinsi. Untuk pertama kali Adam bertemu dengan teman-teman transpria dari berbagai wilayah. Ia terkesan dengan penerimaan mereka yang hangat.

“Aku baru sadar selama ini banyak yang *kayak* aku. Aku baru tahu mereka banyak perjuangan. Coba kita kenal dari awal....”

ujar Adam. Usai acara mereka pun menandatangani akta pendirian organisasi Transmen Indonesia.

“Aku yang semula tak mengenal organisasi transpria, kini menjadi *founder*. Aku merasa wowww. Aku jadi bagian di dalamnya,” ujarnya.

Di pertemuan itu, ia juga bertemu dengan Gus Fikri, seorang transpria yang berasal dari keluarga pesantren di Jawa Timur. Beberapa kesamaan membuat ia merasa dekat. Kepada Gus Fikri, ia bertanya perihal ibadah yang ia lakukan.

“Ini urusan kamu sama Tuhan,

Dam,” ujar Gus Fikri, ditirukan oleh Adam.

### **Malam Lebaran, Momen Tak Terlupakan**

Sejak lama Adam merindukan momen dimana keluarganya duduk bersama dan mendengarkan satu sama lain. Ia ingin berbincang dari hati ke hati dengan ibunya.

“Saya berharap bisa menjelaskan lebih rinci tentang apa yang saya alami sebagai seorang transgender pria. Namun di sisi lain, saya juga ingin mendengarkan perspektif Ibu dan memahami perasaan dan harapannya sebagai seorang Ibu yang mencintai saya,” ujar Adam.

Namun setiap kali memulai, ibunya hanya terdiam dan menangis. Menyaksikan itu, Adam tak bisa berkata-kata lagi. Ia tak sanggup menyaksikan air mata luruh di pipi ibunya.

“Aku selalu takut kalau

membebani ibuku. Aku dicaci-maki *gak* apa-apa, tapi kalau Ibuku dicaci-maki orang aku tidak terima,” ujarnya.

Jika menyaksikan ibunya menangis, ia hanya akan bilang,

“Bu, sabar sebentar. Sebentar lagi aku kerja, aku akan pindah dari Padang,”

Tekadnya bulat segera bekerja untuk meringankan beban ibunya. Tapi ternyata tak semudah ia kira. Usai wisuda pada awal 2021, ia mulai melamar pekerjaan dan tapi selalu gagal usai wawancara. Berbulan-bulan menganggur membuatnya stres. Adam mulai menyalahkan diri sendiri. Ia tak mau menjadi beban ibunya. Ia pun mulai mendekatkan diri pada Tuhan. Ia ingin salat dan mengaji, tapi ia tak nyaman jika mengenakan mukena. Suatu hari, ia mengirim Direct Message ke Gus Amar Alfikar, seorang aktivis transpria yang merupakan anak seorang kiai di Kendal, Jawa Tengah, yang kini dikenal sebagai aktivis yang kerap memberi edukasi tentang isu gender dan seksualitas. Kepada Gus Amar ia mengungkapkan kegelisahannya.

## “Soal kostum, itu urusanmu dengan Tuhan. Silakan lakukan,”

ujar Gus Amar, ditirukan oleh Adam. Jawaban itu pun membuatnya lega. Pada bulan Ramadan 2021, ia pun mulai dengan peci dan sarung. Pintu kamar ia tutup rapat-rapat. Ia takut ibunya tahu dan marah besar. Di selembur sajadah, Adam menangis panjang. Ia merasa Tuhan lah satu-satunya yang sanggup memahaminya.

Sinar terang itu berpijar pada malam Lebaran 2021. Aneka masakan lebaran mulai rendang, gulai dan ketupat telah terhidang di meja makan. Adam sedang duduk di karpet, di depan televisi sambil bermain dengan kucingnya. Tiba-tiba ibunya masuk ke kamar dan keluar dengan tumpukan di tangan berisi beberapa lembar sarung dan baju koko yang masih baru, milik ayahnya.

## “Ini pakai *nih...*”

ibunya meletakkan tumpukan itu di atas karpet. Adam terpana. Sarung dan peci milik ayahnya, yang selama ini disimpan rapi oleh ibunya di dalam lemari. Penanda sang ibu telah merestuinnya. Namun, ia juga ragu, apakah ini sementara atau selamanya? Masih terpana, Adam mengangguk saja. Memberinya sarung dan peci, untuk salat Ied, Adam merasa sang ibu telah menerima keputusannya.

Malam itu adalah malam paling mengesankan dalam hidup Adam. Mereka makan berdua dan mengobrol panjang di meja makan. Di sela-sela alunan suara takbiran.

### **Ikut Program Fellowship, Jaringan pun Meluas**

Pengalaman dari Bandung menambah bekal pengetahuan, pengalaman, dan jaringan bagi Adam. Suatu hari ia mendapatkan undangan dari JTID untuk mengikuti pelatihan di Jakarta tentang gender dan seksualitas. Di forum itu, ia bertemu teman-teman transgender dari berbagai daerah. Jika dulu ia kerap bertanya-tanya tentang identitas gendernya, pelatihan itu memberinya jawab.

“Kalau dulu aku memandang bahwa transpuan adalah pekerja seks, setelah itu aku jadi tahu. Persoalannya jauh lebih kompleks. Banyak teman-teman transpuan yang diusir dari rumah, mau tak mau kerjanya itu. Aku mendapatkan *insight* baru,” ujar Adam.

Saat ada pembukaan *fellowship* dari Sekolah Tinggi



Hukum (STH) Jentera Indonesia di Jakarta, ia mendaftar dan lolos. Kendati awalnya berat karena sepanjang hidup tak pernah berpisah lama dengan anaknya, akhirnya sang ibu merestui.

25 November 2022, Adam tiba di Jakarta. Program fellowship yang berlangsung selama enam bulan itu memberinya tugas untuk melakukan riset tentang pelayanan kesehatan seksual yang bebas diskriminasi bagi transgender.

Dalam proses riset hingga diseminasi ia pun terhubung dengan berbagai pihak, mulai dari komunitas transgender, akademisi, hingga lembaga negara seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan dan pihak dari kementerian.

**“Saya senang, suara saya didengar oleh mereka. Saya jauh lebih percaya diri,”** ujar Adam.

Selama proses menjalani *fellowship* itu pula, Adam diterima bekerja sebagai Media Officer di Jaringan Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA), sebuah jaringan yang beranggotakan organisasi berbasis komunitas yang bekerja untuk isu HIV, kesehatan, dan hak asasi manusia.

Memiliki pekerjaan tetap di Jakarta, Adam pun merasa lega. Janji kepada sang ibu telah ia tunaikan. Ia mulai berani membincang sekitar

pekerjaannya dan memperkenalkan teman-teman pada ibunya. Saat *fellowship* selesai, Adam pulang ke Padang selama seminggu. Ia mengajak sang ibu jalan-jalan. Mereka menjadi lebih dekat. Ibunya mulai bertanya perihal pekerjaan dan teman-temannya.

Hingga akhirnya, pada Juni 2023 mereka diundang untuk menghadiri acara *Family Support* di Yogyakarta.

### **Penerimaan Ibu**

Bukan proses yang mudah bagi Yuli untuk menerima anaknya sebagai seorang transpria. Anaknya memang tampak tomboy sejak duduk di bangku SD. Ia tak suka memakai rok. Ia juga lebih memilih mainan mobil daripada boneka. Usia akil baligh, penampilannya makin maskulin. Rok dan kerudung hanya dia kenakan di sekolah, lantaran, ia bersekolah di SMP dan SMA Islam. Selebihnya, ia memakai kaos dan celana pendek. Adam juga memangkas pendek rambutnya.

“Aku lebih nyaman jadi cowok.

Aku ingin jadi cowok...” ujar Adam.

Yuli menghela napas. Semula ia hanya mengira anaknya berpenampilan tomboy. Tapi lama-kelamaan, keluarga besar dan tetangga makin kerap berkomentar.

“Punya anak *kayak* cowok begitu, kok *didiemin* saja,” celetuk seorang tetangga.

“Punya anak *kayak gitu* nanti *nggak* diterima di sorga!” ujar seorang kerabat

Perkataan-perkataan seperti itu, biasanya ia diamkan saja. Tapi makin lama tekanan dari kanan kiri tak urung membuatnya gusar.

“Rambut kamu *panjangin aja*. Pakai baju perempuan deh,” ujarnya.

Adam tetap menolak. Dan Yuli tak bisa berkata lagi. Ia hanya mengingatkan Adam untuk tidak lupa salat.

Yuli menyaksikan kegigihan anaknya. Sekolah Adam lancar. Kuliahnya bagus. Ia juga pintar bergaul. Tak pernah minta macam-macam. Akhirnya, omongan miring itu tak lagi ia hiraukan.

“Anakku urusanku. Aku juga tidak pernah mencampuri urusan orang!” ucapnya.

Suatu hari, ia pernah membincang dengan seorang temannya sesama paramedis.

“Dia mungkin lebih banyak gen laki-laki. Jadi larinya ke situ,” ujar temannya.

Yuli mencoba mencerna. Tapi ia sendiri masih penuh tanda tanya. Ia tahu anaknya tak nyaman dalam tubuh perempuannya. Tapi ia juga takut Adam salah langkah.

Setiap kali Adam hendak berbincang serius, ia tak mampu merespons apa-apa kecuali menangis. Pergumulan itu berlangsung dari hari ke hari, hingga Adam dewasa.

“Adam pernah bilang, kalau ibu *nggak* suka, saya numpang saja di rumah ini sampai kuliah. Duh bagaimana mungkin? Dia anak saya satu-satunya yang saya sayangi..” ujarinya.

Hingga suatu hari, dua lembar kertas yang tertempel di dinding kulkas, membuatnya air matanya bercucuran. Surat dari Adam. Lewat tulisan tangan, Adam mencurahkan isi hati yang ia pendam selama ini.

“Saya membacanya sambil menangis. Lama-lama saya renungkan, ya sudahlah, saya menerima anak saya...”

ujarnya. Usai membaca surat itu, kepada Adam, ia bilang,

“Ibu lega kamu akhirnya cerita...”

Yuli menyaksikan bagaimana anaknya ingin menjaga dan membahagiakannya. Adam juga rajin salat dan mengaji. Ia yang semula gundah menyaksikan anaknya diam-diam salat di kamar dengan mengenakan peci dan sarung, lama kelamaan ia hanya bisa pasrah. Ia percaya Tuhan Maha Tahu dan Penyayang. Malam takbiran, ia buka lemari, ia ambil beberapa lembar sarung dan peci terbaik milik suaminya yang selama ini ia simpan rapi. Ia serahkan pada Adam untuk salat Ied esok hari.

Saat Adam mendapatkan beasiswa selama enam bulan di Jakarta, Yuli mendukung penuh. Apalagi setelah itu Adam mendapat pekerjaan bagus di Jakarta. Sebelumnya, ia mengaku kerap khawatir dengan pekerjaan Adam sebagai aktivis transgender. Dia merasa cemas tentang masa depan Adam. Ternyata, Adam telah membuktikan

dan sanggup menjaga kepercayaannya.

Pertemuan *Family Support* di Yogyakarta makin meneguhkan hati Yuli untuk menerima Adam sepenuhnya.

“Saya mencintai Adam. Saya cuma punya Adam. Saya menyayanginya. Saya tahu Adam menjadi seorang transgender pria karena dia ingin melindungi saya,” ujar Yuli.

### **Sebuah Pembelajaran**

Kegiatan *Family Support* merupakan salah satu program dari Jaringan Transgender Indonesia (JTID). Berdiri pada 2019, JTID membangun solidaritas dan kolektivitas khususnya bagi transgender Indonesia agar membantu kemandirian mereka dalam kehidupan.

JTID juga melakukan rangkaian aktivitas diantaranya peningkatan kapasitas internal terkait program manajemen, peningkatan kapasitas untuk mitra profesional kesehatan mental, peningkatan kapasitas untuk individu transgender pembela HAM, serta *wellbeing* dan dukungan untuk individu transgender pembela HAM dan keluarganya.

Kevin, Program Manager JTID, menyebutkan bahwa program tersebut berjalan sejak September 2021 dengan dukungan Voice Global. Program ini dilaksanakan bersama-sama dengan Konsorsium Building Resilience of Vulnerable Activist in Indonesia (BRAVE) di mana JTID menjadi salah satu anggotanya, selain Sanggar Swara, Crisis Response Mechanism (CRM) dan PerempUAN.

Sanggar Swara bertindak sebagai host dan mengelola keuangan, CRM pada pembuatan *tools assessment* risiko serta modul penanganan kasus untuk para aktivis gender dan keberagaman seksual pembela HAM, sementara PerempUAN fokus pada kampanye dan materi edukasi di sosial media.

JTID bersama CRM bekerjasama dalam kegiatan peningkatan kapasitas tentang Psychological First Aid (PFA) yakni pertolongan psikologis pertama yang diberikan oleh kalangan dekat untuk mereka yang membutuhkan dukungan. CRM berfokus pada pembuatan modul pelatihan, yang diawali bersama-sama dengan JTID dengan membuat forum para ahli kesehatan mental.

Pada awal 2022, proses penyusunan modul dimulai dan akhirnya siap dipergunakan pada Agustus 2022. CRM juga memiliki paralegal, yang separuhnya adalah aktivis transgender.

Kegiatan Family Support dilandasi adanya

kebutuhan dukungan dari keluarga.

Mengumpulkan 10 pasang keluarga, kegiatan ini bertujuan untuk membuat mereka lebih mengenal diri mereka dan keluarganya.

“Forum sharing antar keluarga. Mereka jadi punya ruang untuk menceritakan yang sebelumnya tak bisa disampaikan. Teman-teman dan pihak keluarga merasa *relate* dan merasa sama-sama merasakan hal yang sama. Mereka punya *concern* yang sama dan saling memahami limitasi yang ada,” ujar Kevin.

Kevin bercerita, di forum tersebut berbagai latar keluarga bertemu. Selain Adam dan ibunya, ada keluarga transgender dari kalangan pesantren, yang selama bertahun-tahun terpisah dan tidak berkomunikasi.

“Kakaknya bercerita, dan akhirnya bisa menerima. Mereka

menjadi lebih dekat,” tambahnya.

Kisah mengharukan lain datang dari seorang transpuan berusia 60 tahun yang datang bersama anak laki-laknya yang kini memanggilnya mama.

“Sebenarnya ada rasa malu, tapi yang tahu orang tuaku ya aku. Yang sayang banget sama aku ya dia, Mamaku...”

cerita Kevin, menirukan tuturan salah seorang peserta.

Kegiatan *Family Support* tersebut berbuah manis, diantaranya terjadinya ikatan kuat antar teman dan keluarga. Para keluarga saling belajar dan merasakan penerimaan dan dukungan dari keluarga lainnya. Sementara, bagi para aktivis transgender, mereka punya kesempatan menyuarakan suara hati yang telah dipendam sekian lama. Mereka menjelma seperti keluarga baru. Silaturahmi itu kemudian berlanjut di forum grup *whatsapp*, untuk bertukar kabar dan saling menguatkan.

Forum selama empat hari ini memberi banyak arti bagi Yuli.

“Sejak pertemuan di Yogya itu, saya jadi bisa menerima Adam seutuhnya,” ujarnya.

“Adam sudah besar. Dia punya pendidikan. Tidak mungkin kerja salah. Ibu terlalu sayang padanya..” imbuhnya.

Kini, ia dekat dengan teman-teman Adam. Ia kerap menelpon dan mengirim *whatsapp* terhadap beberapa teman Adam untuk sekedar bertanya kabar. Ia merasa, kini teman-teman Adam adalah juga anaknya. Kini Yuli merasa bahwa hubungan mereka semakin dekat. Hampir setiap hari Adam *video call*. Adam juga selalu berkabar dan meminta izin jika hendak keluar kota.

Bagi Adam, kegiatan ini juga menjadi momen yang amat berarti buat ia dan ibunya. Mereka jadi bisa membuka diri dan saling mendengarkan.

“Saya ingin Ibu memahami lebih baik mengenai pekerjaan saya sebagai aktivis transgender. Melihat bagaimana pekerjaan

saya mempengaruhi hidup saya, dan mengetahui betapa pentingnya dukungan keluarga dalam memberikan kekuatan dan semangat dalam perjuangan ini,” ujar Adam.

Di sesi curhat dan komunikasi yang mendalam selama kegiatan ini, Adam dapat membuka hati dan berbagi dengan ibunya tentang tujuan dan arti pekerjaannya.

“Saya menjelaskan dengan jujur bagaimana pekerjaan ini memberikan saya kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak transgender dan masyarakat yang lebih inklusif,” ujar Adam.

Konsorsium BRAVE dalam Voice telah membentuk sebuah pondasi kerjasama antar organisasi dan ahli kesehatan mental, yang sebelumnya belum banyak tersentuh. Program ini juga telah membantu JTID dalam membangun dan memperluas jaringan. Dukungan yang diberikan

dari Pamflet Generasi selaku fasilitator Linking and Learning dalam sebuah pameran *photovoice* juga sangat membantu membuat dokumentasi yang menyuarakan mereka dengan lebih baik.

Bagi para transgender, peningkatan kapasitas yang diperoleh dari berbagai pelatihan dan forum-forum selama ini juga sangat membantu diri dan anggota komunitas lainnya, khususnya bagaimana mengelola *mental health* hingga mitigasi keamanan dalam bermedia digital.

“Setelah bertemu teman-teman Adam, ibu menjadi lebih lega. Setelah ibu ketemu teman, ibu baru bisa membuka hati. Teman-temannya baik dan sopan. Tidak ada yang kasar. Dulu Ibu takut Adam bekerja di jalur yang salah, ternyata tidak,” ujar Yuli.

Adam merasa, bahwa kegiatan ini sangat membantu memperbaiki komunikasi antara dirinya dan ibunya.

“Kami memiliki kesempatan

untuk saling mendengarkan tanpa prasangka dan meningkatkan pemahaman satu sama lain. Saya berbagi pengalaman pribadi saya dan Ibu saya juga menceritakan perasaannya, kekhawatiran, dan harapannya terkait perjalanan hidup saya.”

Adam menyatakan bahwa setelah acara *Family Support* berakhir, hubungan mereka berdua menjadi lebih baik dan lebih terbuka. Mereka telah menemukan titik persamaan dan pemahaman dalam pandangan tentang kehidupan dan pekerjaan Adam sebagai transpria. Komunikasi yang terjalin dalam acara ini membantu menghapus kesalahpahaman dan prasangka yang mungkin ada sebelumnya.

Kini, ibunya tak hanya mendukung pekerjaan Adam, tetapi juga menjadi pendukung utamanya dalam perjuangan untuk hak-hak transgender. Dia memberikan dukungan moral dan emosional yang sangat berarti baginya.



“Kami berdua merasa lebih dekat sebagai ibu dan anak. Rasa cemas Ibu saya telah berubah menjadi kebanggaan dan kepercayaan,” ujar Adam.

“Saya bangga pada Adam anak saya,” lanjut sang Ibu.

# Kampung Katong: Geliat Orang Muda Ciptakan Ruang Kreatif



**Kampung  
Katong:  
Geliat  
Orang Muda  
Ciptakan  
Ruang Kreatif**

Oleh: Lilik HS

Tangan Citra Khutami dengan cekatan meracik aneka bumbu: memotong bawang dan cabai, mengupas buah asam, lantas ia memasukkan ikan palumara yang telah dibersihkan ke dalam panci. Ikan segar yang disajikan dalam kuah asam pedas itu cukup menggugah selera. Citra juga mengolah buras, terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan santan, dibungkus dengan daun pisang lantas dikukus.

Di hadapan pengunjung yang memadati halaman Gedung Pusat Perfilman Negara (PFN), di Jalan Otista, Jakarta Timur, pada malam itu, Selasa, 24 Oktober 2023, Citra, ditemani oleh Musfika Syam, mengisahkan cerita di balik masakan ikan kuah asam, salah satu menu andalan warga di pesisir Labuan Bajo. Citra, Musfika dan beberapa anggota Komunitas Videoge hadir dalam acara Pekan Kebudayaan Nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Ristek RI.

Di Labuan Bajo, Citra dikenal piawai mengolah resep masakan. Ia sendiri lulusan sekolah masak di Yogyakarta. Ikan kuah asam yang diolahnya malam itu merupakan salah satu menu yang ada di buku *“Resep Tétangga: Kumpulan Resep Masakan Warga Pesisir Labuan Bajo”*. Kumpulan 64 resep dari Labuan Bajo yang malam itu juga dipamerkan,

merupakan salah satu hasil riset yang digagas oleh Komunitas Videoge, salah satu anggota Konsorsium Kampung Katong, sebuah kolaborasi komunitas muda lintas wilayah di Nusa Tenggara Timur.

Didorong oleh kegelisahan menghadapi berbagai tantangan yang muncul di wilayah mereka, mulai dari stereotip jauh dari ‘kemajuan’ yang membuat orang-orang muda enggan untuk bangga menjadi bagian dari masyarakat adat dan komunitas lokal, mereka berjibaku merebut dan mengembangkan ruang kreatifnya sendiri.

Kampung Katong adalah sebuah program yang dipimpin The Indonesian Institute for Forest and Environment (RMI), organisasi yang berfokus pada isu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, berkolaborasi dengan tiga komunitas lokal di Nusa Tenggara Timur. Tiga komunitas ini adalah Kolektif Videoge yang melakukan swadaya informasi atau pengadaan arsip pengetahuan warga, salah satunya dengan pembuatan buku resep pesisir di Labuan Bajo; Lakoat.Kujawas, komunitas kewirausahaan sosial anak muda di bidang kearifan budaya, mendokumentasikan resep Mollo yang ada di sekitar kampungnya di Timor Tengah Selatan; dan SimpaSio Institute yang mengumpulkan arsip-arsip sejarah-budaya Melayu Larantuka.

Ketiga komunitas orang muda ini dipersatukan dalam spirit yang sama, yakni berkarya di kampung serta mengangkat kearifan dan budaya. Mereka juga dipersatukan dalam benang merah kerja-kerja pengarsipan. Perlahan orang muda merebut ruang, merespons persoalan yang ada di hadapan mereka dengan topik dan metode-metode yang kontekstual di wilayahnya masing-masing. Semua dilakukan dalam semangat dekolonisasi.

Kampung Katong, arti harfiahnya adalah Kampung Kami, yang berarti semangat kerja bersama untuk membangun kampung. Program ini dilakukan sejak Desember 2021 hingga Oktober 2023 dengan dukungan Voice Global.

### **Orang Muda dan Kerja Pengarsipan**

Aden Firman, koordinator Kolektif Videoge, atau Videoge Arts and Society menjelaskan bahwa perjumpaan dengan Komunitas SimpaSio dan Lakoat.Kujawas lantaran mereka sama-sama bergiat dalam kerja-kerja pengarsipan. “Kami punya benang merah dalam kerja pengarsipan. Di Videoge, kami ingin merekam pengetahuan warga di Labuan Bajo. Semangatnya adalah, yang penting didokumentasikan dulu,” ucapnya, ditemui usai ia meluncurkan buku *‘Resep Tétangga’* di halaman gedung PFN, malam itu.

Kolektif Videoge adalah komunitas anak muda

di Labuan Bajo yang menginisiasi kerja-kerja pendokumentasian dengan pendekatan pada kerja-kerja multimedia. Multimedia sendiri kemudian tidak berhenti sebagai alat kerja tapi sebagai praktik lintas disiplin dan sebagai ruang belajar orang muda. Videoge mengajak orang muda di daerahnya untuk lebih mendekatkan mereka dengan kampung halamannya sendiri.

Aden adalah salah satu pendiri Kolektif Videoge. Ia mengungkapkan, awal terbentuknya komunitas ini lantaran didorong atas kesadaran pada kondisi kampungnya Labuan Bajo, di mana ia dan kawan-kawan sesama orang muda Labuan Bajo tidak pernah membayangkan Labuan Bajo akan bertemu dengan serbuan pariwisata semasif kini. Setelah pulang dari perantauan, mereka kemudian membuat komunitas dalam bingkai kegiatan kesenian.

*Merekam Kampung Lama* dipilih sebagai tajuk utama kegiatan Komunitas Videoge dalam program ini. Mereka merekam dinamika pengetahuan warga berupa budaya, fenomena, riwayat kampung dan lingkungannya kini, upaya warga dan komunitasnya sekaligus persoalan-persoalan yang dihadapinya, aktivitas kesenian hingga gaya hidup, serta sesuatu yang berkembang di antaranya menjadi fokus dari inisiatif orang muda tersebut.



“Semula, kami ingin merekam cerita warga yang rasanya bisa jadi sumber inspirasi teman-teman dalam praktik alih wahana pengetahuan lokal jadi bentuk-bentuk yang lebih inovatif. Sembari berjalan, yang paling mungkin adalah praktik pengarsipan makanan. Karena ada teman kita, Citra, yang gemar memasak. Ia juga sekolah chef. Akhirnya, bagaimana kalau itu kita pindahkan keluar dapur, dalam kerja-kerja pengarsipan,” ujar Aden.

Sebagai daerah yang tumbuh atas keberagaman latar belakang suku dan etnis, mereka termotivasi untuk mengarsipkan berbagai cerita unik seputar makanan di pesisir Labuan Bajo. Labuan Bajo memang tempat persinggahan masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah dan membawa khazanah kulinernya masing-masing. Namun,

tidak tersedia arsip mengenai kuliner kampung halaman. Akhirnya, datangnya ragam kuliner dari luar Labuan Bajo tanpa disadari semakin menggeser keberadaan kuliner lokal di daerah pariwisata ini.

Citra, melalui Kolektif Videoge, kemudian menjadi penggerak orang-orang muda dalam kegiatan pengarsipan resep tetangga. Anak-anak muda diajak untuk mencari menggali pengetahuan seputar penganan lokal, hingga terkumpul sebanyak 62 resep masakan yang akhirnya menjadi sebuah buku.

Aden menyebut bahwa awalnya mereka belum percaya diri bicara pengarsipan.

“Semangatnya kami ingin bikin karya. Kami ingin bikin sesuatu di kampung kami terkait kesenian. Rasanya dia jadi kehilangan konteks ketika tidak membicarakan hal-hal di seputar kami. Lalu kami ternyata membutuhkan kerja-kerja dokumentasi apalagi tidak ada

pengarsipan oleh daerah atau arsipnya sulit sekali kita dapat,” tambahnya.

Hal tersebut menemukan jawab ketika mereka menerjemahkan Program Kampung Katong. Program ini, disebutnya, mempertegas kerja pengarsipan yang sejak lama dilakukan oleh Videoge.

Kerja pengarsipan yang sama juga dilakukan oleh SimpaSio Institute, sebuah lembaga arsip dan kajian sosial budaya Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, salah satu anggota Konsorsium Kampung Katong.

Magdalena Oa Eda Tukan, akrab dipanggil Eda, adalah satu pengelola SimpaSio Institute. Ia menyebut bahwa SimpaSio Institute mengajak orang muda menampilkan mendukung orang muda yang punya semangat pulang kampung, dalam bentuk kerja-kerja pengarsipan.

Terlahir dari keluarga pendidik yang kuat dengan budaya literasi, Eda menjadi cinta akan sejarah dan budaya. Setelah lulus kuliah di Jakarta, bersama keluarganya ia mendirikan lembaga arsip dan kajian bernama Simpasio Institute, sebagai tempat belajar bagi orang-orang yang ingin mengenal Larantuka, kota pesisir di ujung timur Pulau Flores.

Bekerja secara kolaborasi dalam program Kampung Katong ini merupakan hal pertama bagi ketiganya. Eda menyebutkan, Kampong Katong, sebuah singkatan dari dialek Nusa Tenggara Timur yaitu “*kami pung manekat, papada, kampong tanga*” yang berarti semangat kerja bersama untuk membangun kampung.

Nama Kampung Katong secara resmi dipakai dalam *Kick-off Meeting* program pada 19–24 November 2021 di Bogor, Jawa Barat. Setelah sebelumnya hanya bertemu secara daring, pada acara tersebut mereka bertemu tatap muka.

Di Larantuka, SimpaSio menyaksikan bahwa generasi muda minim pemahaman dan kesadaran tentang sejarah dan budaya daerahnya sendiri. Persoalan ini timbul lantaran pendokumentasian yang sangat terbatas. Sangat sulit untuk menemukan arsip-arsip fisik tentang sejarah dan budaya Larantuka.

Eda menyebutkan, mereka kemudian menggagas Lingkar Belajar, yang dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka, mereka menggali dan mendokumentasikan sejarah dan kebudayaan masyarakat Nagi Larantuka seperti tenun ikat Waibalun, pengobatan tradisional, tari dan musik tradisional, sejarah kampung serta pangan lokal. Pengetahuan warga tentang kekayaan budaya Masyarakat Melayu Nagi Larantuka lainnya pun dihimpun.

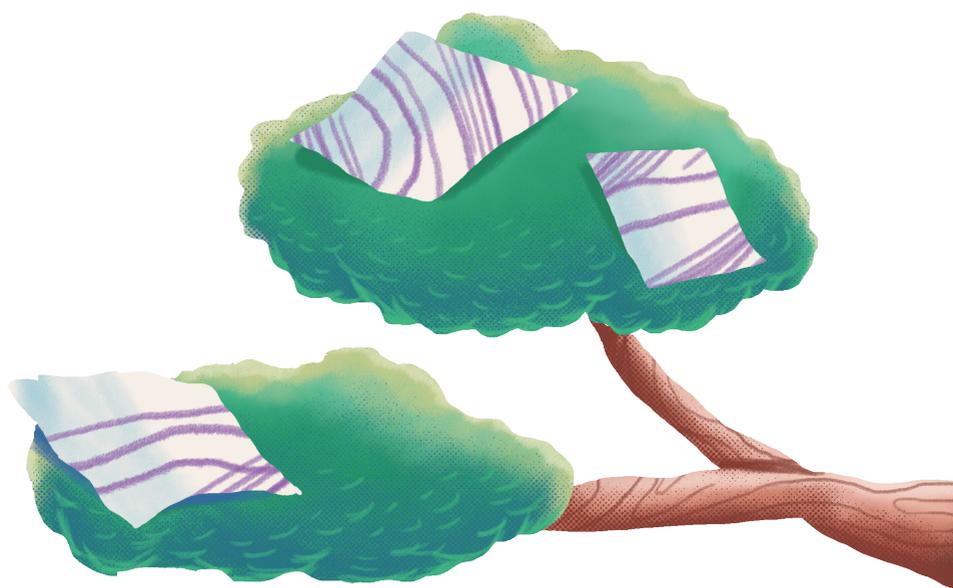
“Hasil pendokumentasian ini didiskusikan dan diolah bersama sebagai bagian dari rangkaian reproduksi pengetahuan lokal dengan harapan pengetahuan lintas generasi tetap terjaga,”

ucap Eda.

Antonia Humiliata Tukan, salah satu pegiat SimpaSio Institute, menambahkan bahwa sejarah Larantuka, motif kain tenun jarang diketahui oleh anak muda.

“Makanya kami perlu riset seperti ini. Untuk ke depan ada informasi agar tidak hilang. Apalagi penenun sudah tua. Orangtua kuliahkan anak muda dari jualan tenun, tapi anak-anaknya tidak tahu tentang tenun,”

tambah Oni, panggilan karibnya. Ia sendiri bergabung di SimpaSio Institute lantaran tertarik dengan riset-riset yang dikembangkan.



“Kearifan lokal adalah bagian dari identitas kita sendiri di Flores Timur. Kalau anak muda tidak mencintai bagaimana dia bisa menemukan identitas dirinya. Ini hal yang harus kita banggakan,”

tambahnya. Ia menyebut pelibatan lintas generasi dengan melibatkan orangtua dan tokoh-tokoh adat ini juga penting.

“Lingkar Belajar ini menjadi jantung dari kegiatan di SimpaSio,” ujar Eda.

Ia menyebut bahwa Lingkar Belajar sudah ada sejak 2018 dan makin intens dengan adanya ada Kampung Katong.

Pada Juli 2022 SimpaSio Institute mengadakan Pameran Arsip I yang dihelat di Larantuka. Bertujuan untuk memperkenalkan kearifan lokal dan hasil riset anak muda, acara yang digelar selama tiga hari itu dihadiri sekitar 1000 orang. Eda menyebut pameran itu berbuah manis.

“Terbangun dialog antara SimpaSio dan orang-arsip yang punya arsip di Larantuka. Kami juga mengundang sekolah untuk anak-anak datang dan mengajak mereka ikut riset terkait cerita kampung,” tambahnya.

Sukses, pada September 2023 SimpaSio menggelar Pameran II yang diberi nama ‘Rupa Nagi’.

Aden menjelaskan Labuan Bajo memang tempat persinggahan masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah dan membawa khazanah kulinernya masing-masing. Namun, tidak tersedia arsip mengenai kuliner kampung halaman. Akhirnya, datangnya ragam kuliner dari luar Labuan Bajo tanpa disadari semakin menggeser keberadaan kuliner lokal di daerah pariwisata ini.

“Atau justru secara bersamaan juga memperkaya keberadaan kulinernya—dalam keberagaman suku di pesisir Labuan Bajo yang disebutkan dalam buku sebagai

upaya membaca keberagaman lewat makanan atau yang kita sebut sebagai bentuk akulturasi di salah satu wilayah pesisir barat Flores, Manggarai Barat,” tambahnya.

Hal inilah yang mendorong Kolektif Videoge mendokumentasikan mendokumentasikan resep warga pesisir Labuan Bajo, yang kemudian diproduksi menjadi buku resep berjudul *Resep Tetangga*.

“Buku ini dibuat untuk mengenal identitas kuliner di Labuan Bajo dan juga semacam pemantik bagi kami untuk mengembangkan serangkaian program yang kami namai DapurPecah. Ini menjadi unit usaha dan wadah kolektif untuk belajar berbagai kreasi menu yang tidak meninggalkan resep asli, dengan disertai

beberapa narasi di baliknya,”

jas Aden.

Setelah mempelajari beberapa resep, mereka juga melakukan Telusur Musim, riset kecil-kecilan tentang kondisi alam dan musim apa saja yang sedang dirayakan warga di bulan dan waktu mendatang. Adapun telusur musim yang sedang dikerjakan saat ini adalah mengenai musim asam yang ada di Labuan Bajo. Melalui Telusur Musim dan uji coba produksi Telusur Rasa, Videoge menghasilkan produk kreatif dengan cerita warga di balik makanan yang bernilai ekonomi.

Proses riset juga membangun komunikasi yang begitu dekat dengan warga lain. Anggota Kolektif Videoge mengamati musim dengan berjalan kaki melewati hutan kota, pemukiman warga, gang sempit, hingga melakukan perhitungan sepanjang apa musim asam akan dirayakan warga pesisir di Labuan Bajo.

Narasi tentang pangan lokal juga dikembangkan oleh Komunitas Lakoat.Kujawas di Desa Taiftob, Mollo yang terletak di Pegunungan Mutis, Timor Tengah Selatan. Bermula dari sebuah perpustakaan, Lakoat.Kujawas lahir pada Juni 2016 atas inisiasi Dicky Senda. Komunitas ini mengajak orang muda Mollo untuk tidak sekadar bangga

dengan kekayaan alam dan budayanya tapi juga terlibat dalam usaha mengelola dan memanfaatkan semua potensi di seputarnya.

Mereka lantas melakukan pendokumentasian sejarah kampung, motif tenun, asal usul marga, rumah tradisional, dan pangan lokal. Nama Lakoat.Kujawas sendiri terinspirasi dari nama buah yang lekat dengan masa kecil anak-anak Mollo: buah lakoat (loquat) dan kujawas (jambu biji).

Upaya menggali dan mengumpulkan pengetahuan dan tradisi lokal ini merupakan salah satu kegiatan Lakoat.Kujawas lewat *Skol Tamolok*. *Skol Tamolok* atau sekolah budaya merupakan sebuah ruang pendidikan alternatif bagi orang muda Mollo untuk menelusuri kembali pengetahuan tentang identitas sebagai orang Mollo. Juga ada kelas menulis kreatif untuk anak-anak sekolah. Mereka diajak untuk menggali dongeng-dongeng yang biasa diceritakan, sebelum cerita-cerita tersebut kemudian ditulis dan dibukukan. Kegiatannya tidak hanya berlangsung di perpustakaan Lakoat.Kujawas, tapi juga mengunjungi rumah-rumah warga, menyusuri kampung atau berkunjung ke desa-desa.

**“Kami mengundang tetua  
untuk berbagi pengetahuan**

lokal cara membaca langit, cara membangun rumah adat, asal-usul nama daerah. Kemudian hasilnya dibuat dalam bentuk tulisan,” ujar Pselia Remasti Nati (18), salah satu anggota Lakoat.Kujawas.

Di Komunitas Lakoat.Kujawas, orang-orang muda Mollo kini punya eksperimen baru. Mereka mengisi waktu senggang dengan duduk bercerita dan berbagi pengalaman bersama para tetua adat.

Resi, demikian nama panggilannya, kini duduk di kelas XII SMA Kristen Kapan, Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ia bergabung dengan Lakoat.Kujawas sejak kelas V Sekolah Dasar, lantaran tertarik ketika seorang teman mengajaknya berkunjung ke perpustakaan Lakoat.Kujawas. Ia meminjam beberapa buku fiksi. Tak hanya buku-buku, kemudian di Lakoat.Kujawas juga ada kelompok kecil les bahasa Inggris yang diajar untuk relawan dari daerah lain, kolega Dicky Senda.

Kini Resi menjadi staf magang di Lakoat.Kujawas. Tugasnya adalah membantu staf Lakoat.Kujawas untuk mengerjakan laporan atau membantu mempersiapkan workshop atau kegiatan lainnya.

Resi menyebut, di Mollo berlimpah hasil pangan. Hampir semua kebutuhan hidup bisa dipenuhi tanpa harus membeli. Jagung, jamur, sorgum, umbi-umbian, dan sayur-mayur, semua tumbuh subur di halaman warga. Namun, gempuran makanan-makanan instan lewat iklan yang membanjiri sosial media membuat pola makan masyarakat pun berubah. Anak-anak kecil lebih gemar makanan instan. Padahal, pangan lokal juga adalah cerminan identitas suatu daerah. Jika pangan lokal itu hilang, berarti kita juga kehilangan identitas.

Lakoat.Kujawas melakukan riset, mencari resep-resep pangan lokal dari seputar wilayah Mollo. Mereka mencari bahan-bahannya di kebun atau hutan lalu bereksperimen dengan resep-resep makanan lokal yang sudah ada. Makanan dari hasil eksperimen dan inovasi bahan pangan lokal itu yang dihidangkan di setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Lakoat.Kujawas.

Salah satu yang dilakukan oleh Lakoat.Kujawas adalah menu pangan lokal tersebut diberikan ke anak-anak di sekitar sebagai Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Tujuannya, supaya lidah mereka akrab dengan pangan lokal.

“Ternyata mereka suka dengan menu baru ini. Kemudian kembali

ke rumah dan menceritakan kepada orangtua. Orangtua di rumah mungkin cuma tahu mengolah dengan sederhana. Dengan resep ini, jadi tahu bahwa jagung tidak hanya direbus tapi juga dapat dicampur dengan ubi, sorgum dan lain,” ujarnya.

Ia menyebutkan aneka resep dari bahan pangan di halaman rumah warga seperti bubur bose maktutu, uik nunut, lopis, wajik sorgum, puding dari ubi dan cake dari ubi dan pisang.

Mereka mengenalkan bahwa makanan berbahan pangan lokal itu tidak mahal dan kaya gizi. Menu dari olahan pangan lokal itu dihidangkan kepada anak-anak sambil bernarasi tentang apa yang ada di piring mereka.

Resi menyebutkan, setelah program Kampung Katong berjalan, kegiatan di Lakoat.Kujawas makin berkembang.

### **Suara dari Timur Makin Terdengar**

Berproses selama hampir dua tahun dalam Konsorsium Kampung Katong membawa proses

kreatif bagi ketiga komunitas orang muda ini. Eda menyebut, secara internal program ini telah meningkatkan kapasitas mereka.

“Orang-orang muda yang tergabung di SimpaSio mendapat ruang berekspresi melalui program ini. Kami juga mendapatkan pengalaman terkait pengelolaan dan manajemen organisasi, manajemen administrasi, dan cara mengorganisir program agar dapat terlaksana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya Kampung Katong ini juga, kapasitas riset juga makin meningkat,” ucapnya.

Program ini juga telah membuat orang muda Larantuka makin dekat dengan sejarah dan budaya daerahnya.

Dari Lakoat.Kujawas, Resi menyebut adanya

pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh program Kampung Katong membantu menguatkan kemampuan manajerial mereka di komunitas. Resi mengikuti pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan di Labuan Bajo pada Mei 2023.

Hal serupa juga dirasakan oleh Aden. Ia menyebut dengan program ini mereka juga banyak belajar dari pengelolaan keuangan dan program.

“Yang semula kami punya ide banyak tapi belum terukur karena kami belum ada instrumen untuk mengukur, maka adanya RMI dan program ini membantu itu,”

ujar Aden.

Ia menambahkan bagaimana program selama ini semakin mendekatkan mereka.

“Kerja-kerja komunitas ini seperti kerja pertetanggaan. Yang semula, Labuan Bajo, Larantuka, dan Mollo itu rasanya jauh. Ternyata tidak jauh. Karena

gagasan kami sangat dekat. Gagasan itu sangat bisa kita kembangkan. Program Voice memberi tenaga membuat kami semakin intens dan kita bisa membahas lebih banyak lagi. Ini menjadi ruang untuk saling belajar antara kami, baik dengan SimpaSio dan Lakoat. Memberi ruang untuk saling memperkuat. Program ini memberikan stimulus itu,” ujarnya.

Terkait dengan kerja berjaringan, hal ini juga diakui baik oleh SimpaSio, Videoge, maupun Lakoat.Kujawas. Adanya program membuat jaringan mereka semakin luas. Pintu kesempatan untuk berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, baik di lokal maupun nasional, kemudian menjadi semakin terbuka.

“Di Kampung Katong semua kegiatan kami jadi bagian kerja

bersama. Modal pertemanan di NTT sudah ada, tapi makin luas dan Program Voice membantu untuk makin dekat. Program ini juga mempercepat. Kalau tidak ada itu, mungkin kami tak bisa bikin acara festival karena biayanya yang mahal,” ujar Aden.

Eda merasakan dampak dari kerja-kerja pengarsipan SimpaSio yang semakin dikenal masyarakat.

“Dalam pameran arsip kemarin, dari pemerintah kabupaten hadir dan memberi apresiasi. SimpaSio menjadi rujukan untuk kerja pengarsipan di level komunitas. Pemerintah daerah juga memfasilitasi dengan kami bisa memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai untuk pameran,” kata Eda.

Kerja-kerja riset yang telah dilakukan oleh SimpaSio sejak 2018 hingga kini terus berjalan dan semakin diperkuat dengan Konsorsium Kampung Katong.

“Sebelum ada Kampung Katong, intensitas kegiatan SimpaSio tidak setiap bulan. Dengan dukungan dari program ini maka pertemuan menjadi intens dan rutin. Bentuk kegiatan pun makin beragam,” jelas Eda.

Ia juga menambahkan, bahwa jika selama ini SimpaSio fokus pada pendokumentasian dalam penulisan, dokumentasi foto dan video yang masih sederhana, setelah adanya program, kualitas produk menjadi semakin baik.

“Sehingga kami bisa bikin pameran arsip dengan baik,”

tambahnya.

Sementara itu, bagi Lakoat.Kujawas, kini anak muda Mollo bisa mengenali dan mendapatkan kembali pengetahuan adat.

“Dengan melakukan kunjungan-kunjungan tersebut, generasi muda Mollo jadi lebih mengetahui asal-usul dan seluk-beluk setiap marga beserta identitas dan ketetapan adatnya. Pengetahuan menarik juga mereka temukan selama proses wawancara dengan orang-orang tua dan para tetua adat,” ujar Resi.

Resi menyatakan bahwa setelah bergabung, ia lebih berani dan percaya diri untuk mengenalkan kepada orang luar.

“Tidak merasa minder dengan apa yang kita punya. Kita bisa memperkenalkan dengan berani tentang dengan identitas kita,” tambahnya.

Aden menyebut, waktu selama dua tahun tentu tak memberikan ruang banyak untuk beragam eksperimentasi. Tapi hal tersebut memberinya modal untuk terus bergerak.

“Kerja kami ini tidak banyak yang melakukan di Labuan Bajo, juga di NTT. Sehingga, kami memandang ini tak cukup sekali kami bikin. Harus berkali-kali. Kegiatan seperti Festival harus terus-menerus dikerjakan. Ada atau tidak ada donor, kami akan bikin. Modalitasnya sudah ada, ini kerja membangun partisipasi warga,” ujar Aden.

“Paling tidak, Program Voice membantu kita lebih bertenaga untuk memperluas kerja-kerja di komunitas. Bagaimana mereproduksi pengetahuan baru. Kami juga bisa belajar untuk menyusun program itu dalam konteks kami. Kami percaya bahwa produk-produk

pengetahuan bisa diciptakan dan disebarluaskan,” tambahnya.

Eda mengakui salah satu yang menarik dari kerja-kerja Kampung Katong adalah mereka dapat bekerja dan bereksperimen tanpa harus menanggalkan warna dan kekhasan masing-masing. Justru makin memperkuat dengan proses belajar dan bekerja bersama.

Ketiga komunitas ini menutup rangkaian program dengan mengadakan festival di daerah masing-masing. Pada 5–7 Oktober 2023 digelar Festival Kampung Katong di di Goa Batu Cermin, Labuan Bajo. Festival ini merupakan puncak dari program Konsorsium Kampung Katong. Hasil pengarsipan yang dilakukan orang muda secara swadaya juga ditampilkan dalam bentuk buku seperti Surat-Surat dari Mollo (Lakoat.Kujawas), Rekam Kampung Lama (Kolektif Videoge), dan Rupa Nagi (Simpasio Institute). Kekayaan pangan lokal yang dialami pegiat komunitas juga disajikan untuk mengenalkan pangan yang dikhawatirkan makin tidak dikenali generasi kini.

Aden menyebut Festival Kampung Katong ini adalah *legacy* yang ditinggalkan oleh program ini.

“Festival ini kami pandang sebagai perayaan metode kerja

bersama Kampung Katong. Kami bisa terhubung dengan banyak komunitas. Teman-teman bisa bergerak bersama. Pesta Kampung ini sebagai *pilot project* yang bisa dikembangkan. Dulu kami ingin bikin festival tapi tidak pernah kesampaian. Voice membuatnya jadi mungkin,”

ujar Aden.

Lakoat.Kujawas menggelar Festival menyambut musim tanam *Tfua Pah* pada tanggal 27 Oktober- 4 November. Dihelat di Perpustakaan Lakoat.Kujawas di Desa Taifob dipajang aneka karya orang muda Mollo. Ada hasil riset, tarian dan drama musikal. Mama Fun, panggilan Marlinda Nau, salah satu warga aktif yang bergiat di Lakoat.Kujawas, juga mendemonstrasikan memasak aneka pangan lokal. Festival itu ramai dibanjiri masyarakat sekitar hingga dari wilayah-wilayah lain.

Sementara itu SimpaSio menggelar Pameran II yang diberi nama ‘Rupa Nagi’. Pameran tersebut berlangsung selama dua hari menggunakan salah satu rumah tua milik warga yang berdiri sejak



1919, di Postoh, Larantuka. Pada pameran II ini lebih spesifik menghadirkan arsip budaya Melayu Larantuka. Dalam proses tersebut mereka juga melibatkan orangtua, tokoh budaya, sejarawan, dan guru sebagai narasumber.

Melalui berbagai eksperimen, inisiatif tiga komunitas anak muda dari Timur ini kini telah memperkuat pengetahuan lokal sebagai pusat dari identitas mereka. Ragam pertukaran pembelajaran, reproduksi pengetahuan lokal, aneka kerja pengarsipan dan pendokumentasian seni dan budaya telah berhasil memperkuat jati diri mereka.

Terus bergerak di akar rumput, dengan melibatkan orang-orang muda, mereka meyakini bahwa pengetahuan dan identitas lokal patut menjadi panduan untuk menjawab berbagai masalah di sekitar mereka.



Memeluk Diri Perempuan  
Pembela HAM



# Memeluk Diri Perempuan Pembela HAM

Oleh: Meidella Syahni

Istuti Leili Lubis tak pikir panjang saat abangnya, Dahri S Lubis memintanya pindah dari tanah kelahiran mereka di Dusun Duku, Deli Serdang ke Labuhanbatu. Saat itu Leili baru saja tamat sekolah dan Dahri hendak mencalonkan diri menjadi kepala desa di salah satu desa di Labuhanbatu. Dahri minta Leili membantunya untuk urusan pencalonan.

Kabupaten Labuhanbatu berjarak 273 km dari Deli Serdang. Ia bisa ditempuh dengan kereta api selama lima jam, atau mobil antara delapan hingga 12 jam perjalanan.

Dahri ikut diusung oleh sebuah organisasi yang fokus mendampingi perempuan korban kekerasan bernama Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu. SPI membangun posko-posko di 15 desa yang ada di 9 kecamatan di Labuhanbatu. Saat ini setidaknya ada 500an anggota SPI yang bisa mendampingi langsung perempuan korban kekerasan. Umumnya mereka adalah penyadap karet, buruh perkebunan sawit dan ibu rumah tangga.

Meskipun kemudian Dahri kalah dalam pencalonan kepala desa, dia meminta Leili tetap di Labuhanbatu dan membantu SPI. Dia meyakinkan

Leili, SPI organisasi bermutu dan bahwa adiknya bisa belajar banyak di sini.

“Biar tak *lasak*<sup>1</sup> di Medan juga,”

kata Leili mengenang pesan abangnya.

Rupanya pesan abang benar adanya. Sejak pertama kali menjadi relawan sekitar tahun 2002-2003, Leili langsung jatuh hati dengan kegiatan pendampingan yang dilakukan SPI. Dia tak pernah memikirkan akan hidup dari mana, dibayar berapa, dan dapat apa.

“Belajar, cari amal. Itu saja,”

kata Leili yang meyakini dengan amal dia bisa mendapatkan berkah dan hidup yang baik.

Sejak saat itu, Leili mengabdikan hidupnya untuk SPI. Leili mulai mengikuti pelatihan-pelatihan soal gender dan patriarki. Dari para pendiri SPI, dia belajar ikut membela perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pernah terlintas di pikirannya, apakah ini artinya dia mencampuri urusan rumah tangga orang lain? Namun, setelah kemudian ikut pelatihan konseling untuk korban, Leili mulai paham bahwa apa yang dilakukannya justru membantu korban.

---

1 Tak bisa tenang, banyak bergerak.

Masa-masa awal di SPI, Leili kerap mendampingi korban yang ingin melapor ke Polres setempat. Mulai dari korban pelecehan, perselingkuhan, hingga perkosaan. Tak jarang ini terjadi hingga tengah malam. Tak jarang juga pendampingan ini sulit dijalankan. Ada masanya SPI berhasil menjebloskan pelaku perkosaan ke penjara. Ada pula kasus kekerasan dalam pacaran yang berakhir dengan ‘damai antar keluarga’ meski korban mendapatkan restitusi. Ada pula, yang paling membuat ia geram, kasus perselingkuhan yang diikuti dengan pemukulan terhadap korban.

Setelah cukup lama fokus di pendampingan, SPI mempercayakan Leili untuk meneruskan pengkaderan. Kali ini fokusnya mengajak penyintas untuk bergabung dengan SPI agar bisa menolong lebih banyak perempuan. Targetnya adalah perempuan di akar rumput, yakni perempuan desa dan penyintas atau keluarganya.

### **Rentan Ancaman**

Tak terasa hampir dua puluh tahun Leili menghabiskan hidupnya untuk SPI. Berbagai ancaman pernah dia dan anggota SPI lainnya terima. Suatu kali, kantor SPI pernah dilempar batu oleh pelaku yang marah karena dilaporkan. Pernah juga media memuat berita bernada miring terhadap kegiatan pendampingan korban. Kali lain, pelaku membawa parang sambil mengancam

korban. Bahkan, anggota SPI pernah diludahi pelaku saat di pengadilan.

Namun pengalaman mengajarkan Leili bahwa pelaku kekerasan umumnya adalah pengecut yang cuma berani mengancam.

“Kalau kita lawan, tak berani juga mereka,” ungkap Leili.

Saat ditanya apa yang bikin dia bertahan di jalan pendampingan ini, Leili sontak menjawab, senyuman korban atau keluarganya saat mereka merasa puas dengan dampingan SPI.

“Berkah *kali pun*. Lebih bahagia lagi kalau mereka kemudian mau bergabung dengan SPI,” ujarnya.

Di sisi lain, tak jarang juga SPI tak bisa memenuhi semua keinginan korban atau keluarganya karena kurangnya dukungan pelayanan di SPI, terutama saat awal berdiri. Saat itu, cerita Leili, SPI tak punya pengacara maupun psikolog yang bisa mendampingi korban. Beruntung SPI punya jaringan termasuk ke Komnas Perempuan yang bisa membantu advokasi mereka.

Kini, berkat perjuangan berbagai organisasi

perempuan termasuk SPI, telah berdiri Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di setiap daerah yang bisa memberikan fasilitas pengacara dan psikolog gratis bagi korban.

## **20 Tahun Punya Apa?**

Setelah lebih dari 20 tahun berdiri, SPI Labuhanbatu diundang menjadi bagian dari Konsorsium IPROTECTNOW (Indonesia Protection for Women Human Rights Defender Network), yakni sebuah jaringan bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak.

Saat pertemuan jaringan yang didukung program Voice ini, Leili tersentak mendengar pertanyaan yang dilontarkan dalam forum: apa yang sudah dia dan anggota SPI miliki sebagai perempuan pembela HAM? Di sini ia sadar bahwa selama dua dekade dia mendampingi korban, dia tak pernah memikirkan kebutuhan dirinya sendiri dan teman-teman PPHAM (Perempuan Pembela HAM) di SPI.

“Kami taunya kerja sukarela aja, kan. Bukannya dibayar malah kami yang membayar. Aku rayu abangku agar kasih uang,” tuturnya.

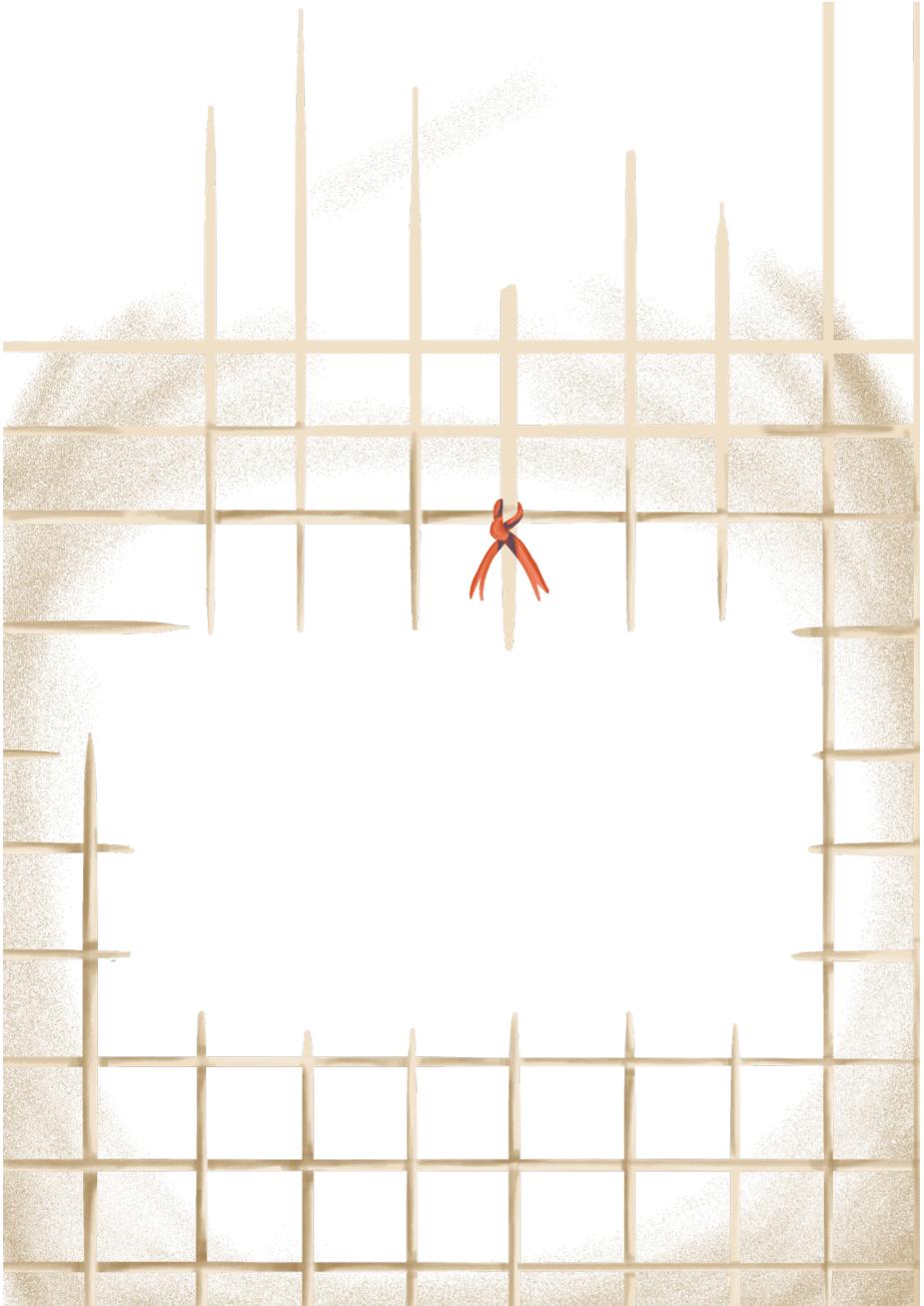
Meski baginya itu bukan masalah besar, karena toh dia tetap hidup dengan baik dan sehat, namun bukan berarti pekerja sosial seperti dirinya tak butuh dukungan kesejahteraan terutama untuk kesehatan.

Saat pandemi COVID-19 melanda, Leili merasakan ambruknya keuangan organisasi berimbas pada banyaknya anggota yang membutuhkan bantuan. Kondisi mereka yang tak punya jaminan kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan membuat PPHAM semakin rentan.

Mereka tak punya kartu BPJS. Iuran organisasi yang dikumpulkan Rp 4000 per orang per bulan juga habis untuk keperluan operasional posko, kantor, dan pendampingan korban.

Karena itu, hadirnya Konsorsium IPROTECTNOW menjadi oase bagi Leili dan SPI. Program ini mengidentifikasi bahwa PPHAM seperti Leili punya tiga risiko berlapis: sebagai perempuan, pembela HAM, dan pekerjaannya terkait pelayanan dan pendampingan korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Untuk itu, perlu mekanisme perlindungan dan dukungan pemenuhan hak mereka secara komprehensif. Tak hanya perlindungan dan dukungan terkait keamanan, juga hak lainnya seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, hari tua, perumahan serta jaminan sosial



lainnya. Hak-hak ini dibutuhkan baik untuk mereka sendiri maupun keluarga baik dalam keadaan sedang mendapat ancaman maupun tidak.

Serangan dan ancaman yang dialami Leili juga dialami hampir semua PPHAM yang tergabung dalam jaringan ini. Jaringan ini terdiri dari 8 lembaga di 6 provinsi yakni Sumatera Utara, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Dari pengumpulan data awal yang dilakukan ditemukan hanya separuh dari peserta jaringan yang punya asuransi kesehatan dan hanya 13% yang punya asuransi kecelakaan kerja dan hari tua. Cuma 3% yang punya tunjangan perumahan.

Umumnya, premi dibayar mandiri atau ada juga yang dibayarkan oleh lembaga mereka. Hanya 17% yang dibayarkan pemerintah karena termasuk kategori miskin atau karena mereka bekerja di unit PPA.

Di samping itu, sumber pembiayaan iuran premi asuransi atau jaminan sosial yang dibayar oleh lembaga penyedia layanan berasal dari dana program kerjasama dengan lembaga donor. Masalahnya, tidak semua lembaga donor nasional maupun internasional bersedia mengalokasikan dananya untuk pembiayaan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Apabila kerjasama dengan lembaga

donor selesai, maka pembiayaan jaminan sosial dihentikan atau lanjut dengan biaya yang ditanggung sendiri.

Cakupan layanan jaminan sosial seperti asuransi/ jaminan kesehatan yang mereka miliki juga tidak dapat digunakan untuk membiayai masalah-masalah kesehatan yang terkait dengan kesehatan reproduksi dan persalinan. Sejumlah lembaga penyedia layanan tempat mereka bekerja, menyediakan bantuan dana dengan jumlah nominal beragam yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan lembaga. Sayangnya, khusus untuk asuransi kesehatan dari BPJS, tidak bisa digunakan untuk membiayai pengobatan dan perawatan bagi mereka yang mengalami ancaman dan kekerasan atau korban kejahatan.

Meskipun demikian, semua lembaga penyedia layanan perempuan korban baik dari pemerintah dan masyarakat, menyadari pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak atas jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pendidikan, tunjangan perumahan, dan tunjangan atau jaminan sosial lainnya. Menurut mereka, perlindungan dan pemenuhan yang baik atas hak-hak jaminan sosial bagi PPHAM akan memberikan dampak meningkatnya kualitas layanan, memberikan ketenangan dan keamanan dalam bekerja, serta memperpanjang umur layanan bagi korban.

Para pimpinan lembaga penyedia layanan dan kementerian juga mengakui bahwa mereka belum memiliki mekanisme khusus untuk melindungi hak-hak PPHAM atas jaminan sosial. Ada tiga lembaga yang sudah memiliki mekanisme, tapi mekanisme tersebut masih menekankan pada aspek perlindungan keamanan dari ancaman dan kekerasan dan belum memasukkan perlindungan hak-hak atas jaminan sosial.

Hak-hak atas jaminan sosial terutama asuransi kesehatan, dimasukkan ke dalam kebijakan keuangan, kebijakan ketenagakerjaan, atau kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia lembaga. Cakupannya pun masih terbatas untuk mereka yang sudah menjadi staf lembaga. Sementara, yang masih menjadi relawan atau magang belum sama sekali terlindungi.

### **Sebuah Langkah Awal**

Pada tanggal 10 Desember, bertepatan dengan Hari HAM Sedunia, hasil asesmen yang dilakukan oleh Konsorsium IPROTECNOW telah didiseminasi kepada PPHAM, pendamping korban, penyintas, lembaga penyedia layanan, pemangku kepentingan kunci di pemerintah pusat dan daerah, NGO, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.

Konsorsium IPROTECNOW berupaya mengembangkan sistem perlindungan ini



dengan mendorong kebijakan pemerintah, memperkuat dukungan dan kapasitas lembaga penyedia layanan dan jaringan PPHAM di tingkat nasional dan daerah.

Rekomendasi kunci tersebut diantaranya adalah mendorong kebijakan khusus untuk perlindungan dan dukungan PPHAM pendamping perempuan korban baik ditingkat nasional maupun daerah.

Rekomendasi lainnya adalah untuk memperkuat dukungan dan kapasitas lembaga penyedia layanan melalui peningkatan kesadaran, penyusunan protokol perlindungan dan dukungan yang komprehensif, memberikan dukungan asistensi teknis untuk penerapan di tingkat lembaga, serta memberi dukungan penyediaan sistem pendokumentasian berbasis internet.

Juga memperkuat dukungan dan kapasitas individu dan jaringan pendamping perempuan korban melalui penguatan kesadaran individu, penguatan kelembagaan jaringan, serta memfasilitasi mekanisme dan penggalangan dana abadi untuk dukungan PPHAM.

Beberapa hari setelah diseminasi hasil asesmen dilakukan, Konsorsium IPROTECNOW bersama dengan perwakilan PPHAM dan tenaga ahli langsung berdiskusi mematangkan konsep protokol perlindungan dan dukungan hak-hak yang komprehensif yang mencakup perlindungan

atas keamanan dan jaminan sosial serta konsep sistem pelaporan dan pendokumentasian.

Diskusi tersebut menghasilkan draf dan menyepakati dua dokumen penting yaitu; 1) Prinsip dan standar perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya untuk PPHAM pendamping korban di lembaga penyedia layanan; dan 2) Protokol perlindungan dan dukungan jaminan sosial bagi PPHAM pendamping korban di lembaga penyedia layanan. Kedua dokumen tersebut disepakati untuk dikembangkan dari instrumen hukum HAM internasional dan nasional khususnya Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Meski ini baru langkah awal, Leili yakin perjuangan ini akan membuahkan hasil kelak. Program ini membantu Leili dan SPI mengadvokasi diri mereka sendiri, mencari celah agar PPHAM minimal bisa mendapatkan jaminan sosial.

**“Kita sudah berhasil dengan  
Undang-Undang KDRT. UU  
Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

pun lolos berkat kerja jaringan.  
Tapi, memang butuh waktu,”

katanya.

Untuk itu Leili berharap teman-teman perempuan pembela HAM di Indonesia dapat terus berjejaring memberikan pemahaman kepada pemangku kebijakan baik di daerah maupun nasional pentingnya mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan perempuan pembela HAM. Baginya perempuan pembela HAM ada dan nyata kontribusinya untuk negara. Karena itu mestinya pemerintah juga dapat memberikan perlindungan kesehatan dan sosial bagi mereka.



Cita Inklusi berupaya untuk mengabadikan semangat untuk menciptakan perubahan. Melalui dua belas cerita yang terkumpul, tersibak ragam rupa suara para pejuang hak perempuan, teman-teman penyandang disabilitas, ragam gender dan seksualitas, lansia dan orang muda, serta masyarakat adat dan etnis minoritas dalam perjuangannya di berbagai sudut Indonesia. Cita Inklusi, harapnya, adalah bukti bahwa kekuatan akar rumput dalam mewujudkan keadilan hidup dan akan terus berkembang.

Diterbitkan Oleh



Atas Dukungan

